

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan yang demokratis, desentralisasi, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sejak diterapkannya otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah semakin luas. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi memiliki kewajiban untuk menjalankan pemerintahan, mengelola sumber daya, serta memastikan pembangunan dan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat di wilayahnya.

Seiring dengan dinamika pelaksanaan otonomi daerah yang semakin kompleks, kebutuhan akan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan semakin mendesak. Karena itu, untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan prinsip *good governance* (pemerintahan yang baik), diperlukan mekanisme pelaporan yang sistematis dan terstruktur. Gubernur sebagai Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana amanat Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Khusus untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), mencakup laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi kepada Presiden melalui Menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan batas waktu penyampaiannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Lebih lanjut, Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang terdiri atas capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah, capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan serta laporan penerapan standar pelayanan minimal.

Mempedomani ketentuan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, bersama ini Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2024 yang disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024, sebagai berikut.

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur awalnya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649), akan tetapi dalam perjalanannya Undang-Undang dimaksud dipandang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, sehingga kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810).

Sedangkan untuk pembentukan 12 (dua belas) Kabupaten masih menggunakan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) sehingga pada saat itu di Provinsi Nusa Tenggara Timur terbentuk 12 Daerah Tingkat II, yaitu Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Alor, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Sumba Barat dan Sumba Timur.

Setelah 64 Tahun perjalanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan spirit peningkatan pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang didukung oleh aspirasi masyarakat serta perubahan regulasi yang mengatur tentang penataan daerah, maka sejak Tahun 1996 hingga akhir Tahun 2013, di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah ditetapkan 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota, yaitu:

- 1). Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- 2). Kabupaten Lembata dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3). Kabupaten Rote Ndao dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
 - 4). Kabupaten Manggarai Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
 - 5). Kabupaten Nagekeo dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
 - 6). Kabupaten Sumba Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
 - 7). Kabupaten Sumba Barat Daya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
 - 8). Kabupaten Manggarai Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4752);

- 9). Kabupaten Sabu Raijua yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4752);
- 10). Kabupaten Malaka yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5396).

Dengan demikian secara keseluruhan, sejak akhir Tahun 2013 sampai dengan saat ini Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 21 Kabupaten dan 1 Kota.

b. Data Geografis Wilayah

1.) Data Geografi.

Provinsi NTT terletak di sebelah selatan katulistiwa pada posisi 8°12° Lintang Selatan dan 118°–125° Bujur Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemuthakiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, Provinsi NTT terdiri dari 609 Pulau yang meliputi 21 Kabupaten dan 1 Kota Madya, 315 Kecamatan, 305 Kelurahan dan 3.137 Desa dengan total luas wilayah yaitu 46.446,644 km². Kabupaten Sumba Timur merupakan wilayah terluas yaitu sebesar 6.984 km² dan Kota Kupang merupakan wilayah paling kecil dengan luas 159 km². Sebanyak 82 persen desa/kelurahan di NTT terletak di daerah lereng dengan rincian, 20 desa/kelurahan berada di lembah, 2.849 desa/ kelurahan berada di lereng dan 581 desa/kelurahan berada di dataran.

Secara fisik batas wilayah Provinsi NTT, adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Samudera Hindia (Negara Australia)
- Sebelah Timur: Berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Laut Timor

- Sebelah Barat: Berbatasan dengan Selat Sape (Provinsi Nusa Tenggara Barat).



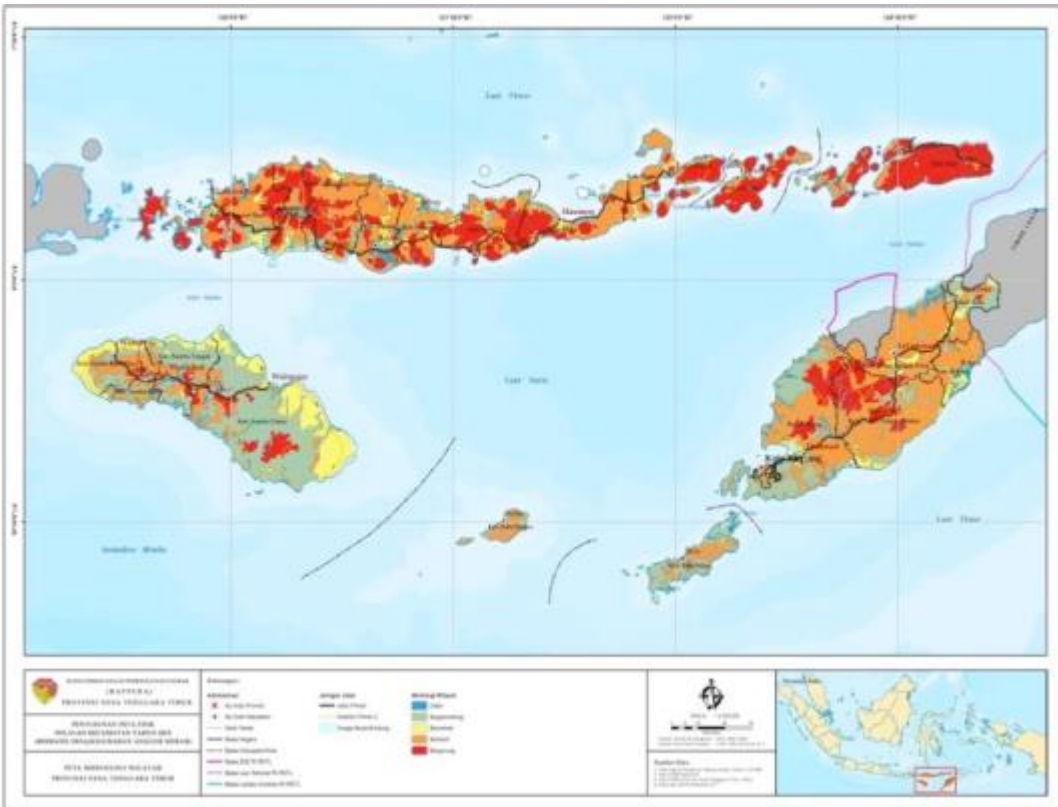
Sumber : Bappeda Provinsi NTT, 2017

Gambar 1.1. Peta Provinsi Nusa Tenggara Timur

Wilayah administratif terluas adalah Kabupaten Sumba Timur 7.000,50km² dan Kabupaten Kupang dengan luas 5.434,76 km², sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Kupang dengan luas 26,18 km² dan Kabupaten Sabu Raijua dengan luas 460,54 km².

2) Kondisi Topografis.

Secara geomorfologis Provinsi NTT mempunyai bentuk wilayah berbukit-bukit dan bergunung-gunung, dengan dataran-dataran yang sempit yang umumnya memanjang sepanjang pantai dan diapit oleh dataran tinggi atau perbukitan. Kondisi geomorfologi seperti pada gambar berikut.



Sumber : Bappeda Provinsi NTT, 2017

Gambar 1.2. Peta Morfologi Nusa Tenggara Timur

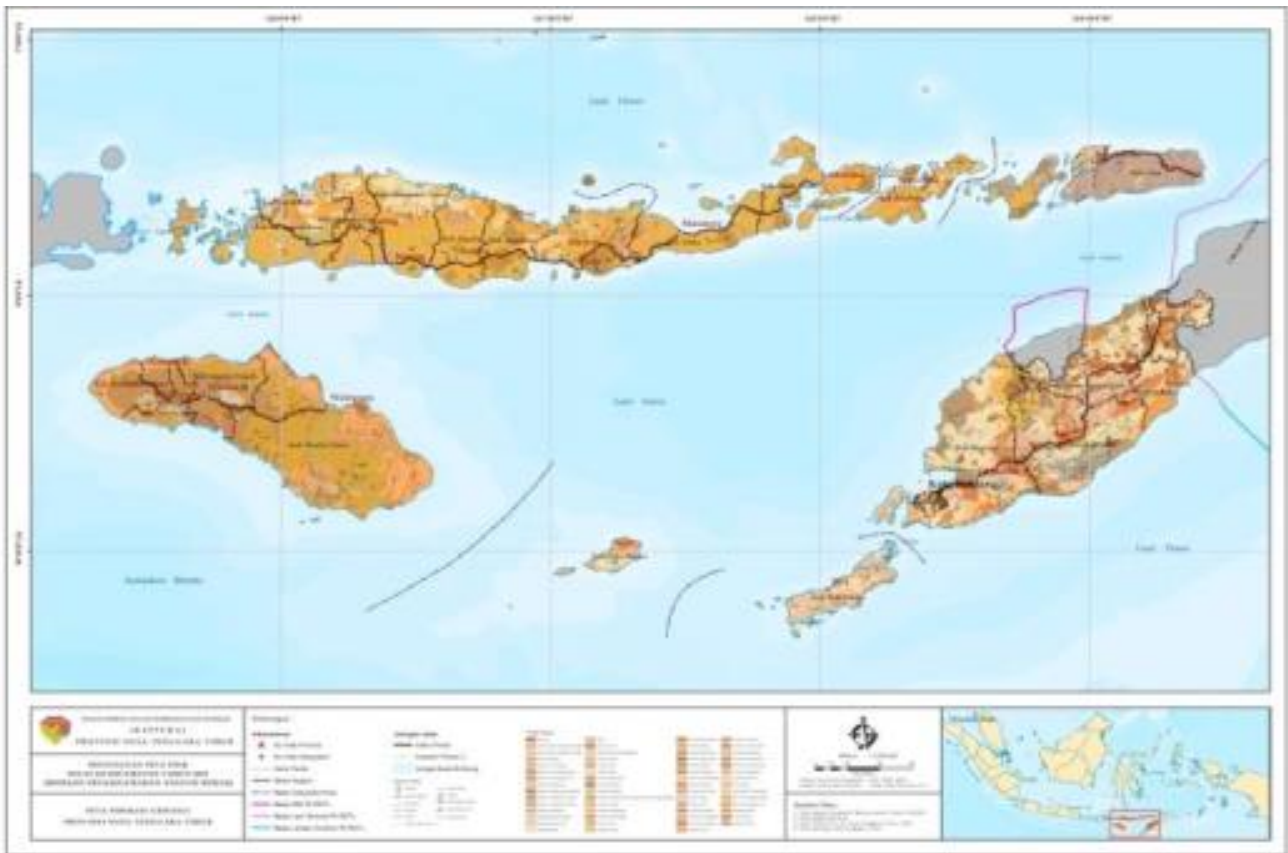
Secara topografis 48,78 persen atau sekitar 2.309.747 ha luas wilayah NTT mempunyai lahan dengan rentang ketinggian 100 – 500 m diatas permukaan laut (dpl). Sebagian kecil wilayah yaitu sebesar 3,65 persen memiliki ketinggian di atas 1.000m. Dari sudut kemiringan lahan ada 38,07persen luas lahan yang mempunyai kemiringan 15–40 persen, sedangkan lahan dengan kemiringan lebih dari 40 persen mencapai 35,46 persen dari keseluruhan luas wilayah. Dengan kondisi topografis tersebut, sistem produksi pertanian pada dataran rendah sangat terbatas baik untuk pertanian lahan basah maupun lahan kering.

3) Geologi.

Wilayah Nusa Tenggara Timur termasuk dalam kawasan Circum-Pacific sehingga daerah ini, terutama sepanjang Pulau Flores dan Pulau Timor, memiliki struktur tanah yang labil.

Pulau-pulau seperti Flores, Alor, Komodo, Solor, Lembata dan pulau-pulausekitarnya terletak pada jalur vulkanik (*Ring of Fire*) dan dapat dikategorikan subur namun rawan bencana geologis. Di daerah ini juga terdapat kandungan sumber daya mineral dan sumber-sumber energilainnya termasuk sumber energi panas bumi/bahan bakar minyak.

Sebaran wilayah dan potensi geologis disampaikan pada gambar berikut.



Sumber : Bappeda Provinsi NTT, 2017

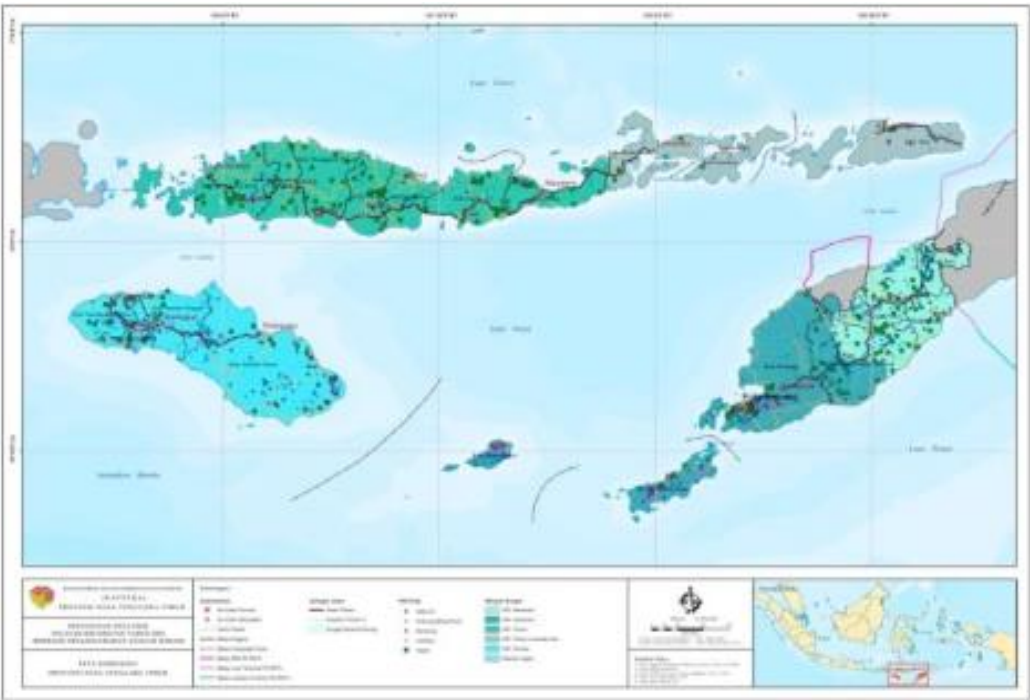
Gambar 1.3. Peta Formasi Geologi Nusa Tenggara Timur

4) Hidrologi.

Kondisi dan potensi hidrologis dapat dilihat dari potensi airpermukaan dan air tanah. Secara umum, potensi hidrologis terutama airpermukaan tergolong kecil. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya eksploitasumber air permukaan untuk kepentingan pembangunan.

Nusa Tenggara Timur memiliki 27 Daerah Aliran Sungai (DAS) denganluas keseluruhan 1.527.900 ha. Sungai yang terpanjang adalah SungaiBenanain sepanjang 100 Km yang mencakup Kabupaten TTS, TTU danBelu. DAS terluas adalah DAS Benanain yaitu 329.841 ha.

Kondisi hidrologis yang menentukan kemampuan penyediaan air diwilayah Nusa Tenggara Timur seperti pada gambar berikut:

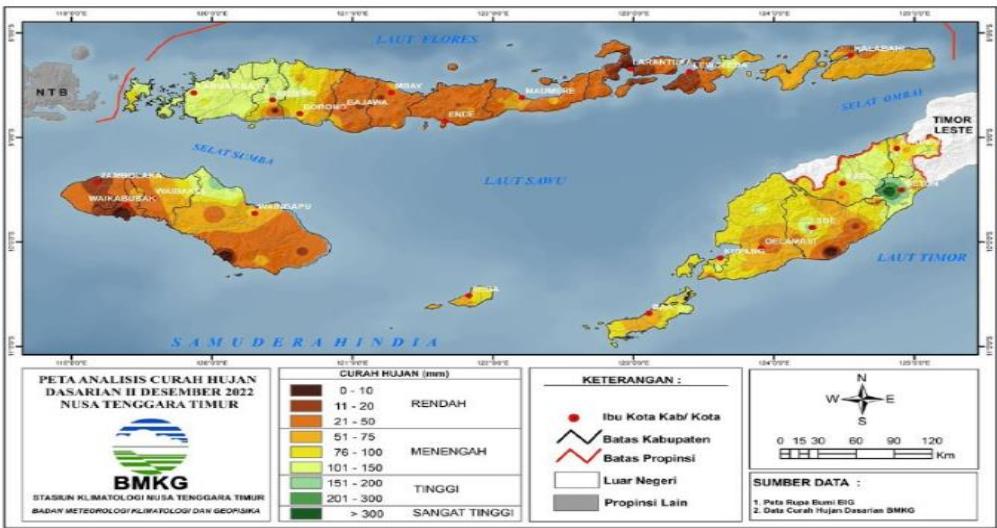


Sumber : Bappeda Provinsi NTT, 2017

Gambar 1.4. Peta Hidrologi Nusa Tenggara Timur

5) Klimatologi.

NTT termasuk dalam wilayah iklim tropis yang termasuk ke dalam kategori iklim semi-ringkai dengan karakteristik musim penghujan rata-rata tiga sampai empat bulan dan musim kemarau delapan hingga sembilan bulan. Peta sebaran intensitas dan hari hujan variatif antar wilayah disampaikan dalam gambar berikut.



Sumber : BMKG, 2023

Gambar 1.5. Peta Analisis Curah Hujan Nusa Tenggara Timur

Akumulasi curah hujan maximum selama musim kemarau 2024 terjadi di Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende (1017 mm) dari Minggu ketiga Bulan April sampai dengan Minggu Kedua Bulan

November. Sedangkan akumulasi curah hujan minimum sepanjang musim kemarau 2024 terjadi di Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata (49 mm) dari minggu kedua bulan April sampai dengan minggu kedua bulan November.

Akumulasi curah hujan maximum selama musim hujan 2023/2024 terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara (3823 mm) dari minggu kedua Bulan Desember 2023 sampai dengan minggu pertama bulan Juni 2024. Sedangkan akumulasi curah hujan minimum selama musim hujan 2023/2024 terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan (321 mm) dari minggu pertama bulan Februari sampai dengan minggu pertama bulan April 2024.

Suhu rata-rata tahunan Provinsi NTT 28,3° C, sedangkan suhu maksimum absolut 37,7° C terjadi di Kabupaten Sikka, dan suhu minimum absolut 8,4° C terjadi di Ruteng, Kabupaten Manggarai.

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdata per Semester I Tahun 2024 sebanyak 5.675.711 jiwa.

Jiika dilihat dari penyebaran penduduk per Kabupaten/Kota terhadap total penduduk Nusa Tenggara Timur, maka distribusi penduduk terbesar berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 477.808 disusul Kota Kupang sebanyak 455.502 jiwa, Kabupaten Kupang sebanyak 390.210 jiwa, Kabupaten Manggarai sebanyak 342.558 jiwa dan Kabupaten Sikka sebanyak 340.916 jiwa. Sedangkan Kabupaten dengan persentase jumlah penduduk terendah Tahun 2022, yakni Kabupaten Sumba Tengah dengan jumlah penduduk sebanyak 91.531jiwa, disusul Kabupaten Sabu Raijua sebanyak 96.313 jiwa dan Kabupaten Sumba Barat sebanyak 141.782 jiwa.

Sedangkan komposisi penduduk per jenis kelamin cukup berimbang, dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2.837.409 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 2.838.302 jiwa.

Secara rinci jumlah penduduk per Kabupaten/Kota Tahun 2024 dapat dilihat pada **tabel 1.1** berikut.

JUMLAH PENDUDUK - JENIS KELAMIN SEMESTER I TAHUN 2024					
NO	WILAYAH	KODE	PENDUDUK(LK)	PENDUDUK(PR)	PENDUDUK(JML)
	NUSA TENGGARA TIMUR	53	2,837,409	2,838,302	5,675,711
1	KUPANG	53.01	197,900	192,310	390,210
2	TIMOR TENGAH SELATAN	53.02	237,094	240,714	477,808
3	TIMOR TENGAH UTARA	53.03	136,915	137,189	274,104
4	BELU	53.04	115,381	116,071	231,452
5	ALOR	53.05	111,862	114,784	226,646
6	FLORES TIMUR	53.06	143,637	147,775	291,412
7	SIKKA	53.07	165,700	175,216	340,916
8	ENDE	53.08	137,766	144,701	282,467
9	NGADA	53.09	84,953	86,912	171,865
10	MANGGARAI	53.10	171,257	171,301	342,558
11	SUMBA TIMUR	53.11	138,065	131,663	269,728
12	SUMBA BARAT	53.12	72,414	69,368	141,782
13	LEMBATA	53.13	71,928	76,127	148,055
14	ROTE NDAO	53.14	76,776	75,837	152,613
15	MANGGARAI BARAT	53.15	142,206	140,737	282,943
16	NAGEKEO	53.16	81,715	83,383	165,098
17	SUMBA TENGAH	53.17	46,843	44,688	91,531
18	SUMBA BARAT DAYA	53.18	173,292	166,714	340,006
19	MANGGARAI TIMUR	53.19	151,509	146,458	297,967
20	SABU RAIJUA	53.20	49,157	47,156	96,313
21	MALAKA	53.21	101,034	103,701	204,735
22	KOTA KUPANG	53.71	230,005	225,497	455,502

Sumber : Dinas Kesehatan dan dukcapil Prov. NTT

d. Jumlah Kabupaten/Kota

Secara administrasi pemerintahan, sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1.6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode Data Wilayah Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2022, sampai dengan kondisi Bulan Desember Tahun 2024, Provinsi NTT terdiri dari 21 Kabupaten dan 1 Kota, 315 Kecamatan, 305 Kelurahan dan 3.137 Desa. Adapun Rincian wilayah administratif Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada **Tabel 1.2.** berikut:

Tabel. 1.2. Jumlah Desa, Kelurahan & Kecamatan Menurut Kabupaten/Kota di Prov. NTT Tahun 2024

No.	Kab/Kota	Desa	Kelurahan	Kecamatan	Luas wil. (km2)
1.	Sumba Barat	63	11	6	757,408
2.	Sumba Timur	140	16	22	6.984,014
3.	Kupang	160	17	24	5.136,510
4.	TTS	266	12	32	3.933,151
5.	TTU	182	11	24	2.623,200
6.	Belu	69	12	12	1.127,250
7.	Alor	158	17	18	2.928,559
8.	Lembata	144	7	9	1.268,105
9.	Flores Timur	229	21	19	1.748,517
10.	Sikka	181	13	21	1.671,649
11.	Ende	255	23	21	2.085,244
12.	Ngada	190	16	12	1.735,635
13.	Manggarai	145	26	12	1.343,834
14.	Rote Ndao	112	7	11	1.286,453
15.	Manggarai Barat	164	5	12	3.128,997



16.	Sumba Tengah	65	-	6	1.789,659
17.	Sumba Barat Daya	173	2	11	1.383,312
18.	Nagekeo	97	16	7	1.396,164
19.	Manggarai Timur	159	17	12	2.389,530
20.	Sabu Raijua	58	5	6	460,957
21.	Malaka	127	-	12	1.109,162
22.	Kota Kupang	-	51	6	159,334
	NTT	3.137	305	315	46.446,644

Sumber: *Keptendagri 100.1.1.6117*

Seiring dengan adanya aspirasi masyarakat dan perubahan paradigma pemerintahan yang menuntut peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyampaikan kepada Pemerintah Pusat usulan pemekaran 8 (delapan) Calon Daerah Persiapan (CDP) otonom baru yaitu, CDP Kabupaten Adonara di Kabupaten Flores Timur, CDP Kota Maumere di Kabupaten Sikka, CDP Kabupaten Pantar di Kabupaten Alor, CDP Kabupaten Amfoang di Kabupaten Kupang, CDP Kabupaten Amanatun di Kabupaten Timor Tengah Selatan serta CDP Kabupaten Pahunga Lodu, CDP Kabupaten Sumba Selatan dan CDP Kabupaten Sumba Timur Jaya di Kabupaten Sumba Timur. Sedangkan 1 (satu) CDP Otonom Baru Kabupaten Manggarai Barat Daya di KabupatenManggarai Barat, masih menunggu kelengkapan usulan dari Pemerintah Kabupaten.

Proses penetapan Calon daerah persiapan otonom baru yang telah diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, masih menunggu ditetapkannya peraturan pemerintahyang mengatur tentang penataan daerah dan desain besar penataan daerah sebagai amanat Pasal 55 dan Pasal 56 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, hingga saat ini terdapat beberapa usulan perubahan status Kelurahan menjadi desa dan terdapat beberapa pembentukan Desa di Provinsi NTT dengan status Desa Persiapan, dapat dilihat pada **Tabel 1.3** berikut:

No	Kabupaten	Usulan Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa	Desa Persiapan
1.	Timor Tengah Utara	-	11
2.	Ende	-	9
3.	Manggarai	-	52
4.	Ngada	1	-
5.	Sumba Timur	4	40
6.	Manggarai Barat	-	31
7.	Nagekeo	2	31
8.	Manggarai Timur	-	38
9.	Sumba Tengah	-	7

10	Rote Ndao	4	18
11.	Alor	-	15
12.	Sumba Barat Daya	-	77
13.	Belu	-	18
14.	Sumba Barat	-	22
15.	Timor Tengah Selatan	-	20
16.	Flores Timur	-	7
Jumlah		11	396

Sumber : Dinas PMD Provinsi NTT, 2024

Berdasarkan data di atas maka jumlah wilayah administratif di Provinsi NTT Tahun 2024 secara *de facto* terdiri dari 21 Kabupaten, 1 Kota Madya, 315 Kecamatan, 305 Kelurahan dan 3.137 Desa. Sedangkan secara *de jure*, terdiri dari 21 Kabupaten, 1 Kota Madya, 315 Kecamatan, 305 Kelurahan dan 3.533 Desa.

- e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, jumlah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 41 (empat puluh satu) Perangkat Daerah, dengan rincian, 7 (tujuh) Biro, 21 (sembilan belas) Dinas dan 9 (sembilan) Badan, ditambah Inspektorat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, RSUD Prof. DR W. Z. Johannes Kupang dan Sekretariat DPRD.dapat dilihat pada **Tabel 1.4** berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1.	Biro Pemerintahan	Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2023
2.	Biro Hukum	Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2023
3.	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2023
4.	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2023
5.	Biro Organisasi	Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2023
6.	Biro Administrasi Pimpinan	Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2023
7.	Biro Umum	Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2023
8.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2023
9.	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	Peraturan Gubernur Nomor



		96 Tahun 2023
10.	Badan Keuangan Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2023
11.	Badan Kepegawaian Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2023
12.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2023
13.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2023
14.	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2023
15.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2023
16.	Badan Penghubung Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2023
17.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2023
18.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2023
19.	Dinas Sosial	Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2023
20.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2023
21.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat. dan Desa	Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2023
22.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2023
23.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2023
24.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2023
25.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2023
26.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2023
27.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2023
28.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2023
29.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2023
30.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2023
31.	Dinas Peternakan	Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2023
32.	Dinas Perhubungan	Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2023
33.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2023
34.	Dinas Kesehatan	Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2023
35.	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2023
36.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2023
37.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2023
38.	Satuan Polisi Pamong Praja	Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2023
39.	RSUD Prof.DR.W.Z. Johannes Kupang	Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2023
40.	Sekretariat DPRD	Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2023
41.	Inspektorat Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2023



Perangkat Daerah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini ditunjang dengan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi NTT sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2019, terdiri dari 14 Cabang Dinas, 69 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan 518 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan Formal yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.

Sedangkan Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2024 sebanyak 12,640 orang, terdiri dari 6,364 PNS laki-laki dan 6,276 PNS Perempuan, dengan jabatan Struktural 541 orang, Fungsional Umum 5.104 orang dan Fungsional tertentu 6.995 orang.

- f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Tabel 1.5** berikut :

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN / FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN			TOTAL
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN	7	31	42	80
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	FUNGSI PENUNJANG	7	11	12	30
3	BADAN KEUANGAN DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN	13	7	44	64
4	BADAN PENANGGULANGAN BENDACANA DAERAH	FUNGSI PENUNJANG	2	10	29	41
5	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN	96	8	127	231
6	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN	5	9	19	33
7	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	URUSAN PEMERINTAHAN	5	30	41	76
8	BADAN PENGHUBUNG	URUSAN PEMERINTAHAN	5	0	24	29
9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,RISET DAN INOVASI DAERAH	FUNGSI PENUNJANG	9	24	70	103
10	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NTT	FUNGSI PENUNJANG	25	6	61	92
11	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI NTT	URUSAN PEMERINTAHAN	4	22	39	65
12	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTT	FUNGSI PENUNJANG	35	4	96	135
13	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARAGAH PROVINSI NTT	FUNGSI PENUNJANG	6	13	62	81
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI NTT	URUSAN PEMERINTAHAN	0	2	3	5
15	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT	FUNGSI PENUNJANG	18	60	136	214
16	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTT	FUNGSI PENUNJANG	10	50	63	123



17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NTT	URUSAN PEMERINTAHAN	7	12	39	58
18	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI NTT	URUSAN PEMERINTAHAN	1	12	22	35
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETUHANAN PROVINSI NTT	FUNGSI PENUNJANG	85	134	501	720
20	DINAS PARAWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NTT	URUSAN PEMERINTAHAN	9	10	59	78
21	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NTT	FUNGSI PENUNJANG	17	8	278	303
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	URUSAN PEMERINTAHAN	6	6	38	50
23	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB PROVINSI NTT	URUSAN PEMERINTAHAN	9	7	27	43
24	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROOVINSI NTT	URUSAN PEMERINTAHAN	1	7	44	52
25	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NTT	FUNGSI PENUNJANG	18	5549	1874	7441
26	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NTT	URUSAN PEMERINTAHAN	33	6	85	124
27	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NTT	FUNGSI PENUNJANG	8	10	46	64
28	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NTT	FUNGSI PENUNJANG	16	26	276	318
29	DINAS PETERNAKAN PROVINSI NTT	FUNGSI PENUNJANG	10	44	96	150
30	DINAS SOSIAL PROVINSI NTT	FUNGSI PENUNJANG	16	26	276	318
31	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NTT	FUNGSI PENUNJANG	6	46	36	88
32	RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG	URUSAN PEMERINTAHAN	10	715	323	1048
33	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	URUSAN PEMERINTAHAN	12	3	83	98
34	SEKERTARIAT DAERAH PROVINSI NTT	URUSAN PEMERINTAHAN	6	0	0	6
35	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	URUSAN PEMERINTAHAN	1	12	25	38
36	BIRO PEMERINTAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN	3	14	31	48
37	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	URUSAN PEMERINTAHAN	3	20	24	47
38	BIRO HUKUM	URUSAN PEMERINTAHAN	2	6	19	27
39	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	FUNGSI PENUNJANG	4	8	24	36
40	BIRO UMUM	URUSAN PEMERINTAHAN	3	13	75	91
41	BIRO ORGAGNISASI	URUSAN PEMERINTAHAN	3	8	18	29
42	SEKERTARIAT DPRD PROVINSI NTT	URUSAN PEMERINTAHAN	5	6	75	86

g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1) Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 setelah perubahan APBD ditargetkan sebesar Rp.4.997.139.773.941,00 dengan realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 4.834.529.894.805,18 atau 96,75% dari target yang ditetapkan.

Pendapatan Daerah ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Selengkapnya realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dijabarkan pada **Tabel 1.6** berikut :

NO	SUMBER PENDAPATAN		TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSEN (%)
1	2		3	4	5
I.	PENDAPATAN		4.997.139.773.941,00	4.834.529.894.805,18	96,75
	A.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.581.781.608.941,00	1.451.440.160.409,18	91,76
		1. Pajak Daerah	1.242.171.027.017,00	1.222.849.908.091,55	98,44
		2. Retribusi Daerah	60.567.956.055,00	27.140.019.369,17	44,81
		3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	37.064.277.605,00	31.749.907.192,00	85,66
		4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	241.978.348.264,00	169.700.325.756,46	70,13
	B.	Pendapatan Transfer	3.412.809.821.000,00	3.380.193.914.696,00	99,04
	C.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.548.344.000,00	2.895.819.700,00	113,64

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, 2025

a) Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.451.440.160.409,18 atau 91.76% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.581.781.608.941,00 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp. 1.222.849.908.091,55 atau 98,44% dari target sebesar Rp. 1.242.171.027.017,00.
- (2) Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp. 27.140.019.369,17.- atau 44,81% dari target sebesar Rp. 60.567.956.055,00.
- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp. 31.749.907.192,00 atau 85,66% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 37.064.277.605,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terealisasi Rp. 169.700.325.756,46 atau 70,13% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 241.978.348.264,00

b) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 Rp. 3.380.193.914.696,00 atau 99,04% dari target yang



ditetapkan sebesar Rp. 3.412.809.821.000,00

c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi sebesar Rp. 2.895.819.700,00 atau 113,64 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.548.344.000,00 yang seluruhnya bersumber dari pendapatan hibah.

2) Belanja Daerah

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.5.159.746.069.350,00 untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan total realisasi sebesar Rp. 4.734.101.913.931,31 atau 91,75% dari rencana yang ditetapkan setelah perubahan APBD, terdiri dari :

a) Belanja Operasi

Belanja operasi terealisasi sebesar Rp. 3.466.517.846.229,76 atau 93,07% dari rencana sebesar Rp. 3.724.779.972.557,00 meliputi:

- (1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 1.657.095.800.087,00 atau 96,79% dari rencana sebesar Rp. 1.712.018.697.618,00.
- (2) Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp. 1.187.827.023.656,76 atau 88,87% dari rencana sebesar Rp. 1.336.547.164.099,00.
- (3) Belanja Bunga terealisasi sebesar Rp. 57.260.225.861,00 atau 98,84% dari rencana sebesar Rp. 57.933.263.642,00.
- (4) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp. 534.704.400.625,00 atau 91,79% dari rencana sebesar Rp. 582.559.886.198,00
- (5) Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp. 29.630.396.000,00 atau 82,95% dari rencana sebesar Rp. 35.720.961.000,00.

b) Belanja Modal

Belanja Modal pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 533.793.185.721,55 atau 89,33% dari rencana sebesar Rp. 597.533.714.710,00. terdiri dari :

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp. 176.283.126.407,55 atau 97,22% dari rencana sebesar Rp. 181.316.183.435,00.
- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp. 216.584.489.838,00 atau 82,12% dari rencana sebesar Rp. 263.734.583.322,00.
- (3) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi terealisasi sebesar

Rp. 114.279.541.753,00 atau 92,50% dari rencana sebesar Rp. 123.540.702.726,00.

- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp. 26.646.027.723,00 atau 92,49% dari rencana sebesar Rp. 28.809.245.227,00.
- (5) Belanja Modal Aset Lainnya terealisasi sebesar Rp. 0 dari rencana sebesar Rp. 133.000.000,00.-

c) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 3.331.110.441,00 atau 7,26% dari rencana sebesar Rp. 45.890.056.001,00

d) Belanja Transfer

Belanja Transfer pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 730.459.771.539,00 atau 92,28% dari rencana sebesar Rp. 791.542.326.082,00 terdiri dari:

- (1) Belanja Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp. 724.153.525.994,00 atau 92,38% dari rencana sebesar Rp. 783.908.562.082,00
- (2) Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp. 6.306.245.545,00 atau 82,61% dari rencana sebesar Rp. 7.633.764.000,00

Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 1.7 berikut:

Tabel 1.7. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

NO	JENIS BELANJA		TARGET	REALISASI	
				Rp.	%
A	BELANJA OPERASI		3.724.779.972.557,00	3.466.517.846.229,76	93,07
	1.	Belanja Pegawai	1.712.018.697.618,00	1.657.095.800.087,00	96,79
	2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.336.547.164.099,00	1.187.827.023.656,76	88,87
	3.	Belanja Bunga	57.933.263.642,00	57.260.225.861,00	98,84
	4.	Belanja Hibah	582.559.886.198,00	534.704.400.625,00	91,79
	5.	Belanja Bantuan Sosial	35.720.961.000,00	29.630.396.000,00	82,95
B	BELANJA MODAL		597.533.714.710,00	533.793.185.721,55	89,33
	1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	181.316.183.435,00	176.283.126.407,55	97,22
	2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	263.734.583.322,00	216.584.489.838,00	82,12
	3.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	123.540.702.726,00	114.279.541.753,00	92,50



	4.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	28.809.245.227,00	26.646.027.723,00	92,49
	5.	Belanja Modal Aset Lainnya	133.000.000,00	-	-
C.	BELANJA TIDAK TERDUGA		791.542.326.082,00	730.459.771.539,00	92,28
D.	BELANJA TRANSFER		791.542.326.082,00	730.459.771.539,00	92,28
	1.	Belanja Bagi Hasil	783.908.562.082,00	724.153.525.994,00	92,38
	2.	Belanja Bantuan Keuangan	7.633.764.000,00	6.306.245.545,00	82,61
TOTAL BELANJA			5.159.746.069.350,00	4.734.101.913.931,31	91,75

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, 2025

3) Pembiayaan Daerah

Target dan realisasi pembiayaan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 325.855.543.843,94 atau 99,93% dari target sebesar Rp. 326.085.862.373,00 terdiri dari:

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp. 121.211.876.806,94 atau 100% dari yang ditargetkan sebesar Rp. 121.211.058.207,00.
- (2) Pencairan Dana Cadangan dengan realisasi sebesar Rp. 203.511.200.000,00 atau 100% dari target sebesar Rp. 203.511.200.000,00.
- (3) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah realisasi sebesar Rp. 1.132.467.037,00 atau 83,05% dari target sebesar Rp. 1.363.604.166,00.

b) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan tahun 2024 dengan realiasi sebesar Rp. 163.091.729.270,00 atau 99,76% dari yang ditargetkan Rp. 163.479.566.964,00, terdiri dari :

- (1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dengan realisasi sebesar Rp. 163.091.729.270,00 atau 99,76% dari target sebesar Rp. 163.479.566.964,00

Anggaran dan realisasi pembiayaan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 1.8 berikut:

Tabel 1.8. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024



NO	JENIS PEMBIAYAAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				Rp.	%
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		326.085.862.373	325.855.543.843,94	99,93
	1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran (SiLPA)	121.211.058.207	121.211.058.206,94	100
	2.	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	203.511.200.000	203.511.200.000,00	100
	3.	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman Daerah	1.363.604.166	1.132.467.037,00	83,05
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		163.479.566.964	163.091.729.270,00	99,76
	1.	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	163.479.566.964	163.091.729.270,00	99,76

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, 2025

- h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pedoman Umum Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 | 8 Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja dapat dilihat pada **Tabel 1.9** berikut:

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi belanja (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	a) Program Pengelolaan Pendidikan	881.879.215.065	855.902.148.774	97,04
		b) Program Pengembangan Kurikulum	765.194.600	611.813.250	79,96
		c) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	16.152.000	-	-
		d) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	290.000.000	272.527.400	93,97
		e) Program Pengembangan Kebudayaan	2.453,149.800	2.165.153.887	88,26
		f) Program Pengembangan Kesenian Tradisional	2.988.572.800	2.869.970.284	96,03
		g) Program Pembinaan Sejarah	145.480.000	140.408.646	96,51
		h) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1.544.238.000	1.509.672.500	97,76
		i) Program Pengelolaan Permusuman	4.700.640.100	4.611.946.010	98,60
2	Dinas Kesehatan	a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	134.607.571.703	127.978.655.144	95,08
		b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	18.898.460.100	13.025.804.565	68,93
		c) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	248.586.000	216.448.880	87,07
3	RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	71.541.562.428	41.842.326.283	58,49
		b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	400.000.000	231.173.740	57,79



No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi belanja (Rp)	%
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	a) Program Pendaftaran Penduduk	137.926.000	108.677.810	78,79
		b) Program Pencatatan Sipil	331.882.000	275.647.977	83,05
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	24.013.778.212	20.327.088.490	84,65
		b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.984.943.688	1.458.545.476	73,48
		c) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	489.881.500	328.308.840	67,02
		d) Program Penyelenggaraan Jalan	111.266.536.302	101.806.830.850	91,50
		e) Program Pengembangan Jasa Konstruksi	98.800.000	93.644.000	94,78
		f) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	404.187.500	384.568.099	95,15
		g) Program Pengembangan Perumahan	2.584.000.000	0	0
		h) Program Kawasan Permukiman	1.350.000.000	763.043.211	56,52
		i) Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	125.000.000	124.659.360	99,73
6	Satuan Polisi Pamong Praja	a) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	840.031.000	726.261.341	86,46
		b) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	7.000.000	7.000.000	100
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	a) Program Penanggulangan Bencana	1.233.524.400	1.153.721.045	93,53
8	Dinas Sosial	a) Program Pemberdayaan Sosial	1.542.150.000	1.406.103.000	91,18
		b) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	299.400.000	185.818.639	62,06
		c) Program Rehabilitasi Sosial	13.885.044.160	12.363.797.060	89,04
		d) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	17.359.347.000	16.148.586.674	93,03
		e) Program Penanganan Bencana	331.506.175	303.109.479	91,43
		f) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	204.000.000	170.041.780	83,35
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	49.562.000	42.614.217	85,98
		b) Program Perlindungan Perempuan	666.688.800	Rp.	
		c) Program Peningkatan Kualitas Keluarga	351.390.500	228.837.369	65,12
		d) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	43.269.000	40.768.000	94,22
		e) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	199.745.600	140.577.969	70,38
		f) Program Perlindungan Khusus Anak	134.222.000	133.872.850	99,73
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	a) Program Perencanaan Lingkungan Hidup	510.468.400	485.323.361	95,07
		b) Program Pengendalian Pencemaran dan / atau	740.854.120	578.644.756	78,11

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi belanja (Rp)	%
		Kerusakan Lingkungan Hidup			
		c) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	640.406.281	201.620.800	31,48
		d) Program Pengelolaan Hutan	17.673.642.042	14.992.895.120	91,95
		e) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistimnya	64.977.057	49.769.624	76,60
		f) Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	3.485.406.000	3.213.055.500	92,19
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	a) Program Penataan Desa	44.289.000	22.308.360	50,37
		b) Program Administrasi Pemerintahan Desa	62.135.000	32.234.000	51,88
		c) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.844.606.040	1.483.419.243	80,42
12	Dinas Perhubungan	a) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2.857.619.800	2.756.750.701	96,47
		b) Program Pengelolaan Pelayaran	5.003.344.200	2.843.775.853	56,84
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	a) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.172.000.000	1.165.662.000	99,46
		b) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	6.434.123.470	6.203.544.597	96,42
		c) Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	100.720.000	54.660.000	54,26
		d) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	100.000.000	53.928.000	53,92
14	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	a) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	300.000.000	289.757.400	96,59
		b) Program Program Penempatan Tenaga Kerja	451.202.000	240.123.000	53,22
		c) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	300.000.000	297.700.888	99,23
		d) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	700.000.000	689.841.570	98,55
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	a) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	974.029.772	728.344.860	74,78
		b) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	325.123.600	277.199.240	85,24
		c) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	9.133.494.300	6.954.199.430	79,14
		d) Program Pengembangan UMKM	235.697.000	235.440.500	99,89
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	a) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	560.000.000	523.025.100	93,39
		b) Program Promosi Penanaman Modal	85.000.000	19.951.250	23,47
		c) Program Pelayanan Penanaman Modal	387.154.470	324.997.855	83,94
		d) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.469.244.000	1.401.032.900	95,35
		e) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100.000.000	84.890.600	84,89

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi belanja (Rp)	%
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	a) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	6.270.000.000	4.838.715.540	77,17
		b) Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	17.028.755.398	15.000.253.271	88,09
		c) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	950.000.000	687.681.300	72,39
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	a) Program Pembinaan Perpustakaan	1.318.004.544	1.274.626.740	96,71
		b) Program Pengelolaan Arsip	148.000.000	83.414.000	56,36
		c) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	592.500.000	483.651.230	81,63
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	a) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.289.854.000	1.202.480.400	93,22
		b) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	24.312.040.020	23.845.716.057	98,08
		c) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.646.497.000	1.560.067.000	94,75
		d) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	866.919.000	616.284.533	71,08
		e) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	15.000.000	15.000.000	100
20	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	a) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	200.000.000	0	0
		b) Program Pemasaran Pariwisata	195.000.000	159.924.275	81,53
		c) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	375.000.000	354.922.527	94,40
		d) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.500.000.000	1.419.797.901	94,60
21	Dinas Peternakan	a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.739.772.709	1.563.088.882	89,94
		b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	230.552.000	198.136.105	85,94
		c) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	757.914.000	708.714.542	93,51
22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	a) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	196.150.000	0	0
		b) Program Penanganan Kerawanan Pangan	96.050.000	0	0
		c) Program Pengawasan Keamanan Pangan		Rp.	
		d) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.789.529.032	3.503.527.799	92,45
		e) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	10.019.549.850	8.837.344.473	88,20
		f) Program Pengendalian dan Penanggulangan Pertanian	221.000.000	117.182.100	53,02
		g) Program Penyuluhan Pertanian	648.657.150	472.963.900	72,91
23	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	a) Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	616.099.060	172.893.620	28,00
		b) Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	496.953.720	92.142.030	18,54
		c) Program Pengelolaan Energi Terbarukan	89.602.527.300	87.479.631.585	97,63
		d) Program Pengelolaan	800.317.100	64.656.230	8,08



No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi belanja (Rp)	%
		Ketenagalistrikan			
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	a) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	37.241.800	35.367.380	94,97
		b) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1.032.015.100	1.006.921.620	97,57
		c) Program Pengembangan Ekspor		Rp.	
		d) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	134.445.800	128.704.865	95,73
		e) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	149.099.800	137.056.980	91,92
		f) Program Perencanaan Pembangunan Industri	10.925.150.000	9.255.627.700	84,72
		g) Program Pengendalian Izin Usaha Industri	24.000.000	19/098/000	79,58
		h) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	24.100.000	24.026.000	99,69
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	a) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.657.413.826	1.093.097.779	65,95
		b) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.161.874.675	1.814.309.403	43,59
		c) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2.052.263.641	1.064.092.204	51,85
26	Inspektorat Daerah	a) Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal	5.323.686.988	4.964.935.590	93,26
		b) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.735.142.068	2.276.060.143	83,22
27	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	a) Program Pengelolaan Perbatasan	1.485.150.000	1.189.065.704	80,06
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.452.950.010	2.249.093.640	91,69
		b) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	353.583.374.600	306.885.357.280	86,79
		c) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	209.474.000	105.440.150	50,34
		d) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	379.586.000	312.313.500	82,28
		e) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.045.367.000	933.775.200	89,33
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	a) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.004.184.000	4.759.859.528	67,96
30	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	a) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	76.695.478.571	57.014.364.847	74,73
31	Badan Penghubung Daerah	a) Program Pelayanan Penghubung	1.079.006.000	1.007.884.844	93,41
32	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	a) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.230.950.000	1.967.984.790	60,91
		b) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	15.032.905.200	13.952.883.996	92,82
33	Badan Kepegawaian Daerah	a) Program Kepegawaian Daerah	3.588.756.565	3.222.089.828	89,78

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi belanja (Rp)	%
34	Badan Keuangan Daerah	a) Program Pengelolaan Keuangan Daerah	918.252.191.453	752.483.856.689	81,94
35	Biro Umum	Program Penunjang	48.427.984.952	40.482.160.362	83,58
36	Biro Pemerintahan	a) Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	838.321.600	598.887.430	94,63
		b) Program Kesejahteraan Rakyat	9.306.922.400	7.554.054.245	81,17
37	Biro Administrasi Pimpinan	Program Penunjang	3.574.042.720	3.540.002.864	99,05
38	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	6.056.758.512	5.902.044.075	97,45
39	Biro Hukum	Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	259.513.000	245.534.500	94,61
40	Biro Organisasi	Program Penataan Organisasi	125.700.000	118.219.793	94,58
41	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	a) Program Perekonomian dan Pembangunan	959.600.000	773.715.990	80,63
		b) Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	213.735.424	212.896.380	99,61

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 telah berakhir pada tahun 2023, sehingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menyusun dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023, sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RKPd Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang tujuannya untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah dan dalam rangka memastikan RPJPD Tahun 2005-2025 dilaksanakan terutama dalam pencapaian sasaran pokok dan arah kebijakan daerah tahap terakhir.



Berdasarkan hal-hal di atas, untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan telah disusun RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 yang digunakan sebagai acuan perencanaan pembangunan di Provinsi NTT.

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan data kondisi umum perkembangan pembangunan Provinsi NTT, pembangunan Nasional dan perkembangan global serta sesuai hasil Evaluasi P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, pada bagian ini disampaikan data dan analisis atas permasalahan-permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis.

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara harapan dengan realisasi tujuan pembangunan yang dicapai dalam kurun waktu lima tahun (Tahun 2018-2023) yang terkandung dalam indikator-indikator kinerja pembangunan. Tidak tercapainya tujuan ini disebabkan karena rendahnya kapasitas kelembagaan, keuangan dan pengaruh faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diantisipasi serta sulit dikendalikan seperti adanya pandemi Covid19, Badai Seroja, Krisis Ekonomi dan Perang Rusia-Ukraina. Selain faktor-faktor eksternal tersebut juga terdapat faktor internal yang berkaitan dengan kondisi geografis NTT yang berbeda dengan daerah lainnya yang ada di Indonesia. Kondisi geografis dan topografis Nusa Tenggara Timur, terutama kondisi-kondisi yang meliputi iklim, topografi, jenis dan kualitas tanah, hutan dan vegetasi, serta kondisi perairan dan keanakeragaman hayati yang sangat mempengaruhi aktivitas penduduk.

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berciri kepulauan yang mempunyai 609 Pulau dengan kondisi topografis yang kurang menguntungkan. Dengan kondisi tersebut, NTT masih menghadapi berbagai keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan dasar, sarana dan prasarana transportasi laut dan udara, biaya transportasi yang mahal dalam rangka pelayanan pemerintahan, terbatasnya aksesibilitas masyarakat secara umum, dan masih adanya wilayah yang terisolasi secara fisik dan sosial pada musim-musim tertentu.

Tabel 1.10
Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya SDM	Akses terhadap pendidikan menengah rendah	- Masih rendahnya anak usia sekolah yang bersekolah - Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan di wilayah terpencil - Belum meratanya penyebaran guru antar wilayah - Sebaran sekolah yang tidak merata
Rendahnya Umur Harapan Hidup	Akses terhadap layanan kesehatan rendah	- Masih tingginya Angka Kematian Ibu - Masih Tingginya Angka kematian bayi - Masih tingginya angka kematian balita - Rendahnya derajat kesehatan - Belum meratanya tenaga kesehatan - Terbatasnya sarana dan Prasarana Kesehatan - Tingginya kasus gizi buruk - Tingginya angka Stunting - Jangkauan Jamkesmas yang belum merata
Kemiskinan	Masih rendahnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan sosial	- Masih rendahnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan layanan rehabilitasi - Masih rendahnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan sosial
	Pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat miskin belum optimal	Lembaga pemberdayaan masyarakat, PKK dan Posyandu di tingkat desa belum optimal
	Rendahnya Indeks Ketahanan Pangan	- Sebaran Produksi yang tidak merata - ketersediaan pangan dan akses terhadap sumber pangan yang tidak merata - masih rendahnya SDM petani
	Angka Konsumsi ikan per kapita yang rendah	- belum optimalnya produksi perikanan budidaya RPD Provinsi NTT TAHUN 2024-2026 - cakupan binaan terhadap kelompok nelayan miskin dan rentan miskin yang belum optimal
	Rendahnya Indeks Ketahanan Pangan	- Sebaran Produksi yang tidak merata - ketersediaan pangan dan akses terhadap sumber pangan yang tidak merata
	Rendahnya pendapatan Masyarakat miskin	- Tingkat produktifitas masyarakat yang rendah. - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang terus meningkat
	Masih rendahnya Usia Harapan Hidup	- Rendahnya asupan pangan dan gizi seimbang - Belum terpenuhinya jumlah, kualitas dan sebaran tenaga kesehatan - Tingginya kasus gizi buruk dan gizi kurang - Rendahnya akses dan mutu pelayanan kesehatan - Rendahnya derajat kesehatan - Rendahnya akses air minum dan sanitasi yang layak - Terbatasnya sarana dan Prasarana Kesehatan - Rendahnya kesejahteraan masyarakat
	Rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah	- Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan di wilayah terpencil - Belum meratanya penyebaran guru antar wilayah



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Kurangnya Guru yang berkualitas (sertifikasi)
	Rendahnya angka Harapan Lama Sekolah	Keadaan Geografis: Ketimpangan pembangunan pendidikan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain sangat terlihat sekali, baik secara fisik maupun non fisik
Pembangunan Gender, Equality, Disabilitas dan Sosial Inklusi (GEDSI) belum optima	Rendahnya Pemahaman terkait Pembangunan Gender, Equality, Disabilitas dan Sosial Inklusi (GEDSI)	- Belum optimalnya pengarusutamaan GEDSI di level kebijakan dan regulasi - Belum optimalnya pemenuhan hak anak, disabilitas dan Inklusis sosial lainnya - Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta belum kuatnya sinergi layanan untuk penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan - Masih rendahnya kualitas sumber daya kaum perempuan
	Belum optimalnya Penerapan sistim Akuntabilitas Kinerja	- Sebagian besar perangkat daerah belum memperbaiki rumusan tujuan dan sasaran strategis yang berorientasi hasil yang tertuang dalam renstra perangkat daerah - Kinerja sebagai perangkat daerah belum sepenuhnya belum beroreksi pada hasil (outcome) dan indikator kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria terukur (measurable), relevan dan cukup - Penjabaran sasaran strategis dan indikator kinerja telah dilakukan sampai ke level organisasi terendah walaupun belum merata sampai diseluruh perangkat daerah dan penjabarnya belum sepenuhnya di sadarkan kinerja organisasi dan kinerja level di atasnya. - Kualitas evaluasi program yang dilakukan oleh penanggungjawab program belum mampu memperbaiki kualitas pelaksanaan maupun hasoil program terutama untuk program antara perangkat daerah - Analisis capaian kinerja belum di ungkapan secara mendalam pada laporan kinerja. - Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belkum sepenuhnya menggambarkan kondisi penerapan SAKIP di level Perangkat Daerah
INFRASTRUKTUR	Rendahnya ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur	- Kurangnya air minum yang layak dan sanitasi yang bersih - Belum optimalnya konektivitas wilayah melalui pengembangan infrastruktur jalan dan SDA untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat - Fasilitas umum belum ramah GEDSI - Keadaan Geografis : Ketimpangan pembangunan pendidikan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain sangat terlihat sekali, baik secara fisik maupun non fisik - Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan di wilayah terpenci
	Terbatasnya akses terhadap rumah layak huni	- masih rendahnya persentasi rumah dengan sanitasi dan air minum yang layak - masih adanya lingkungan kumuh - Masih rendahnya akses masyarakat terhadap sambungan listrik rumah
	Energi	rendahnya Rasio elektrifikasi dari EBT dan non EBT di masyarakat tidak mampu dan terpencil

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum Optimalnya Implementasi Perencanaan Tata Ruang dan Pembangunan Rendah Karbon	• Cakupan penyimpangan terhadap RUTR dan RDTR pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota masih tinggi • Belum optimalnya pengendalian terhadap pemanfaatan ruang (fungsi, struktur dan pola ruang) • Rusaknya sistem ekologi mulai dari hutan hingga pencemaran air • Meningkatnya emisi gas rumah kaca yang didominasi oleh sektor energy dan transportasi • Kurang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dapat memperparah rusaknya ekosistem
	Jalan, jembatan dan SDA	• Jaringan jalan Provinsi yang belum merata dikerjakan, serta ruas jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat yang masih tinggi; • Masih ada ketimpangan pembangunan jalan antar kawasan di wilayah Timor, Sumba dan Manggarai Timur, sehingga tingkat mobilitas antar wilayah terbatas, terutama di daerah yang terisolasi. • Sebagian besar jalan kewenangan provinsi belum di sertifikasi kepemilikan lahan. • Belum optimalnya pemanfaatan jaringan irigasi Provinsi; • Masih kurangnya proporsi antara kebutuhan air baku dan ketersediaan air baku.
	Perhubungan	• Terbatasnya akses sarana dan prasarana (sarpras) transportasi di perdesaan, wilayah perbatasan, dan tempat wisata; • Belum optimalnya ketersediaan fasilitas pelabuhan darat, laut dan udara untuk menjamin konektivitas antar-wilayah; • Belum optimalnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi; • Tingginya kerusakan prasarana jalan akibat muatan lebih kendaraan, karena jembatan timbang tidak beroperasi; • Belum adanya sarana angkutan antar-moda transportasi yang terintegrasi; • Rendahnya kualitas layanan sarana angkutan umum (transportasi publik); • Meningkatnya angka kecelakaan dan kecelakaan yang menyebabkan kematian; • Tingginya permintaan ijin trayek angkutan antar jemput, angkutan sewa dan taksi online; • Aktivitas transportasi berpotensi mencemarkan lingkungan dan konflik sosial (masalah tanah); • Adanya praktik percaloan tarif penumpang/barang.
	Perbatasan	• Belum terselesaikannya PLBN
	Bencana	• Belum optimalnya penerapan SPM Sub Urusan Bencana • Meningkatnya risiko bencana akibat belum optimalnya pencegahan dan kesiapsiagaan/Sistem Peringatan Dini Bencana (Early Warning System) terhadap bencana
Belum optimalnya	Produksi dan Produktivitas	• Pola pertanian masih subsisten

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
pengelolaan sektorsektor produksi untuk meningkatkan perekonomian daerah	pertanian masih rendah	- SDM pertanian masih rendah - Penggunaan teknologi, sarana dan prasarana pertanian masih rendah - Infrastruktur pendukung kurang memadai - Kondisi dan perubahan iklim tidak menentu - Kurang optimalnya pemanfaatan lahan - Akses permodalan masih terbatas - Belum optimalnya Pengelolaan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Belum optimalnya penciptaan nilai tambah	Belum berkembangnya industri pengolahan	- Rendahnya SDM - Rendahnya akses permodalan - Belum optimalnya manajemen pengelolaan - Terbatasnya ketersediaan dan kontinuitas bahan baku - Rendahnya dukungan teknologi pengolahan
	Rendahnya produktivitas tenaga kerja	- Tingkat pendidikan tenaga kerja masih rendah - Tingkat keterampilan tenaga kerja masih rendah
	Tenaga kerja tidak dibayar	Rendahnya pengawasan ketenagakerjaan
Belum optimalnya kegiatan distribusi dan pemasaran	Peran Lembaga Ekonomi dalam mengumpulkan dan mendistribusikan komoditi dan produk	Belum optimalnya ketersediaan dan peran lembaga ekonomi masyarakat
	Ketersediaan dan kontinuitas produk	- Kurangnya akses pada informasi pasar - Belum optimalnya pemasaran digital
Rendahnya kemandirian Fiskal	Tingginya ketergantungan fiskal	- Belum optimalnya pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah - Belum optimalnya pemanfaatan aset Daerah - Belum optimalnya pemanfaatan potensi – potensi pendapatan - Rendahnya Pola Investasi dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah

b. Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025

Berdasarkan isu strategis dan kondisi daerah saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025 adalah : **“Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”** Adapun visi ini bermaksud memberdayakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki Nusa Tenggara Timur untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan pembangunan jangka panjang atas dasar amanat pembangunan menurut Pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai visi di atas, yang memuat tujuan pembangunan yang sarat dengan makna, maka misi pembangunan merupakan usaha konkret interpretasi untuk mewujudkan visi pembangunan yang masih umum dan abstrak, maka disusunlah misi pembangunan NTT selama periode tersebut sebagai berikut:



- 1) **Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila**, dapat dilaksanakan melalui agenda :
 - a) Mengupayakan citra penguatan dan penegasan jati diri.
 - b) Meningkatkan kualitas manusia NTT yang berbudi-pekerti terpuji.
 - c) Mempertahankan keberadaan dan keragaman budaya baik dalam bentuk nilai dan norma maupun dalam perilaku, sifat religiositas, serta mampu menerima, menghargai dan mengelola keragaman sebagai kekuatan persatuan dan kesatuan baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.
 - d) Menghindari dan mencegah benturan dan friksi antar golongan, sebaliknya meningkatkan persatuan dan solidaritas dengan memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan wilayah.
 - e) Meningkatkan etos kerja yang bermoral baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.
- 2) **Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global**, dilakukan melalui agenda:
 - a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan di segala bidang yang maju, mandiri, adil, merata dan setara.
 - b) Meningkatkan implementasi karya pembangunan yang berpihak kepada kaum pinggiran (marginal) sebagai sarana utama pemerataan politik pembangunan.
 - c) Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
 - d) Meningkatkan mutu, relevansi dan keunggulan pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
 - e) Meningkatkan manajemen pembangunan sumberdaya manusia secara transparan dan akuntabel.
 - f) Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pola pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
 - g) Meningkatkan jaringan interaksi, interelasi dan interkoneksi ekonomi wilayah.
- 3) **Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum**, dapat dilaksanakan dengan agenda :

- a) Membangun masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum melalui proses karakterisasi dan institusionalisasi dalam segala lingkup baik secara kelembagaan maupun secara individu sebagai warga masyarakat.
 - b) Mengusahakan agar semua atau setiap anggota masyarakat memiliki kedudukan yang sama dalam bidang politik dan hukum.
 - c) Memantapkan fungsi desentralisasi dan otonomi daerah.
 - d) Meningkatkan kebebasan pers yang bertanggungjawab.
 - e) Meningkatkan kualitas aparatur melalui peningkatan kompetensi, kinerja, etos kerja, reformasi struktur birokrasi yang efektif dan efisien untuk layanan prima kepada masyarakat.
- 4) **Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan,** dapat dilakukan melalui agenda :
- a) Mempertahankan dan meningkatkan pengolahan dan pengelolaan semua modal pembangunan sumber daya manusia (SDM), ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan serta lingkungan untuk memperoleh ketahanan dalam berbagai bidang dan dimensi kehidupan masyarakat yang berharkat dan bermartabat.
 - b) Menumbuh kembangkan jiwa wirausaha pada masyarakat NTT.
 - c) Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan potensi daerah yang spesifik.
- 5) **Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan,** dapat dilakukan melalui agenda :
- a) Meningkatkan kemajuan, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan yang berkelanjutan, merata, serasi dan lestari.
 - b) Mencegah kerusakan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan.
 - c) Mengadakan penghijauan yang bertahap dan berkesinambungan.
 - d) Meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap alam dan lingkungan.
 - e) Meningkatkan lingkungan sosial yang tertib, nyaman dan damai.

6) **Mewujudkan posisi dan peran Nusa Tenggara Timur dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat**, dapat dilakukan melalui agenda:

- a) Memposisikan peran wilayah NTT sebagai pemimpin, konsultan, defender/pembela, transmiter/penyebar, katalisator dan dinamisator (penggerak interaksi) antar masyarakat dan antar (daerah) serta antar negara demi memperlancar dan memaknai interaksi dan perbedaan dalam usaha mencapai keuntungan bersama sebagai bagian dari solusi masalah dalam berbagai dimensinya.
- b) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih proaktif di dalam menangkap berbagai peluang lokal, nasional dan internasional, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara kelompok maupun individu.

7) **Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim**, dapat dilakukan melalui agenda :

- a) Memantapkan habitus (kebiasaan), tata ruang dan pola hidup kepulauan serta membimbing masyarakat untuk terbiasa dengan cara hidup antar pulau di kawasan NTT.
- b) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan memanfaatkan potensi laut yang bersentuhan langsung dengan upaya pengembangan hidup masyarakat setiap hari dan pariwisata
- c) Meningkatkan budaya bahari dalam diri anak-anak dan kaum muda.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi NTT Tahun 2024-2026, maka perumusan program pembangunan daerah harus mengakomodir program – program strategis Daerah yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dengan memperhatikan keterkaitan antar bidang urusan pemerintah daerah, status Evaluasi P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, pencapaian SDGs dan SPM maka di dalam merangkai program – program yang menjadi prioritas daerah juga merujuk pada penelaahan hasil dari Bab II,III,IV dan V, sehingga menghasilkan pemilihan program- program prioritas yang dapat dipedomani oleh Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen turunan selanjutnya. Selain itu juga, dengan memperhatikan aspek regulasi dan

kebijakan yang berlaku dari pusat sampai daerah, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan beberapa program unggulan/prioritas berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan periode Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

- 1) Misi pertama : Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial, yakni:
 - (1) Program pengelolaan kelautan Pesisir dan pulau-pulau kecil
 - (2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - (3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - (4) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
 - (5) Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
 - (6) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
 - (7) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - (8) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - (9) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - (10) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - (11) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - (12) Program Penyuluhan Pertanian
 - (13) Program pendidikan dan pelatihan. Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan
 - (14) Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
 - (15) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
 - (16) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - (17) Program Pemasaran Pariwisata
 - (18) Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
 - (19) Program Pengembangan Ekspor
 - (20) Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 - (21) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
 - (22) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - (23) Program Penempatan Tenaga Kerja
 - (24) Program Hubungan Industrial
 - (25) Program Pengawasan Ketenagakerjaan
 - (26) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 - (27) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

- (28) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
- (29) Program pemberdayaan usaha menengah. Usaha kecil. Dan usaha mikro (umkm)
- (30) Program Pengembangan UMKM
- (31) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
- (32) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
- (33) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
- (34) Program Pengembangan Perumahan
- (35) Program Kawasan Permukiman
- (36) Program peningkatan prasarana. Sarana dan utilitas umum (PSU)
- (37) Program Pemberdayaan Sosial
- (38) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
- (39) Program Rehabilitasi Sosial
- (40) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
- (41) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- (42) Program Pengelolaan Energi Terbarukan
- (43) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
- (44) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
- (45) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- (46) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- (47) Program Penataan Desa
- (48) Program Administrasi Pemerintahan Desa
- (49) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
- (50) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- (51) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- (52) Program Promosi Penanaman Modal
- (53) Program Pelayanan Penanaman Modal
- (54) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- (55) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- (56) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- (57) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

- (58) Program Perlindungan Perempuan
- (59) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- (60) Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
- (61) Program Pemenuhan Hak Anak
- (62) Program Perlindungan Khusus Anak
- (63) Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)
- (64) Program Pengembangan UMKM
- (65) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- (66) Program Penanganan Kerawanan Pangan
- (67) Program Pengawasan Keamanan Pangan

2) **Misi kedua : Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing**

- (1) Program Pengelolaan Pendidikan
- (2) Program Pengembangan Kurikulum
- (3) Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
- (4) Program Pengendalian Dan Perizinan Pendidikan
- (5) Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
- (6) Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
- (7) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
- (8) Program Pengembangan Kebudayaan
- (9) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- (10) Program Pembinaan Sejarah
- (11) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
- (12) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
- (13) Program Pembinaan Perpustakaan
- (14) Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
- (15) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- (16) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- (17) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- (18) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- (19) Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan Makanan Dan Minuman
- (20) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

- (21) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 3) Misi ketiga : **Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup, kewilayahan dan Mitigasi Bencana**
- (1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - (2) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - (3) Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
 - (4) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - (5) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
 - (6) Program Pengembangan Permukiman
 - (7) Program Penataan Bangunan Gedung
 - (8) Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
 - (9) Program Penyelenggaraan Jalan
 - (10) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 - (11) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - (12) Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
 - (13) Program Penetapan Tanah Ulayat
 - (14) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - (15) Program Pengelolaan Pelayaran
 - (16) Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
 - (17) Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara
 - (18) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - (19) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - (20) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
 - (21) Program Pengelolaan Hutan
 - (22) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
 - (23) Program pendidikan dan pelatihan. Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan
 - (24) Program Penanggulangan Bencana
 - (25) Program pencegahan Penanggulangan. Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
 - (26) Program Penanganan Bencana

4) Misi keempat: **Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**

- (1) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
- (2) Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
- (3) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- (4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- (5) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
- (6) Program Pengelolaan Arsip
- (7) Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
- (8) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- (9) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- (10) Program Penataan Organisasi
- (11) Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
- (12) Program Kesejahteraan Rakyat
- (13) Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum
- (14) Program Perekonomian Dan Pembangunan
- (15) Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa
- (16) Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
- (17) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
- (18) Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- (19) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- (20) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- (21) Program Kepegawaian Daerah
- (22) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- (23) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
- (24) Program Pengelolaan Perbatasan
- (25) Program Pelayanan Penghubung
- (26) Program Penyelenggaraan Pengawasan
- (27) Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi
- (28) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
- (29) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

- (30) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- (31) Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya
- (32) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

d. Kegiatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.

Kegiatan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Program sebagai berikut :
 - a) Program Pengelolaan Pendidikan
 - (1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
 - (2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
 - (3) Pengelolaan Pendidikan Khusus
 - b) Program Pengembangan Kurikulum, dengan kegiatan
 - (1) Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
 - c) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan kegiatan
 - (1) Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi
 - d) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan dengan Kegiatan
 - (1) Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
 - e) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra dengan kegiatan
 - (1) Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - f) Program Pengembangan Kebudayaan, meliputi kegiatan :
 - (1) Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - (2) Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi

- g) Program Pengembangan Kesenian Tradisional dengan kegiatan :
 - (1) Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- h) Program Pembinaan Sejarah dengan kegiatan :
 - (1) Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi
- i) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, yang meliputi kegiatan :
 - (1) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
 - (2) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
- 2) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Program kegiatan sebagai berikut:
 - a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - (1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi.
 - (2) Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi.
 - (3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
 - (4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
 - b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan kegiatan :
 - (1) Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi.
 - (2) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
 - c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dengan kegiatan :
 - (1) Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
 - (2) Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
 - d) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan kegiatan :
 - (1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

- 3) RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, dengan Program sebagai berikut :
- a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
 - (1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
 - (2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
 - (3) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
 - b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan kegiatan :
 - (1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
- 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Program dan Kegiatan :
- a) Program Pendaftaran Penduduk :
 - (1) Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
 - b) Program Pencatatan Sipil dengan kegiatan :
 - (1) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi
 - (2) Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
- 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan Program dan Kegiatan Sebagai berikut :
- a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - (1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
 - (2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1.000 ha - 3.000 ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - (1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

- c) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
 - (1) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- d) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - (1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
- e) Program Pengembangan Permukiman
 - (1) Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
- e) Program Penataan Bangunan Gedung
 - (1) Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
- f) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
 - (1) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- g) Program Penyelenggaraan Jalan
 - (1) Penyelenggaraan Jalan Provinsi
- h) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 - (1) Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
 - (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
- i) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - (1) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
 - (2) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
 - (3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
 - (4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
- j) Program Pengembangan Perumahan
 - (1) Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
 - (2) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
- k) Program Kawasan Permukiman
 - (1) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

- (2) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
- i) Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 - (1) Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
- 6) Satuan Polisi Pamong Praja, dengan Program dan Kegiatan Sebagai berikut:
 - a) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - (1) Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - (2) Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
 - (3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
 - b) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan kegiatan:
 - (1) Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
- 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut :
 - a) Program Penanggulangan Bencana
 - (1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
 - (2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - (3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - (4) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
- 8) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut :
 - a) Program Pemberdayaan Sosial
 - (1) Penerbitan izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - (2) Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi

- b) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, dengan kegiatan :
 - (1) Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi Untuk Dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
 - c) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - (1) Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang tua Tunggal
 - (2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
 - d) Program Penanganan Bencana dengan kegiatan :
 - (1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
 - e) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan kegiatan :
 - (1) Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi.
- 9) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :
- a) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - (1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
 - b) Program Perlindungan Perempuan
 - (1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - (2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
 - c) Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan kegiatan :
 - (1) Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Kewenangan Provinsi

- d) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan kegiatan :
 - (1) Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
 - e) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - (1) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerinta, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi.
 - f) Program Perlindungan Khusus Anak
 - (1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 10) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :
- a) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - (1) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
 - b) Program Pengelolaan Hutan
 - (1) Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
 - (2) Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
 - (3) Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun
 - c) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistimnya dengan kegiatan :
 - (1) Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk kewenangan Daerah Provinsi
 - d) Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan dengan kegiatan :
 - (1) Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

- a) Program Penataan Desa dengan kegiatan :
 - (1) Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
- b) Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan kegiatan :
 - (1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- c) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan kegiatan :
 - (1) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota

12) Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur

- a) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - (1) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
 - (2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
 - (3) Pengelolaan Terminal Tipe B
 - (4) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
 - (5) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Provinsi
 - (6) Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
 - (7) Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/ Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - (8) Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - (9) Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- (10) Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek Antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- b) Program Pengelolaan Pelayaran
 - (1) Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Wilayah dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Daerah Provinsi
 - (2) Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Wilayah dan yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi dan Pelabuhan Internasional
 - (3) Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Yang Terletak Pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
 - (4) Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
 - (5) Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi
 - (6) Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
 - (7) Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
 - (8) Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - (9) Penerbitan Izin Usaha Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional
 - (10) Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional

- (11) Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
 - (12) Penerbitan Izin Pekerja Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
 - (13) Penerbitan izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
 - (14) Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/ DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional
- 13) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur
- a) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan kegiatan
 - (1) Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
 - (2) Pengelolaan E – Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
 - b) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - (1) Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
 - c) Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial dengan kegiatan
 - (1) Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Lingkup Daerah Provinsi
 - d) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.
 - (1) Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
- 14) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT.
- a) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - (1) Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
 - (2) Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah
 - b) Program Program Penempatan Tenaga Kerja
 - (1) Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/ Kota
 - (2) Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

- (3) Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi
- c) Program Hubungan Industrial
 - (1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Yang Mempunyai Wilayah Kerja Lebih dari 1 (satu) Kabupaten/ Kota
 - (2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
 - (3) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral kabupaten/ Kota (UMSK)
- d) Program Pengawasan Ketenagakerjaan dengan kegiatan :
 - (1) Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
- e) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi dengan kegiatan:
 - (1) Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
- f) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan kegiatan :
 - (1) Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal Dari Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- g) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan kegiatan :
 - (1) Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Pemantapan
- 15) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur
 - (a) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan kegiatan :
 - (1) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - (2) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- (b) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
 - (1) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi Yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - (c) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dengan kegiatan :
 - (1) Pemberdayaan Usaha Kecil yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
 - (d) Program Pengembangan UMKM
 - (1) Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
- 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur
- a) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan kegiatan :
 - (1) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi
 - (2) Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
 - b) Program Promosi Penanaman Modal dengan kegiatan :
 - (1) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
 - c) Program Pelayanan Penanaman Modal dengan kegiatan :
 - (1) Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan Perundangan-Undangan menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
 - d) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan kegiatan
 - (1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
 - e) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan kegiatan :
 - (1) Urusan Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dannon Perizinan Penanaman Modal Yang Terintegrasipada Tingkat Daerah Provinsi

- 17) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur
- a) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan kegiatan :
 - (1) Penyadaran, Pemberdayaan, Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
 - b) Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan dengan kegiatan :
 - (1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
 - (2) Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasitingkat Nasional
 - (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
 - c) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan kegiatan :
 - (1) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
- 18) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur
- a) Program Pembinaan Perpustakaan
 - (1) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
 - (2) Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
 - b) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno dengan kegiatan :
 - (1) Pelestarian Karya Cetak edan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi
 - (2) Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah
 - (3) Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi
 - c) Program Pengelolaan Arsip
 - (1) Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
 - (2) Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
 - (3) Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Kerarsipan Nasional Tingkat Provinsi
 - d) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
 - (1) Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
 - (2) Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang Digabung dan/ atau dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kabupaten/ Kota

- (3) Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi
- (4) Pencarian Arsip Statis Provinsi Yang Dinyatakan Hilang
- 19) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur
 - a) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - (1) Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil Di Luar Minyak Dan Gas Bumi
 - (2) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
 - b) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - (1) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
 - (2) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - (3) Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 Gt Di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - (4) Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
 - c) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan kegiatan
 - (1) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
 - (2) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat
 - d) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan kegiatan
 - (1) pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil
 - e) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan kegiatan :
 - (1) Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar
- 20) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur
 - a) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - (1) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

- (2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
- (3) Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/ Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- b) Program Pemasaran Pariwisata dengan kegiatan
 - (1) Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
- c) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
 - (1) Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kota Kreatif
 - (2) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
- d) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - (1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
 - (2) Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

21) Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur

- a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan kegiatan
 - (1) Peningkatan Ketersediaan Dan Mutu Benih/Bibit ternak Dan Tanaman Pakan Ternak, Serta Pakan Kewenangan Provinsi
- b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan kegiatan
 - (1) Penataan Prasarana Pertanian
- c) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - (1) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - (2) Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
 - (3) Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikas zona/ Kompartemen Bebas Penyakit Dan Unit Usaha produk Hewan

22) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

- a) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan kegiatan
 - (1) Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
 - (2) Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi
- b) Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan kegiatan :
 - (1) Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi
 - (2) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
- c) Program Pengawasan Keamanan Pangan
 - (1) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota
- e) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - (1) Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
 - (2) Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran BenihTanaman
- f) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan kegiatan
 - (1) Penataan Prasarana Pertanian
- g) Program Penyuluhan Pertanian dengan kegiatan
 - (1) Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

23) Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur

- a) Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
 - (1) Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekunganair Tanah Dalam Daerah Provinsi
- b) Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
 - (1) Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
 - (2) Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan

- c) Program Pengelolaan Energi Terbarukan
 - (1) Pelaksanaan Konservasi Energi Pada Sarana dan Prasarana Yang Dikelola Oleh Perangkat Daerah Yang Membidangi Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
 - d) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dengan kegiatan
 - (1) Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil Dan Perdesaan
- 24) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
- a) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan kegiatan
 - (1) Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)
 - b) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
 - (1) Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Daerah Provinsi
 - (2) Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan
 - c) Program Pengembangan Ekspor dengan kegiatan
 - (1) Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
 - d) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
 - (1) Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
 - (2) Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa Di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
 - e) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 - (1) Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - f) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - (1) Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi

- g) Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan kegiatan
 - (1) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
 - h) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, dengan kegiatan
 - (1) Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
- 25) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan program :
- a) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - (1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - (2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - (3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - (1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - (2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - (3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - c) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
 - (1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 - (2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - (3) Pengembangan Inovasi dan Teknologi
- 26) Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- a) Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - (1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - (2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

- b) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
 - (1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - (2) Pendampingan dan Asistensi
- 27) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
 - a) Program Pengelolaan Perbatasan
 - (1) Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama
 - (2) Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan
 - (3) Monitoring dan Evaluasi
- 28) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur
 - a) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan kegiatan
 - (1) Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
 - b) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, dengan kegiatan
 - (1) Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi lembaga Pemerintahan, Perwakilan, Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik
 - c) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan kegiatan
 - (1) Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - d) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dengan kegiatan
 - (1) Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya
 - e) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dengan kegiatan
 - (1) Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial

- 29) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur :
 - a) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - (1) Pengembangan Kompetensi Teknis
 - (2) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Managerial dan Fungsional.
- 30) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
 - (1) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
 - a) Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
 - b) Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - c) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - d) Peningkatan Kapasitas DPRD
 - e) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - f) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - g) Fasilitasi Tugas DPRD
- 31) Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan meliputi kegiatan
 - (a) Program Pelayanan Penghubung
 - (1) Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
- 32) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
 - a) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan kegiatan
 - (1) Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - b) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan kegiatan
 - (1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 33) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan program Kepegawaian Daerah, yang meliputi kegiatan :
 - (a) Program Kepegawaian Daerah dengan kegiatan :
 - (1) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - (2) Mutasi dan Promosi ASN
 - (3) Pengembangan Kompetensi ASN
 - (4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- 34) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
 - a) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - (1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - (2) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

- (3) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - (4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - (5) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 35) Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang meliputi kegiatan:
- a) Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - c) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - d) Penyediaan Jasa Penunjang Uruan Pemerintahan Daerah
 - e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f) Administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH
 - g) Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
 - h) Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan
- 36) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur
- a) Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
 - (1) Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
 - (2) Pelaksanaan Otonomi Daerah
 - (3) Fasilitas Kerjasama Daerah
 - b) Program Kesejahteraan Rakyat
 - (1) Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual
 - (2) Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
 - (3) Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
- 37) Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang meliputi kegiatan :
- a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

- Pemerintah Daerah
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f) Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
 - g) Fasilitasi Keprotokolan
- 38) Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan, yang meliputi kegiatan :
- (1) Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa
 - a) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - b) Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 - c) Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
- 39) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan, meliputi kegiatan :
- (1) Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
 - a) Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
 - b) Fasilitasi Bantuan Hukum
- 40) Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan, meliputi kegiatan :
- (1) Program Penataan Organisasi
 - a) Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - b) Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
- 41) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur .
- a) Program Perekonomian Dan Pembangunan
 - (1) Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
 - (2) Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
 - (3) Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
 - b) Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
 - (1) Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - (2) Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Pertimbangan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bersinggungan langsung maupun tidak langsung dengan masyarakat sebagai pemetik manfaat demi mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) selain untuk meningkatkan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum juga dimaksudkan untuk mewujudkan *Good Governance*.

Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena beberapa alasan utama, diantaranya :

- 1) Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
- 2) Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolak ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

b. Dasar Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dasar hukum Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 9) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
- 10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- 11) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 300/KEP/HK/2022 Tentang Tim Percepatan Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 28 November 2019.

c) Kebijakan Umum Daerah Dalam Rencana Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam bentuk kebijakan dan program.

Dalamdalam pelaksanaan SPM, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu berpedoman pada kebijakan SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam Kebijakan Strategis Nasional dan indikator-indikatornya.

Melalui Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa

Tenggara Timur Nomor: 300/KEP/HK/2022 Tentang Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah merencanakan dan melaksanakan pencapaian SPM yang memuat target dan capaian SPM tahunan dengan mengacu pada batas waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Target dan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar SPM harus maksimal dan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA- Perangkat Daerah) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

2.1 Capaian Kinerja Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi makro ekonomi yang digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dan tahun sebelumnya didasarkan pada data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Adapun indikator kinerja makro Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Capaian Indikator Kinerja Makro Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023 dan 2024

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan
1	2	3	4	5
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,4	69,14	1,08%
2.	Angka Kemiskinan :			
	– Persentase Penduduk Miskin*	19,96%	19,48*	-2,40
	– Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa)*	1,141	1,128*	0,013
3.	Angka Pengangguran / TPT (bulan Feburari)	3,14%	3.17%	0,03 %
4.	Pertumbuhan Ekonomi (y on y) (Data TW I)	3,52%	3,66	0,14%
5.	PDRB per Kapita ADHB (juta rupiah)	23,078	34,41	11,33
6.	Ketimpangan Pendapatan (gini ratio)*	0,325	0,315	-0,01%

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2024
*Kondisi Maret 2024

a. Indeks Pembangunan Manusia (PMI)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*alongand healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*).

Sesuai standar *United Nations Development Programme* (UNDP) capaian IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dalam kategori sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$), namun dalam satu dekade terakhir, pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mengalami kemajuan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur meningkat dari 68,4 pada tahun 2023 menjadi 69,14 pada Tahun 2024. Capaian IPM Tahun 2024 ini mengalami peningkatan 1,08 poin jika dibandingkan dengan IPM Tahun 2023. Peningkatan IPM 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Selengkapnya komponen-komponen penentu besaran IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut data BPS Provinsi NTT dirinci sebagai berikut :

1. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,83 tahun, meningkat 0,26 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF).
2. Dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,22 menjadi 13,23 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,20 tahun, dari 7,82 tahun menjadi 8,02 tahun pada tahun 2024. Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil Susenas Maret.
3. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 286 ribu rupiah (3,47 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber data pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret.

b. Angka Kemiskinan

Perhitungan angka kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik didasarkan pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Ini berarti, perhitungan angka kemiskinan dilakukan melalui pengukuran terhadap kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, konsep penduduk miskin yang dipakai Badan Pusat Statistik adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan, di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 19,48%, turun 0,14% dibandingkan September 2023.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 1,13 juta orang, menurun 13,54 ribu orang terhadap Maret 2023. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 8,57 persen, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 9,12 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin

perdesaan pada Maret 2024 sebesar 23,41 persen, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 23,76 persen.

Dibanding Maret 2023, jumlah penduduk miskin Maret 2024 perkotaan menurun sebanyak 3,96 ribu orang (dari 135,57 ribu orang pada Maret 2023 menjadi 131,61 ribu orang pada Maret 2024). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 9,59 ribu orang (dari 1.005,55 ribu orang pada Maret 2023 menjadi 995,96 ribu orang pada Maret 2024).

Garis Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp 527.275,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 403.922,- (76,61 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp123.353,- (23,39 persen). Pada Maret 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi NTT memiliki 5,75 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp3.031.831,-/rumah tangga miskin/bulan.

c. Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Februari 2024 sebesar 3,17 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3 orang penganggur. Pada Februari 2024, TPT mengalami kenaikan sebesar 0,03 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023.

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2024 terkoreksi sedikit membaik bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Februari 2024 sebesar 3,17 persen, naik sebesar 0,03 persen poin dibanding Agustus 2023.

Pada Februari 2024, TPT laki-laki sebesar 3,62 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 2,65 persen. TPT laki-laki memiliki pola yang sama dengan TPT provinsi yaitu naik dibandingkan Februari 2023 sebesar 0,59 persen poin, sedangkan TPT perempuan mengalami penurunan sebesar 0,54 persen poin.

Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (6,38 persen) jauh lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan (2,06 persen). Dibandingkan Februari 2023, TPT perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,12 persen poin dan 0,02 persen poin.

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT pada Februari 2024 mempunyai pola yang berbeda dengan

Februari 2023. Pada Februari 2024, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 7,66 persen. Sementara itu, TPT yang paling rendah adalah pendidikan Diploma I/II/III, yaitu sebesar 0,53 persen. Dibandingkan Februari 2023, penurunan TPT terbesar terjadi pada yang berpendidikan Diploma I/II/III yaitu sebesar 3,91 persen poin. Sementara itu, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan mengalami kenaikan TPT tertinggi yaitu sebesar 1,23 persen poin.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2024 mencapai Rp34,41 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp19,52 triliun.

Ekonomi NTT triwulan III-2024 tumbuh sebesar 3,66 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023 (y-on-y). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yaitu sebesar 13,56 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 11,06 persen.

Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q), ekonomi NTT pada triwulan III-2024 mengalami kontraksi sebesar 1,34 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 8,65 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 1,72 persen.

Perekonomian NTT pada triwulan I–III 2024 tumbuh sebesar 4,02 persen (c-to-c). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 11,54 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 13,19 persen.

Struktur Ekonomi NTT pada triwulan III-2024 masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 28,76 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 66,23 persen.

e. PDRB Perkapita NTT Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2024 mencapai Rp 34,41 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp19,52 triliun.

Pertumbuhan ekonomi positif terjadi pada semua lapangan usaha. Tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada triwulan ini adalah lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 13,56 persen, selanjutnya disusul oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 8,53 persen dan lapangan usaha jasa perusahaan sebesar 8,04 persen.

Bila dilihat dari penciptaan pertumbuhan ekonomi NTT triwulan III-2024, tiga lapangan usaha dengan kontribusi tertinggi adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor yang menyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar yaitu sebesar 0,87 persen. Kemudian disusul oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 0,64 persen dan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 0,48 persen.

Struktur PDRB NTT menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan III-2024 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (66,23 persen) yang mencakup lebih dari separuh PDRB NTT. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB NTT secara berturut-turut adalah PMTB (44,67 persen), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (21,84 persen), Ekspor Barang dan Jasa (5,86 persen), dan Pengeluaran Konsumsi LNPRT (3,46 persen). Sementara Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 42,99 persen.

f. Ketimpangan Pendapatan

Pada September 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi NTT yang diukur menggunakan Gini Ratio adalah sebesar 0,3155. Angka ini menurun 0,0007 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2024 yang sebesar 0,3162 dan menurun 0,0095 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,3250.

Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,282; naik dibanding Gini Ratio Maret 2024 yang sebesar 0,281 dan turun jika dibandingkan Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,299.

Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,306; naik dibanding Gini Ratio Maret 2024 yang sebesar 0,305 dan turun jika

dibandingkan Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,307.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 20,79 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2024 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci berdasarkan daerah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 23,03 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 21,55 persen, yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah.

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.2.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

LAMPIRAN 2.2.2
2 (dua) Urusan

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	$\frac{\text{Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah}}{\text{Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	$\frac{297.184}{302.964} \times 1000$ = 98,09%	Dinas Pendidkan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	$\frac{\text{Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus}}{\text{Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	$\frac{3.261}{7.722} \times 1000$ = 42,23%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	
2	Kebudayaan	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang di lestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yang ditetapkan}} \times 100\%$	$\frac{74}{31} \times 1000$ = 238,71%	Dinas Pendidkan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Kesehatan, Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1. Kesehatan

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kesehatan	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di seluruh Provinsi}}{\text{Jumlah Penduduk Provinsi}} \times 100\%$	$\frac{6.273}{5.700.772} \times 1000$ = 1,100%	Data Seksi Yankes Rujukan Tahun 2024	
		2	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi}}{\text{Jumlah RS Provinsi}} \times 100\%$	$\frac{60}{66} \times 1000$ = 90,90%	Data Seksi Yankes Rujukan Tahun 2024	
		3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	$\frac{\text{Jumlah Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapat pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama}} \times 100\%$	$\frac{31.963}{31.993} \times 1000$ = 99,90%	Data Seksi Yankes Rujukan Tahun 2024	
		4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	$\frac{\text{Jumlah orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB}} \times 100\%$	$\frac{3.949.459}{3.949.459} \times 1000$ = 100%	Laporan KLB Data Seksi Survim Tahun 2024	



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1. Pekerjaan Umum
2. Perumahan Rakyat
3. Pertanahan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pekerjaan Umum	1	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh infrastruktur Pengendalian Banjir	Luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Provinsi (ha) -----x 100 % Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Provinsi (ha)	Tidak Ada	Dinas PUPR	Surat keterangan
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Provinsi	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Provinsi (m) -----X 100 % Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan Provinsi (m)	Tidak Ada	Dinas PUPR	Surat keterangan
		3	Rasio luas Daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha) ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan dipelihara (ha) di tahun eksisting -----X 100 % Luas Daerah irigasi kewenangan Provinsi	913,40 ha -----x1000 60,328 ha = 1,51%	Dinas PUPR	Belum ada bukti dukung
		4	Presentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan	Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota -----X 100 % Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang	384,966 m³ -----x1000 622,080 m³	BLUD SPAM Dinas PUPR	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten./kota	memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab/Kota di Provinsi bersangkutan	= 61,88%		
		5	Rasio pelayanan pengelolaan limbah domestik oleh SPAL Regional	Total volume limbah yang masuk dalam SPAL Domestik regional -----X 100 % Total kapasitas pengolahan limbah SPAL Domestik regional	Tidak Ada	Dinas PUPR Prov. NTT	Surat keterangan
		6	Rasio Kemantapan Jalan	Panjang jalan kewenangan Provinsi yang mantap -----X 100 % Panjang jalan keseluruhan di wilayah Provinsi	1.827,07 km -----x1000 2.687,31km = 67,99%	Dinas PUPR Prov. NTT	Belum ada bukti dukung
		7	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli -----X100% Jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi	1.442 orang -----x1000 1.936 orang = 74,48%	Dinas PUPR Prov. NTT	Data dukung belum benar
2	Perumahan Rakyat	1	Presentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun N -----X 100 % Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun N	Tidak Ada	Dinas PUPR Prov.	Surat keterangan
		2	Presentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + Rumah tangga penerima Subsidi Uang sewa + Rumah tangga penerima penyediaan Rumah layak huni (-) -----X 100 %	Tidak Ada	Dinas PUPR Prov.	Surat keterangan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan (-)			
		3	Presentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 ha yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan kumuh 10 -15 Ha yang ditangani (--)}}{\text{Luas Kawasan kumuh 10 – 15 Ha}} \times 100 \%$	0%	Dinas PUPR Prov.	Surat keterangan
		4	Persentase satuan Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	$\frac{\text{Jumlah satuan perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah satuan Perumahan}} \times 100 \%$	Tidak Ada	Dinas PUPR Prov.	Surat keterangan
3	Pertanahan	1	Presentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)}}{\text{Seluruh luas tanah yang diberikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)}} \times 100 \%$	0 %	Dinas PUPR Prov.	Izin Lokasi bukanlah kewenangan Dinas PUPR, Terkait table rumus, tidak terdapat kegiatan karena keterbatasan anggaran
		2	Presentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	$\frac{\text{Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu}}{\text{Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum}} \times 100 \%$	Tidak ada	Dinas PUPR Prov.	PUPR hanya melakukan penetapan lokasi
		3	Persentase ketersediaan Pembangunan lintas kabupaten/Kota	Luas pemanfaatan adalah luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya diatas kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) lintas Kab/Kota	Tidak Ada	Dinas PUPR Prov.	Tidak terdapat kegiatan untuk pertanian karena keterbatasan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				-----x 100 % Luas tanah di atas kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang diterbitkan			anggaran



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$	Sat Pol PP	Dari surat masuk, pengaduan operasi penertiban pemantauan dan pengamanan serta patroli
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$	$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	Sat Pol PP	Jumlah kasus yang diselesaikan sesuai pelanggaran Perda dan Perkada dan pelanggaran Perda dan Pergub



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Sosial Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Sosial

No	Urusan Pemerintahan	No	IKK Out Come	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sosial	1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Korban Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan di dalam panti ----- x 100% Populasi Disabilitas terlantar	40 ---- x 100% 40 = 100%	Dinas Sosial Provinsi NTT	
		2.	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Korban Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan di dalam panti ----- x 100% Populasi Anak terlantar	270 ----- x 100% 270 = 100%	Dinas Sosial Provinsi NTT	
		3.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan di dalam panti ----- x 100% Populasi Lanjut Usia Terlantar	137 ---- x 100% 137 = 100%	Dinas Sosial Provinsi NTT	
		4.	persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan di dalam panti -----x 100% Populasi Gelandangan dan Pengemis	0 --- x 100% 0 = 0%	Dinas Sosial Provinsi NTT	Surat Keterangan



No	Urusan Pemerintahan	No	IKK Out Come	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		5.	persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya -----x 100% Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah provinsi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi	2.714 ----- x 100% 2.714 = 100%	Dinas Sosial Provinsi NTT	



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1. Tenaga Kerja
2. Transmigrasi

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tenaga Kerja	1	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menyusun rencana tenaga kerja -----x 100 % Jumlah Kabupaten /Kota	0 -----x 100 % 22 = 0 %	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Data terlampir
		2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi -----x 100 % Jumlah tenaga kerja keseluruhan	418 ----- X 100 % 3.024.462 = 0,01 %	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Data terlampir
		3	Tingkat Produktivitas tenaga kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) -----x 100% Jumlah tenaga kerja	78.044.565,32 -----x 100 3.024.462 = 2,580 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur skala upah, dan daftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak -----x100% Jumlah Perusahaan	142 -----x 100 % 29.005 = 0,49 %	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Data terlampir
		5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (Dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) daerah Provinsi	Jumlah pencari kerja (pencaker) yang ditempatkan -----x 100% Jumlah pencaker yang terdaftar	2.943 ----- x100 6.510 = 45,21 %	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Data terlampir



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	$\frac{\sum \text{Total Perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan pada tahun n}}{\sum \text{Total Perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun n}} \times 100\%$	1.210 -----x 100 % 29.005 = 4,17 %	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Data pendukung terlampir



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Keluarga Berencana

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh anggaran belanja langsung di Provinsi}} \times 100\%$	$\frac{202.539.875.382}{4.322.313.687.267} \times 100\% = 4,68\%$	DP3AP2KB dan Badan Keuangan	
		2	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani intensi tingkat provinsi yang didampingi}}{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)}} \times 10.000$	$\frac{728}{1.792.963} \times 10.000 = 4.06$	DP3AP2KB dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data SIMFONI 2024
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan di Provinsi}} \times 100.000$	$\frac{633}{1.970.946} \times 100.000 = 32,11$	DP3AP2KB dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. NTT	Data SIMFONI 2024
2	Pengendalian Penduduk & KB	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i^f} \times k$	2,71	Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2024 (PK 24)	
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif modern}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$	$\frac{377838}{717667} \times 100\% = 52,65\%$	Sistem Informasi Keluarga BKKBN 2024	



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani -----x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	$\frac{127795}{717667} \times 100\%$ = 17,81%	Sistem Informasi Keluarga BKKBN 2024	



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Petanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1. Pertanian
2. Pangan

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pertanian	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun}}{\text{Luas Panen}} \times 100\%$	$\frac{1.356.241}{423.271} \times 100$ = 31,21 %	*Angka sangat sementara yang diolah data KSA BPS dan ePDPs Pusdatin	Perhitungan untuk tahun 2024 sementara berjalan, angka tetap akan keluar pad bulan Juni/Juli tahun 2025
2	Pangan	1	Persentase Cadangan Pangan	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan Pemerintah Provinsi}}{\text{Jumlah target cadangan pangan Pemerintah Provinsi yang ditetapkan}} \times 100\%$	$\frac{32,17}{261,15} \times 100$ = 9,96 %	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Peternakan Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Peternakan

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peternakan	1	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	$\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya}}{\text{jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}} \times 100\%$	$\frac{7.255 - 2.096}{2.096} \times 100\%$ = 40,63%	Data sekunder Dinas Peternakan Prov NTT	- Provinsi NTT masih dinyatakan bebas untuk Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta penyakit Lumpy Skin Disease - Tahun 2024 terdapat kasus AI di Kabupaten Ngada, hasil investigasi menyatakan bahwa adanya pemasukan unggas secara ilegal. Kasus ini sudah bisa dikendalikan dengan beberapa tindakan teknis yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Ngada diantaranya melakukan desinfeksi pada kandang/lokasi kasus, KIE kepada peternak dan masyarakat, pembatasan atau pelanggaran pengadaan ternak unggas/ayam pada kegiatan ketahanan pangan melalui dana desa



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1. Lingkungan Hidup
2. Kehutanan

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	$\text{IKLH Prov} = (\text{IKA } 0,34) + (\text{IKU } 0,428) + (\text{IKL } 0,133) + (\text{IKAL } 0,099)$ IKA = Indeks Kualitas Air IKD = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan IKAL = Indeks Kualitas Air Laut	IKLH = 75	IKLH Kementerian Lingkungan Hidup	Belum ada publikasi perhitungan IKLH akhir Tahun 2024 oleh Kementerian Lingkungan Hidup, perhitungan IKLH saat sampai pada tahap klarifikasi. Setelah tahap klarifikasi, Tim pelaksana IKLH melakukan perhitungan akhir indeks, penyusunan IKLH pusat, provinsi dan kabupaten/kota
		2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	$\frac{\text{Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi}}{\text{Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}} \times 100\%$	$\frac{83}{100} \times 100\% = 83\%$	Dinas LHK Prov. NTT	Pelanggaran dikarenakan tidak taat dalam penyampaian laporan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup (Penyampaian laporan setiap 6 bulan sekali)
2	Kehutanan	1	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yg diberikan akses legal}}{\text{Jumlah total usulan KTH yang terintegrasi}} \times 100\%$	$\frac{312}{387} \times 100\% = 80,62\%$	Dinas LHK Provinsi NTT	
		2	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	$\frac{\text{Jumlah hutan yang rusak}}{\text{Jumlah hutan keseluruhan}} \times 100\%$	$\frac{1.542.8034}{1.778.682.57} \times 100\% = 0,087\%$	Dinas LHK Prov. NTT	
		3	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	$\frac{\text{Lahan - lahan kritis di provinsi yang direhabilitasi (ha)}}{100\% \text{ Luas lahan kritis di Provinsi (ha)}} \times 100\%$	$\frac{1.110}{580.730,99} \times 100\% = 0,19\%$	Dinas LHK Prov. NTT	



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Adm Kependudukan & Pencatatan

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil	1	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	$\frac{\text{Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun}}{2 \text{ kali}} \times 100\%$	$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	Data Dukcapil Provinsi NTT 2024	
		2	Pemanfaatan data kependudukan	$\frac{\text{OPD Provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama}}{\text{Seluruh OPD Provinsi}} \times 100\%$	$\frac{0}{5} \times 100\% = 0\%$	Data Dukcapil Provinsi NTT 2024	Syarat OPD dapat memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama maka OPD sudah memiliki sertifikat ISO 27001: 2013 dan memiliki jaringan VPN atau Jaringan Pribadi Virtual (<i>Virtual Private Network</i>)



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	1	Persentase pengentasan desa tertinggal	$\frac{\text{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa tertinggal (per awal tahun tahun n)}} \times 100\%$	$\frac{201}{986} \times 100\% = 20,39\%$	Indeks membangun Kemendes PDT	
		2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	$\frac{\text{Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa berkembang per awal tahun tahun}} \times 100\%$	$\frac{1}{1.634} \times 100\% = 0,06 \%$	IDM Kemendes PDT	



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Perhubungan Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Perhubungan

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perhubungan	1	Rasio konektivitas provinsi	Rasio konektivitas Provinsi = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$ - IK1 (angkutan jalan) = $(\text{Jumlah trayek yg dilayani pd provinsi} \times \text{bobot trayek}) \div \text{jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut}$ - IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)=$\text{jumlah linta Penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb} \times \text{bobot lintas} \div \text{jumlah kebutuhanlintas penyeberangan pada provinsi tersebut}$ Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan	Rasio Konektifitas : - IK1 (Angkutan Jalan) = a. Jumlah trayek yang dilayani sebanyak 113 trayek b. Bobot trayek = 1 c. Jumlah Kebutuhan Trayek = 597 Trayek Perhitungannya sebagai berikut : $\frac{113 \times 1}{597} = 0,19$ - IK2 (Angkutan Sungai, danau & Penyeberangan) a. Jumlah lintas penyeberangan = 71 lintasan b. Bobot Trayek = 0,5 $\frac{71 \times 0,5}{104} = 0,24$ - Bobot angkutan jalan = 70 - Bobot ASDP = 30 Jadi Rasio Konektifitas Provinsi adalah a. $IK1 \times 70 = 0,19 \times 70 = 13,3$ b. $IK2 \times 30 =$	Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur	



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direnc. dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan : - Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) - Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) - Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) - Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas : - Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 - Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8	$0,34 \times 30 = 10,28$ Jadi Rasio Konektifitas Provinsi adalah sebagai berikut $13,3 + 10,28 = 23,58\%$ = 0,23		



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5			
		2	V/C Ratio di Jalan Provinsi	V/C ratio di jalan Provinsi	Tidak ada		Surat Keterangan



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Komunikasi dan Informasi, Statistik & Persandian

No	Urusan Pemerintahan	No	IKK Outcame	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas KOMINFO}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	$\frac{36}{41} \times 100\% = 87,80\%$	Dinas KOMINFO/ Bidang Komunikasi & Informasi	
		2	Presentase layanan public yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah layanan public yang diselenggarakan secara online \& terintegrasi}}{\text{Jumlah layanan public}} \times 100\%$	$\frac{9}{36} \times 100\% = 87,80\%$	Dinas KOMINFO/ Bidang Komunikasi & Informasi	
		3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	$\frac{3.826.789}{3.874.577} \times 100\% = 87,80\%$	Dinas KOMINFO/ Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	



No	Urusan Pemerintahan	No	IKK Outcame	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
2	STATISTIK	1	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistic dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	$\frac{41}{41} \times 100\% = 100\%$	Dinas KOMINFO/ Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
		2	Presentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Dearah}} \times 100\%$	$\frac{41}{41} \times 100\% = 100\%$	Dinas KOMINFO/ Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
3	PERSANDIAN	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah provinsi	$\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100\%$	$\frac{479}{645} \times 100\% = 74,26\%$	Dinas KOMINFO/Bidang Persandian	



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Koperasi, dan UKM Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah	1	Presentase Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dab aset	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, Volume usaha dan Aset}}{\text{Jumlah Seluruh Koperasi}} \times 100\%$	$\frac{3.343}{4.295} \times 100\% = 77,83 \%$	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Data terlampir
		2	Presentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah usaha kecil keseluruhan}} \times 100 \%$	$\frac{100}{1.178} \times 100\% = 8,49 \%$	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Data terlampir



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Penanaman Modal

No	Urusan Pemerintahan	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di provinsi	$\frac{(\text{Jumlah Investasi tahun n} - \text{Jumlah investasi tahun n-1 di Provinsi})}{\text{Jumlah Investasi tahun n-1 di Provinsi}} \times 100\%$	$\begin{aligned} &= \text{Rp.} 3.050.937.900.000 - \text{Rp.} 5.246.840.000.000 \\ &\quad \text{-----} \times 100 \% \\ &\quad \text{Rp.} 5.246.840.000.000 \\ &= \text{Rp.} -2.195.850.000.000 \\ &\quad \text{-----} \times 100 \% \\ &\quad \text{Rp.} 5.246.840.000.000 \\ &= -42 \% \end{aligned}$	DPMPTSP PROVINSI NTT	Capaian kinerja Penanaman Modal mengalami penurunan .. % bila dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2023 : Rp. 5.246.840.000.000,- terdiri dari (PMDN : Rp. 3.407.200.000.000,- dan PMA Rp. 1.839.640.000.000,- Realisasi Investasi Tahun 2024 : Rp. 3.050.937.900.000 terdiri dari (PMDN : Rp. 1.702.940.000.000 & PMA : Rp. 1.348.050.000.000 Capaian Kinerja terhadap Target RPJMD 53,53 % dan Capaian Kinerja terhadap Target Nasional 48,74 %



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Kepemudaan & Olahraga Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Kepemudaan & Olahraga

NO	URUSAN PEMERINTAH		IKK OUTCOME	Rumus	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kepemudaan dan Olahraga	1.	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{\text{Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di provinsi}}{\text{Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di provinsi}} \times 100\%$	$\frac{4.980}{1.599.000} \times 100\% = 0,31\%$	Dispora NTT	- Banyak Proposal dari kelompok usaha yang tidak memenuhi kriteria; - Alokasi anggaran untuk pemberdayaan dan pembinaan pemuda terbatas.
		2.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	$\frac{\text{Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada Organisasi kepemudaan dan Organisasi sosial kemasyarakatan di provinsi}}{\text{Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di Provinsi}} \times 100\%$	$\frac{0}{1.599.000} \times 100\% = 0\%$	Dispora NTT	Indikator kinerja OKP di dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 tahun 2021 di drop sehingga tidak ada alokasi anggaran untuk kegiatan dimaksud
		3.	Peningkatan prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	Total Medali yang di Peroleh : 101 Medali dengan rincian: Emas = 34 Perak = 31 Perunggu = 36	- Dispora NTT	1. Total medali yang diraih sampai dengan akhir realisasi adalah 69 medali, dengan rincian : - Emas : 25 - Perak : 19 - Perunggu : 30 2. Total Medali Yang diraih dari cabang olahraga paralympic adalah 32 medali dengan rincian : - Emas : 9 - Perak : 12 - Perunggu : 11



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Kearsipan & Perpustakaan Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Kearsipan & Perpustakaan

No.	Urusan Pemerintahan	No.	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kearsipan	1.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 UU 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	$T = (a + l + s + j)/4$ T = Tingkat Ketersediaan Arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip l = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	$T = (100\% + 100\% + 100\% + 23,75)/4$ = 80,94%	Hasil Olahan data yang dihimpun dari OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan Data Depot Arsip Dinas Arspus Prov. NTT	
		2.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan berbegara untuk kepentingan negara, pemerintah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$ T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah	$T = (0,01\% + 600\% + 100 + 100\% + 100\% + 0)/6$ = 150%	Hasil Olahan data yang dihimpun dari OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan data Depo Arsip Dinas Arpus Prov. NTT	



No.	Urusan Pemerintahan	No.	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				kabupaten/kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK			
2.	Perpustakaan	1.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survey/kajian kegemaran membaca masyarakat	70,34 poin	Hasil Kajian Perpustakaan Nasional RI	Link : https://satudata.perpusnas.go.id/index.php/2022/03/29/tingkat-kegemaran-membaca-tahun-2022/
		2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur unsure pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM). Indek Pembangunan Literasi Masyarakat = $\frac{\sum UPLM}{ALM} \times 100\%$	62,62%	Hasil Kajian Perpustakaan Nasional RI	Link : https://satudata.perpusnas.go.id/index.php/2022/03/31/indeks-pembangunan-literasi-perpusnas-tahun-2021/



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Kelautan & Perikanan NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Kelautan & Perikanan

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kelautan & Perikanan	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) provinsi -----x100% Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan	1.838.176 -----X100% 1.820.000 = 100,99 %	Dinas Kelautan Perikanan	
		2	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	$X = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{ci}{s_i} \cdot 100\% \right)}{n}$ Ket : X = Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku ci = Jumlah sampel pelaku usaha KP yg diperiksa s_i = Jenis komponen pelaku usaha KP s_i = Jumlah sampel pelaku usaha KP yg diperiksa i i = Jenis komponen pelaku usaha KP n = Jumlah komponen pelaku usaha KP	$X = \frac{\sum_{i=1}^7 \left(\frac{13.328}{13.328} \cdot 100\% \right)}{7}$ = 100%	Satu Data KKP	Dimana : i = 1 n = 7 ci = 13.328 si = 13.328



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Pariwisata

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pariwisata	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun n} - \text{jumlah wisatawan tahun n-1}}{\text{Jumlah wisatawan tahun n-1}} \times 100\%$	$\frac{358.646 - 319.573}{319.573} \times 100\%$ = 12,22%	Data Olahan Dinas Parekraf Provinsi NTT	Sebagian besar Kabupaten/Kota belum mengirimkan data kondisi final bulan desember 2024. Data dukung pada lampiran 1 IKK Outcome.
		2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun n} - \text{jumlah wisatawan tahun n-1}}{\text{Jumlah wisatawan tahun n-1}} \times 100\%$	$\frac{1.332.306 - 1.305.318}{1.305.318} \times 100\%$ = 2,06 %	Data Olahan Dinas Parekraf Provinsi NTT	Sebagian besar Kabupaten/Kota belum mengirimkan data kondisi final bulan desember 2024. Data dukung pada lampiran 2 IKK Outcome.
		3	Tingkat hunian akomodasi	$\frac{\text{Jumlah kamar yg terjual}}{\text{Jumlah kamar yg tersedia}} \times 100\%$	$\frac{1.942.713}{4.214.490} \times 100\%$ = 46,09%	Badan Pusat Statistik Provinsi NTT,	Kondisi capaian bulan November Tahun 2024.
		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	$\frac{\text{Total nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB}}{\text{Total PDRB Berlaku}} \times 100\%$	$\frac{2.676}{34.412} \times 100\%$ = 7,77%	Badan Pusat Statistik Provinsi NTT.	Kondisi Capaian hingga TW III Tahun 2024. Kontribusi sektor pariwisata secara keseluruhan merupakan komposit dari lapangan usaha penyediaan akomodasi & makan minum, lapangan usaha transportasi dan pergudangan serta lapangan usaha jasa lainnya.



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas ESDM Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: ESDM

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ESDM	1	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	$\frac{\text{Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda}}{\text{Jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Prov}} \times 100\%$	$\frac{175}{175} \times 100\% = 100\%$	Dinas ESDM Provinsi NTT	
		2	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	$\frac{\text{Jumlah desa yang teraliri Isitrik}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	$\frac{3.322}{3.442} \times 100\% = 96,51\%$	Dinas ESDM Provinsi NTT	



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Perindustrian & Perdagangan

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perindustrian	1	Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi	$\frac{\text{Jumlah industri besar tahun n} - \text{jumlah industri besar tahun n - 1}}{\text{Jumlah industri besar tahun n-1}} \times 100\%$	$\frac{2 - 2}{2} \times 100\%$ $\frac{0}{2} \times 100\%$ $= 0\%$	SIINAS 2023 dan 2024	
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dlm RPIP	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah (Target masing-masing indicator pada RPIP) $= 20\% \times \frac{\text{capaian}}{\text{target}}$	1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan persentase). $= 20\% \times \frac{6,36}{5,78}$ $= 22\%$	Dokumen RPIP - 2023-2043 Data Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha BPS Provinsi NTT Tahun 2024	
				Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)%	2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi $= 20\% \times \frac{14}{1,48}$ $= 18,92\%$	Data PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha, BPS Provinsi NTT 2024	



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					3. Jumlah tenaga kerja sektor industri= = 20%x $\frac{(284,499)}{227,008}$ = 25,06%	Data BPS NTT 2024	
					4. Jumlah Eksport Sektor Industri Pengolahan Non Migas = = 20%x $\frac{(Rp.0.0012)}{Rp.0.0232}$ = 1,03%	e-SKA 2024	
					5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas = 20%x $\frac{(1.213)}{6.122}$ = 3,96% Capaiannya : 70,97%	Triwulan IV DPMPTSP	
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yg dipantau & dianalisis dalam laporan hasil pemantauan _____ x 100% Jumlah izin yg dikeluarkan	$\frac{14}{14} \times 100\%$ = 100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	
		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yg dipantau & dianalisis dalam laporan hasil pemantauan _____ x 100% Jumlah izin yg dikeluarkan	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 0%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yg dipantau \& dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{100\%} \times \text{Jumlah izin yg dikeluarkan}$	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	
		6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1) Ketersediaan Informasi Industri: - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%); - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%); - Tidak menyampaikan informasi industri (25%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi: - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%); - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%); - Informasi bahan bakar/ energy (10%); - Informasi tenaga kerja (10%); - Informasi investasi (10%).	TOTAL = 125 %		
2	Perdagangan	1.	Pertumbuhan Nilai Ekspor non Migas	$\frac{\text{Nilai ekspor non migas tahun berjalan}}{\text{Nilai ekspor non migas tahun sebelumnya}} \times 100\%$	$\frac{61.081.415 \text{ US\$} - 57.576.670 \text{ US\$}}{57.576.670 \text{ US\$}} \times 100\% = 6,087 \%$	Perkembangan Ekspor Import, Desember 2024 BRS No.10/02/53/Th.XXVI II,3 Februari 2025	
		2	Persentase penanganan pengaduan konsumen	$\frac{\text{Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani \& diselesaikan Dinas Prov \& BPSK sesuai dengan ketentuan yg berlaku dalam tahun berjalan}}{\text{Jumlah Pengaduan Konsumen yang diterima dalam tahun berjalan}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0 \%$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	
		3	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	$\frac{\text{Jumlah sampel yg sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah sampel yang diuji dalam satu tahun}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0 \%$	UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		4	Tertib Usaha	$\frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki SIUP MB TBB}}{\text{Jumlah pelaku usaha MB TBB}} \times 100\%$	$\frac{21}{21} \times 100\%$ $= 100\%$	Dinas Perindustrian & Perdagangan Prov NTT	
		5	Persentase Kinerja Realisasi pupuk	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{RDKK}} \times 100\%$	$\frac{54.345}{190.340} \times 100\%$ $= 28,55\%$	Dinas Perindustrian & Perdagangan Prov. NTT	
		6.	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	$\frac{\text{jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dg ketentuan perundang-undangan}}{\text{Jumlah barang beredar yang diawasi}} \times 100$	$= \frac{18}{18} \times 100\%$ $= 100 \%$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov NTT	
		7.	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	$KVpt = \frac{Sn}{p} \times 100\%$ KVpt = Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu Sn= Standar deviasi harga rata-rata provinsi selama bulan Januari s.d Desember. P = rata-rata harga provinsi barang kebutuhan pokok selama bulan Januari s.d Desember	$\frac{4.101,18}{29.523,52} \times 100\%$ $= 13,89 \%$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov NTT	



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Trantibumlinmas

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TRANTIBUMLINMAS	1	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yg disusun}}{\text{Jumlah dokumen kebencanaan yg akan disusun}} \times 100\%$	$\frac{6}{13} \times 100\% = 100\%$	BPBD Provinsi NTT	KRB (Kajian Resiko Bencana) dan RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) dan Rencana Kontinjensi Cuaca Ekstrem
		2	Persentase penanganan pra bencana	$\frac{\text{Jumlah Kab/Kota yg terfasilitasi dalam penanganan pra bencana}}{\text{Jumlah Kab/Kota di wilayah Prov}} \times 100\%$	$\frac{22}{22} \times 100\% = 100\%$	BPBD Provinsi NTT	Kota Kupang, Kab Kupang, Manggarai Barat, Rote Ndao, Sabu Raijua, Flores Timur, Lembata, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, SBD, Manggarai, Manggarai Timur, TTS, TTU, Belu, Malaka, Ende, Ngada, Nagekeo, Sikka, Alor Kerjasama dengan SIAP SIAGA
		3	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	$\frac{\text{Jumlah Kab/Kota yg terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana}}{\text{Jumlah Kab/Kota di wilayah Prov yg mengalami bencana}} \times 100\%$	$\frac{22}{22} \times 100\% = 100\%$	BPBD Provinsi NTT	22 Kab/Kota se Provinsi NTT



2.2.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

LAMPIRAN 2.2.3
1 (satu) Urusan

INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Badan Pendapatan & Aset Daerah Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Fungsi Penunjang

No	FUNGSI PENUNJANG	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Manajemen Keuangan	1	Assets Management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	1. Ya	BPAD	
				2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	2. Ya	BPAD	
				3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)	3. Tidak	BPAD	Proses Inventarisasi belum bisa dilakukan karena sub bidang penatausahaan sementara memperbaiki data asset disesuaikan dengan Permendagri 47/2021, untuk persiapan mutase data pada aplikasi e-BMD
				4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	4. Tidak	BPAD	Tidak ada dalam Anggaran



INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Fungsi Penunjang

NO	FUNGSI PENUNJANG	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Keuangan	1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$	$\frac{\text{Rp. 501.509.271.941,59}}{\text{Rp. 4.721.442.776.992,22}} \times 100\%$ = 10,62 %	Badan Keuangan Daerah	
		2	Rasio PAD	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah PDRB non migas}} \times 100\%$	$\frac{\text{Rp. 1.461.919.004.072,74}}{\text{Rp. 4.839.680.212.675,74}} \times 100\%$ = 30,21 %	Badan Keuangan Daerah	
		3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures}}{\text{Jumlah belanja APBD}} \times 100\%$	$\frac{\text{Rp. 4.215.861.673.470,40} - \text{1.176.610.311.408}}{\text{Rp. 4.721.442.776.992,22}} \times 100\%$ $\frac{\text{= Rp. 3.039.251.362.062}}{\text{Rp. 4.721.442.776.992,22}} \times 100\%$ = 64,37 %	Badan Keuangan Daerah	
		4	Opini Laporan Keuangan	(Opini Laporan Keuangan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir)	Tahun 2014 = WDP Tahun 2015 s.d.Tahun 2023 = WTP	Badan Keuangan Daerah	



NO	FUNGSI PENUNJANG	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		5	Budget execution :Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\left(\left(\frac{\text{Nilai Absolut dari Total belanja dalam realisasi}}{\text{Total belanja APBD}} \right) - 1 \right) \times 100\%$	$\frac{\text{Rp. 4.721.442.776.992,22} - 1}{\text{Rp. 5.290.514.318.980}} \times 100 \%$ = -10,76%	Badan Keuangan Daerah	
		6	Revenue mobilization : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\left(\left(\frac{\text{Nilai Absolut dari Total PAD dalam realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD}} \right) - 1 \right) \times 100\%$	$\frac{\text{Rp. 1.461.919.004.072,74} - 1}{\text{Rp. 1.773.480.357.656}} \times 100\%$ = - 17,57 %	Badan Keuangan Daerah	
		7	Cash Management :Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	$\frac{\text{Nilai Realisasi SILPA}}{\text{Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya}} \times 100\%$	$\frac{\text{Rp. 281.157.766.642,46}}{\text{Rp. 4.460.910.047.257,77}} \times 100\%$ = 2,72%	Badan Keuangan Daerah	

INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Inspektorat Daerah Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: FungsiPenunjang

No	Fungsi Penunjang	No	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perencanaan & Keuangan	1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0) /level 1 /level 2 /level 3 berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 2 (2,859)	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Sesuai Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri (PM) dan Penjamin Kualitas (PK) Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pemerintahan Provinsi NTT Tahun 2024 Nomor: PE.09.03/LHP-355/W24/3/2024, tanggal September 2024
		2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0) /level 1/ level 2/ level 3 berdasarkan Laporan Hasil quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3 (3,090)	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Sesuai Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2024 Nomor: PE.09.03/LHP-311/PW24/6/2024, tanggal 21 Agustus 2024



INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Biro Pengadaan Barang/Jasa setda Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: FungsiPenunjang

No	FUNGSI PENUNJANG	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pengadaan	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	$\frac{\text{Jumlah kontrak infrastruktur dgn nilai besar yg perlu pembangunan dalam 3 kuartal yg ditandatangani pada kuartal pertama tahun n}}{\text{Jumlah kontrak keseluruhan tahun n}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	Biro PBJ Setda Prov.NTT TA 2024	
		2	Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan Metode Kompetitif	$\frac{\text{Jumlah pengadaan yg dilakukan dgn metode kompetitif}}{\text{Jumlah pengadaan seluruhnya}} \times 100\%$	$\frac{2.561}{3.568} \times 100\% = 77,71 \%$	Biro PBJ Setda Prov.NTT TA 2024	
		3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{\text{Jumlah nilai belanja operasi dan modal yg melalui pengadaan}}{\text{Total belanja operasi dan modal}} \times 100\%$	$\frac{2.844.127.000.000}{4.322.313.687.267} \times 100\% = 65,80\%$	Biro PBJ Setda Prov.NTT TA 2024	1.
		4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	$\frac{\text{Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan Produk dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2024 - Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan Produk dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2023}}{\text{Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan Produk dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2023}} \times 100\%$	$\frac{1.448.019.173.733 - 811.456.603.179}{811.456.603.179} \times 100\% = 78,48\%$	Biro PBJ Setda Prov.NTT TA 2024	



INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: FungsiPenunjang

No 1	Fungsi Penunjang 2	No 3	IKK Outcome 4	Rumus 5	Capaian Kinerja 6	Sumber Data 7	Keterangan 8
1	Kepegawaian	1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	Jumlah pegawai menurut Pendidikan Tinggi ke atas (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) -----x100% Seluruh jumlah pegawai (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	4.793 -----x100% 6.374 = 75,20%	Simpeg BKD Prov.NTT	
		2	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	Jumlah pegawai PNS Fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) -----X 100% Seluruh jumlah pegawai pemerintah(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	899 ----x100% 6.374 = 14,10%	Simpeg BKD Prov.NTT	
		3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	Jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (diluar guru dan tenaga kesehatan) -----X 100% Seluruh Jumlah Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	535 -----x100% 899 = 59,51%	Simpeg BKD Prov.NTT	



INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Komunikasi & Informatika Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Fungsi Penunjang

No	Fungsipenunjang	No	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Transparansi & Partisipasi Publik	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayan (information on resources available to frontline service delivery units)	Realisasi belanja untuk unit palayanan dapat di akses di website pemda -----X100% Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat di akses di website pemda	1 ----X100% 1 = 100%	Bidang E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	
		2	Akses public terhadap informasi keuangan daerah (Publik access to fiscal information)	Jumlah dokumen yg dipublikasi di website Pemda -----X100% Total jumlah dokumen yg telah di rinci	17 ----X100% 17 = 100%	Bidang E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	



2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, terdapat 16 (enam belas) Sasaran Strategis yang diperjanjikan sebagai penjabaran dari 4 (empat) Tujuan, 29 (dua puluh sembilan) Indikator dan 75 (tujuh puluh lima) Program. Gambaran akuntabilitas kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan 1 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MANDIRI, MAKMUR, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN SOSIAL

Tujuan Misi ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat misi lainnya, yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip keterbukaan dan melibatkan semua pihak (stakeholder) dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk pada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan dan aspek kelembagaan.

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Beserta Pengolahan Produk Untuk Meningkatkan Nilai Tambah

Sasaran strategis ini mencakup satu (1) indikator sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel
Target dan Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	realisasi 2023	2024			RPD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
1.	Pertumbuhan PDRB	%	3,52	3,1	3,73	120,33	4,75-5,65	78,53-66,02
Rata-rata Capaian						120,33		

Sumber data: BPS NTT 2023, diolah

A. Analisis terhadap indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

a. Capaian Target Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi (PDRB) adalah sebesar 3,73% atau dengan capaian sebesar 120,32% dari target yang ditetapkan sebesar 3,1%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2024, Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) meningkat sebesar 5,97%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka, capaian terhadap target pesimis sebesar 78,53% dan capaian terhadap target optimis sebesar 66,02%.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

PDRB ADHB Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun tahun 2024 sebesar Rp. 137,28 triliun. Sumbangan terbesar untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku



(ADHB) NTT tahun 2024 adalah dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 28,87%. Faktor lain yang mempengaruhi PDRB adalah dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,80% dan lapangan usaha Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 12,74%. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 66,50%.

Sesuai penjelasan di atas, rata-rata capaian indikator pertumbuhan PDRB untuk sasaran strategis **"Tumbuhnya ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan"** adalah sebesar 120,33% dengan kategori **Berhasil**, bahkan melampau target tahun 2024.

Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Peranan Pariwisata Untuk Mendukung Perekonomian

Sasaran ini mencakup 2 (dua) indikator sebagaimana tabel berikut:

Tabel								
Target dan Capaian Indikator Kinerja								
No	Indikator Kinerja	Satuan	realisasi 2023	2024			RPD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
1.	Kontribusi Pariwisata pada PDRB	%	0,65	7,59	5,83%	76,81	7,79	74,84
2.	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp. Juta)	Juta	-	80.758,35	77.760	96,29	89.715,74	86,67
Rata-rata Capaian						86,88		

Sumber: BPS NTT 2023, diolah

A. Analisis terhadap indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Pariwisata pada PDRB

a. Capaian target Kontribusi Pariwisata pada PDRB

Pada tahun 2024 Kontribusi Pariwisata pada PDRB adalah sebesar 5,83% atau dengan capaian sebesar 76,81% dari target yang ditetapkan sebesar 7,59%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka, capaian terhadap target ahkhir RPJMD adalah sebesar 74,84%. Sementara, Pada tahun 2023, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tercatat sebesar 0,65%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB masih belum memenuhi target yang ditetapkan.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Beberapa faktor yang memengaruhi kinerja sektor ini antara lain:

- Infrastruktur dan Aksesibilitas Wisata
 - Terbatasnya akses transportasi ke destinasi wisata unggulan,

terutama di daerah terpencil di NTT, menyebabkan rendahnya arus kunjungan wisatawan.

- Kualitas infrastruktur pendukung seperti jalan, pelabuhan, dan bandara memengaruhi kenyamanan dan minat wisatawan untuk berkunjung.
- Promosi dan Pemasaran Pariwisata
 - Strategi promosi yang belum optimal di tingkat nasional dan internasional menyebabkan rendahnya eksposur destinasi wisata NTT.
 - Keterbatasan anggaran promosi pariwisata memengaruhi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
- Dampak Pandemi dan Perubahan Perilaku Wisatawan
 - Pemulihan sektor pariwisata dari dampak pandemi COVID-19 masih berlangsung, memengaruhi jumlah kunjungan wisatawan.
 - Perubahan preferensi wisatawan ke arah wisata berbasis komunitas dan alam memerlukan adaptasi dari pelaku usaha pariwisata.
- Keterlibatan Masyarakat dan SDM Pariwisata
 - Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata masih terbatas.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata memengaruhi kualitas layanan dan pengalaman wisatawan.

2. Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp. Juta)

a. Capaian Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp. Juta)

Pada tahun 2024 Nilai Tambah Ekonomi Kreatif adalah sebesar 77.760% atau dengan capaian sebesar 96,29% dari target yang ditetapkan sebesar 80.758,35%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka, capaian terhadap target akhir RPJMD adalah sebesar 86,67%. Capaian ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi kreatif hampir mencapai target yang telah ditentukan, mencerminkan pertumbuhan yang cukup baik di sektor ini.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Beberapa faktor yang memengaruhi kinerja sektor ini antara lain:

- Ketersediaan Teknologi dan Inovasi

Pemanfaatan teknologi modern menjadi faktor utama dalam meningkatkan produktivitas dan menciptakan nilai tambah bagi produk kreatif. Adopsi teknologi digital dalam pemasaran melalui *platform e-commerce* memungkinkan produk ekonomi kreatif NTT menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk pasar nasional dan internasional. Selanjutnya pengembangan produk berbasis budaya

dan kearifan lokal, seperti tenun ikat Sabu Raijua atau kerajinan tradisional lainnya, menjadi daya tarik unik yang mendorong peningkatan permintaan.

- **Kolaborasi dan Kemitraan**
Kemitraan yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas kreatif memainkan peran penting dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di NTT. Kolaborasi dengan industri dan lembaga swasta yang telah dilakukan memungkinkan pelaku ekonomi kreatif mengakses pasar yang lebih luas serta memperluas distribusi produk mereka.
- **Akses Pasar dan Promosi**
Kinerja ekonomi kreatif yang telah capai sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha yang sudah semakin baik dalam mengakses pasar dan melakukan promosi yang efektif. Hal ini ditunjang dengan peran pariwisata sebagai pasar ekonomi kreatif.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kedua indikator terhadap target tahun 2024 adalah sebesar 86,88%. Capaian ini menunjukkan bahwa, meskipun terdapat tantangan dalam memenuhi target kontribusi pariwisata, sektor ekonomi kreatif memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTT.

Sasaran Strategis 3 : Sasaran Strategis 3 :

Sasaran ini mencakup 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel Target dan Capaian Indikator Kinerja								
No	Indikator Kinerja	Satuan	realisasi 2023	2024			RPD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
1.	Realisasi nilai investasi	Triliun		5,3	4,217	79,55	17,2	24,52
2.	Neraca perdagangan	Triliun		-26,7	-51	52,35	-23,05	45,18
Rata-rata Capaian						65,95		34,85

Sumber data: BPS NTT 2023 dan Bappelitbangda Provinsi NTT, diolah

A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. **Realisasi nilai investasi**

a. **Capaian target Realisasi nilai investasi**

Pada tahun 2024, realisasi nilai investasi di NTT mencapai Rp 4,217 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp 5,3 triliun, atau sebesar

79,55% dari target tahunan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 sebesar Rp 17,2 triliun, maka capaian terhadap target akhir ini baru mencapai 24,52%. Capaian yang masih jauh dari target akhir menunjukkan perlunya upaya intensif untuk menarik investasi lebih besar.

b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Beberapa faktor penyebab capaian kinerja realisasi investasi di NTT tahun 2024, antara lain:

- Masih terbatasnya infrastruktur dan tingginya biaya logistik
Keterbatasan infrastruktur dasar seperti akses jalan, listrik, dan telekomunikasi di beberapa wilayah menyebabkan investor kurang tertarik untuk menanamkan modal di NTT. Keterbatasan infrastruktur dengan kondisi geografis NTT turut mengakibatkan tingginya biaya logistic. Hal ini turut menjadi faktor penghambat investasi di daerah.
- Iklim Investasi yang Belum Optimal
Meskipun pemerintah daerah berupaya mendorong investasi, birokrasi dan perizinan yang belum sepenuhnya efektif terimplementasi di lapangan menyebabkan proses investasi berjalan lambat.
- Daya Tarik Sektor Unggulan
Sektor potensial seperti pariwisata, pertanian, dan energi baru terbarukan belum sepenuhnya dikembangkan secara optimal, sehingga tidak mampu menarik investasi besar secara signifikan.
- Produktivitas dan Kualitas Produk Lokal
Rendahnya produktivitas sektor pertanian dan perikanan, serta kualitas produk yang belum memenuhi standar internasional, menjadi penghambat utama dalam meningkatkan ekspor.

2. **Neraca perdagangan**

a. **Capaian Target Neraca perdagangan**

Neraca perdagangan NTT pada tahun 2024 menunjukkan defisit sebesar Rp -51 triliun, lebih besar dari target defisit yang ditetapkan sebesar Rp -26,7 triliun. Dengan demikian, tingkat pencapaian terhadap target 2024 hanya sebesar 52,35%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 yang mengharapkan defisit berkurang menjadi Rp -23,05 triliun, capaian baru mencapai 45,18%. Defisit yang masih tinggi ini menunjukkan tantangan besar dalam meningkatkan ekspor daerah, mengurangi ketergantungan impor, serta mendorong diversifikasi produk unggulan lokal.

b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Beberapa faktor penyebab capaian kinerja Neraca Perdagangan di NTT tahun 2024, antara lain:

- **Ketergantungan pada Barang Impor**
NTT masih sangat bergantung pada pasokan barang kebutuhan pokok, bahan baku industri, dan barang konsumsi dari luar daerah. Hal ini menyebabkan aliran keluar devisa lebih besar dibandingkan pendapatan dari ekspor.
- **Keterbatasan Diversifikasi Produk Ekspor**
Ekspor NTT masih didominasi oleh komoditas primer seperti hasil pertanian (jagung, kopi) dan peternakan (sapi). Kurangnya diversifikasi produk dengan nilai tambah tinggi membatasi pendapatan ekspor.
- **Akses Pasar yang Terbatas**
Kendala geografis dan logistik menyebabkan biaya transportasi tinggi, sehingga produk lokal sulit bersaing di pasar nasional maupun internasional.
- **Produktivitas dan Kualitas Produk Lokal**
Rendahnya produktivitas sektor pertanian dan perikanan, serta kualitas produk yang belum memenuhi standar internasional, menjadi penghambat utama dalam meningkatkan ekspor.
- **Perubahan Iklim dan Bencana Alam**
Cuaca ekstrem dan bencana alam di beberapa wilayah NTT menyebabkan terganggunya produksi sektor pertanian dan perikanan, yang berdampak pada penurunan volume ekspor.

Sesuai penjelasan di atas, rata-rata capaian sasaran strategis ” **Meningkatnya Investasi Dan Neraca Perdagangan**” sebesar 65,95% dengan kategori **Belum Berhasil**.

Sasaran Strategis 4 : Terciptanya Lapangan Kerja Dan Meningkatnya Kesempatan Kerja

Sasaran strategis terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya kesempatan kerja mencakup tiga indikator sebagaimana tabel berikut ini :



Tabel Target dan Capaian Indikator Kinerja							
Indikator Kinerja	Satuan	realisasi 2023	2024			RPD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
Tingkat pengangguran terbuka	%	3,14 Agustus 2023	2,66 – 3,37	3.02 (Agustus 2024)	86.47-110.39	2,25-2,05	65.78-52.68
Capaian					87,79-89,91		

Sumber data: BPS Provinsi NTT, November 2024

A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. **Tingkat pengangguran terbuka**

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

a. **Capaian Target Tingkat Pengangguran Terbuka**

Realisasi tingkat pengangguran terbuka pada bulan Agustus tahun 2024 adalah sebesar 3,02% atau dengan capaian sebesar 110,39% dari target pesimis yang ditetapkan sebesar 3,37%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target optimis sebesar 2,66%, maka tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2024 mencapai 86,47%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada bulan Agustus tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar 0,12%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPD 2024 maka capaian terhadap target pesimis sebesar 65,78% dan capaian terhadap target optimis sebesar 52,68%.
Realisasi TPT nasional pada bulan agustus 2024 adalah sebesar 4,91%. Jika dibandingkan dengan realisasi TTP nasional, TPT Provinsi NTT tahun 2024 lebih rendah 1,89%.

b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Penurunan TPT ini menunjukkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan di NTT. Beberapa faktor yang mendukung perbaikan ini adalah:

- Peningkatan jumlah angkatan kerja
- Peningkatan jumlah pekerja
- Peningkatan jumlah pekerja formal
- Peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Sesuai penjelasan di atas, rata-rata capaian sasaran strategis ” **Terciptanya Lapangan Kerja Dan Meningkatnya Kesempatan Kerja**” sebesar 87,79-89,91% dengan kategori **Sangat Berhasil**.



Sasaran Strategis 5: Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Sasaran strategis meningkatkan daya beli masyarakat mencakup dua indikator sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel Target dan Capaian Indikator Kinerja								
No	Indikator Kinerja	Satuan	realisasi 2023	2024			RPD	
				Target	Realisasi (ribu rupiah)	Capaian (%)	Target Akhir RPD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
1.	Pengeluaran per kapita	Rupiah	8,248	7,598	8,534	112,32	7,954	107,29
2	Inflasi	%	2,42	3,5±1	1,19	166-81	35,1±1	166-81
Rata-rata Capaian						119,71		118.10

Sumber data: BPS Provinsi NTT, Desember 2024

A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. **Pengeluaran per kapita**

Pengeluaran per kapita adalah jumlah uang yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Dengan kata lain, pengeluaran per kapita merupakan instrumen yang digunakan untuk memotret kemampuan rata-rata individu-individu dalam setiap rumah dalam aspek konsumsi.

a. **Pengeluaran per kapita**

Realisasi pengeluaran per kapita pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 8,534 juta per tahun, artinya setiap satu orang di Provinsi NTT setiap tahunnya mampu untuk melakukan pembelian sebesar Rp. 8,534 juta setiap tahunnya atau jika dirubah menjadi per bulan maka tiap orang di Provinsi NTT memiliki kemampuan untuk berbelanja sebesar kurang lebih Rp. 711 ribu, dengan pengeluaran terendah adalah di Kabupaten Sabu Raijua yakni sebesar Rp. 6,207 juta tiap tahunnya. Sedangkan pengeluaran tertinggi adalah sebesar Rp. 14,001 juta yakni di Kota Kupang. Capaian pengeluaran per kapita pada tahun 2024 adalah sebesar 112.32% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 7.598 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar Rp. 286 ribu. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPD 2024 sebesar Rp. 7,954 juta, maka pengeluaran per kapita telah mencapai 107,29%.

Realisasi Pengeluaran per kapita nasional pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 12,34 juta per tahun. Jika dibandingkan dengan realisasi Pengeluaran per kapita nasional, Pengeluaran per kapita Provinsi NTT tahun 2024 masih lebih rendah sebesar Rp. 3,81 juta.

- b. **Faktor-Faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**
- Peningkatan pengeluaran per kapita di Nusa Tenggara Timur (NTT) dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kepadatan penduduk, Pengeluaran pemerintah.

Tabel
Pengeluaran Riil per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota

Wilayah	Pengeluaran Riil per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah)		
	2022	2023	2024
Sumba Barat	7,627	7,993	8,243
Sumba Timur	9,641	10,008	10,280
Kupang	7,776	8,220	8,508
Timor Tengah Selatan	7,118	7,450	7,755
Timor Tengah Utara	6,559	6,889	7,242
Belu	7,593	7,907	8,159
Alor	7,198	7,565	7,806
Lembata	7,622	7,962	8,238
Flores Timur	7,918	8,223	8,505
Sikka	8,362	8,678	9,019
Ende	9,413	9,739	10,009
Ngada	8,997	9,350	9,585
Manggarai	7,580	7,903	8,204
Rote Ndao	6,719	7,061	7,365
Manggarai Barat	7,636	7,913	8,195
Sumba Tengah	6,288	6,484	6,743
Sumba Barat Daya	6,779	7,080	7,358
Nagekeo	8,433	8,706	8,986
Manggarai Timur	6,145	6,276	6,561
Sabu Raijua	5,558	5,899	6,207
Malaka	6,250	6,569	6,879
Kota Kupang	13,513	13,762	14,001
Nusa Tenggara Timur	7,877	8,248	8,534

Sumber data: *BPS Provinsi NTT, November 2024*

2. **Inflasi**

Pengeluaran per kapita adalah jumlah uang yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Dengan kata lain, pengeluaran per kapita merupakan instrumen yang digunakan untuk memotret kemampuan rata-rata individu-individu dalam setiap rumah dalam aspek konsumsi.



a. **Capaian target inflasi**

Realisasi pengeluaran per kapita pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 8,534 juta per tahun, artinya setiap satu orang di Provinsi NTT setiap tahunnya mampu untuk melakukan pembelian sebesar Rp. 8,534 juta setiap tahunnya atau jika dirubah menjadi per bulan maka tiap orang di Provinsi NTT memiliki kemampuan untuk berbelanja sebesar kurang lebih Rp. 711 ribu, dengan pengeluaran terendah adalah di Kabupaten Sabu Raijua yakni sebesar Rp. 6,207 juta tiap tahunnya. Sedangkan pengeluaran tertinggi adalah sebesar Rp. 14,001 juta yakni di Kota Kupang. Capaian pengeluaran per kapita pada tahun 2024 adalah sebesar 112.32% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 7.598 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar Rp. 286 ribu. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPD 2024 sebesar Rp. 7,954 juta, maka pengeluaran per kapita telah mencapai 107,29%.

Realisasi Pengeluaran per kapita nasional pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 12,34 juta per tahun. Jika dibandingkan dengan realisasi Pengeluaran per kapita nasional, Pengeluaran per kapita Provinsi NTT tahun 2024 masih lebih rendah sebesar Rp. 3,81 juta.

b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Inflasi y-on-y Desember 2024 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 9 dari 11 indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,90 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,54 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,01 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,38 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,04 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,36 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,07 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,52 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,59 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok transportasi sebesar 0,13 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,51 persen pada Desember 2024.

Sesuai penjelasan di atas, rata-rata capaian sasaran strategis ” **Meningkatkan Daya Beli Masyarakat**” sebesar 119,71% dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Sasaran Strategis 6 : Menurunnya Kemiskinan Masyarakat

Sasaran ini mencakup satu indikator kinerja sebagai berikut:



Tabel
Target dan Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Menurunnya Kemiskinan Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	2024			RPD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	%	19.96	20-19,63	19,02	104,90-103.11	18,50-17,03	97.19- 88.31
Capaian					104.00		92.75

Sumber data: BPS Provinsi NTT, Desember 2024

A Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1 **Persentase Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan**

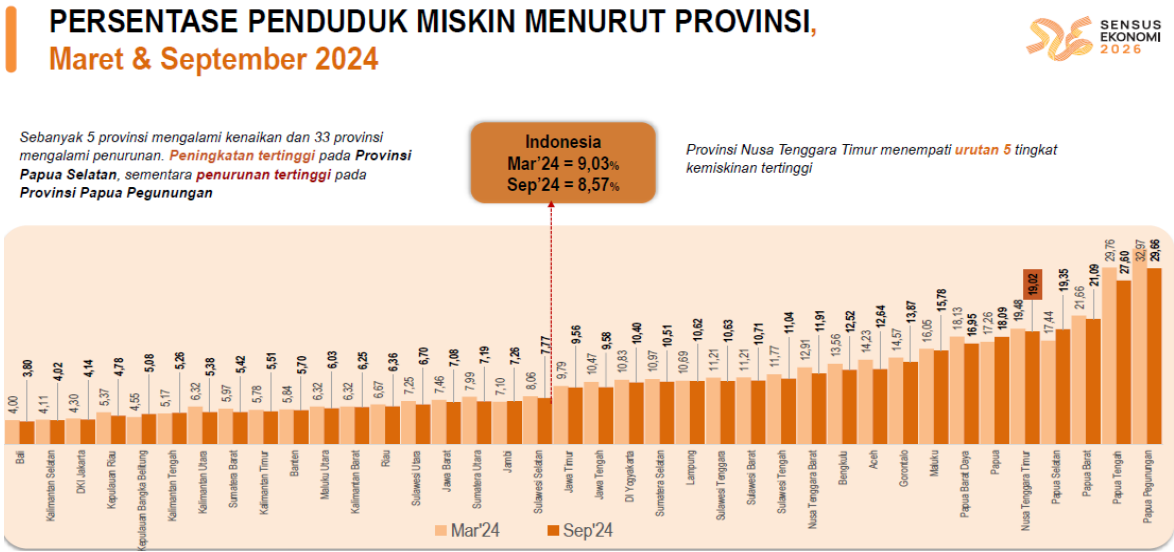
Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan adalah persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori perkapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Semakin sedikit persentase penduduk yang masuk dalam golongan penduduk miskin berarti semakin banyak penduduk yang pengeluaran perkapita perbulannya berada di atas garis kemiskinan dibandingkan dengan kelompok yang pengeluaran perkapita perbulannya berada di bawah garis kemiskinan, dan sebaliknya.

a **Capaian target Persentase Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan**

Jumlah penduduk miskin di NTT adalah 1,11 juta jiwa. Realisasi Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan pada tahun pada September 2024 adalah sebesar 19,02%. Angka ini menurun 0,46% dibandingkan Maret 2024. Jika dibandingkan dengan target pesimis tahun 2024 sebesar 20%, capaian Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan adalah sebesar 104.90%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target optimis tahun 2024 sebesar 19,63%, maka capaian Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan adalah sebesar 103,11%. Jika dibandingkan dengan target pesimis pada akhir RPD sebesar 18,5%, capaian Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan adalah sebesar 97,19%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target optimis pada tahun akhir RPD sebesar 17.03%, capaian Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan adalah sebesar 88,31%.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 24,06 juta orang, dengan persentase 8,57%. NTT merupakan salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Tingkat kemiskinan di provinsi NTT lebih tinggi dari rata-rata tingkat kemiskinan nasional sebesar 10,45%.

Gambar...
Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi



Sumber : BPS Provinsi NTT, September 2024

b **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Daerah miskin pada umumnya selain memiliki akses pada sumber daya ekonomi rendah, juga merupakan daerah dengan tingkat pendidikan rendah, akses terhadap air bersih sulit, dan akses terhadap fasilitas kesehatan rendah. Masalah-masalah kesehatan seperti gizi buruk pada anak-anak juga lebih banyak terdapat di daerah miskin. Kenaikan harga barang mengakibatkan banyak sektor mengalami kontraksi. Kontraksi yang terjadi berkorelasi lurus dengan pendapatan dan kesejahteraan. Pendapatan yang relatif menurun, hasil produksi relatif tetap, jumlah penduduk bertambah dan turunnya daya beli masyarakat meskipun pengaruhnya kecil namun tetap berkontribusi terhadap jumlah penduduk miskin. Penanggulangan dan penanganan kemiskinan harus dilakukan secara kolaboratif dan komprehensif, oleh semua stakeholders, pada setiap level pemerintahan.

Sesuai penjelasan di atas, rata-rata capaian sasaran strategis **"Menurunnya Ketergantungan Ekonomi Masyarakat"** sebesar 104.00% dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Sasaran Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Antara Kelompok

Strategis 7 : Masyarakat

Sasaran ini mencakup satu indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel
Target dan Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	2024			RPD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
Indeks Gini	%	0,325	0,336-0,338	0,316	94,04-93,49	0,332-0,330	105,06 – 104,43
Capaian					93.49		

Sumber data: BPS Provinsi NTT, Desember 2024



A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. **Indeks Gini**

a. **Capaian target pencapaian Indeks Gini**

Indeks Gini menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan dalam Masyarakat di NTT. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi NTT yang diukur menggunakan Gini Ratio adalah dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 0,316. Angka ini menurun 0,009 poin dengan capaian sebesar 94,04% jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,325 dan menurun 0,024 poin sebesar 104,41% . Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada pada Tahun 2024 berada pada kategori tingkat ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat rendah.

b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Indeks gini mengalami perubahan signifikan sejalan dengan penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi NTT dimana pada Tahun 2023 sebesar 19,96% sedangkan pada Tahun 2024 persentase penduduk miskin sebesar 19,48% sehingga mengalami penurunan 0,48%. Permasalahan indeks gini rasio di Provinsi NTT dipengaruhi oleh kondisi disparitas antar wilayah. Disparitas antara perkotaan dan pedesaan yang masih tinggi, sehingga meskipun tingkat kemiskinan menurun, namun disparitas kemiskinan perkotaan dan pedesaan di Provinsi NTT masih tinggi. Tahun 2024, persentase penduduk miskin di pedesaan sebesar 23,02%, sedangkan di perkotaan sebesar 8,11%.

Sesuai penjelasan diatas, rata-rata capaian sasaran strategis “Berkurangnya ketimpangan antar kelompok Masyarakat dan antar wilayah “sebesar 94,04% dengan kategori Sangat Berhasil, sehingga solusi untuk mengatasi disparitas wilayah yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan dalam masyarakat yakni:

1. Menyusun strategi untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur;
2. Pengembangan pelayanan kesehatan dan Pendidikan;
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
4. Pemerataan pembangunan infrastruktur
5. Meningkatkan pendapatan asli daerah

Meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat dengan melakukan pemusatan ekonomi di wilayah-wilayah yang mengalami ketimpangan

Sesuai penjelasan diatas, rata-rata capaian sasaran strategis “Berkurangnya ketimpangan antar kelompok Masyarakat dan antar wilayah “ sebesar 94,04% dengan kategori **Sangat Berhasil**.



Sasaran Strategis 8 : **Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah**

Sasaran ini mencakup satu indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel

Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	realisasi 2023	2024			RPD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
Ratio PAD terhadap pendapatan daerah	%	30,65	31,74	30,21	95,17	26,85	84,59
Rata-rata Capaian					95,17		84,59

Sumber data: LKIP Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Tahun 2024, Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2024 (data belum selesai audit)

A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. **Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan**

a. **Capaian Target Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan**

Target persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebesar 31,74% atau Rp.1.581.781.608.941 dengan realisasi sebesar 30,21% atau Rp.1.461.919.004.072,74 dengan capaian 95,18%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, maka pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,44% atau Rp.119.862.604.868,26,-. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 maka capaiannya sebesar 84,59%.

Target dan Pendapatan Pemerintah Provinsi NTT pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI (Rp)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,581,781,608,941.00	1,461,919,004,072.74
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	1,242,171,027,017.00	1,224,965,044,135,55
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	60,567,956,055.00	26,087,422,087.23
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	37,064,277,605.00	31,749,907,192.00
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	241,978,348,264.00	179,116,630,657,96
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	3,412,809,821,000.00	3,375,772,289,432.00
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3,412,809,821,000.00	3,375,772,289,432.00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2,548,344,000.00	1,988,919,167.00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	2,548,344,000.00	1,988,919,167.00

Sumber data: LKIP Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Tahun 2024, Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2024 (data belum selesai audit)

b. **Faktor- faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Persentase PAD terhadap total pendapatan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,44% sehingga jika dilihat pada Tabel di atas namun jika dilihat dari tabel di atas, jumlah PAD pada tahun 2024



belum mencapai target yang ditetapkan atau hanya mencapai 95,18% dari target yang ditetapkan. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- 1) Menurunnya daya beli masyarakat yang berdampak pada pembayaran pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
- 2) Kebijakan refocusing anggaran berdampak pada belanja modal perangkat daerah yang mendukung obyek retribusi tidak terealisasi;
- 3) Rencana kerja sama dengan pihak ke-3 yang telah dijadikan sebagai obyek penerimaan tidak terealisasi;
- 4) Belum tersedianya Produk Hukum bagi obyek retribusi baru.

Sesuai penjelasan diatas, rata-rata capaian sasaran strategis “Berkurangnya ketimpangan antar kelompok Masyarakat dan antar wilayah “sebesar 94,04% dengan kategori Sangat Berhasil. Dalam rangka mendukung pencapaian peningkatan target Pendapatan Asli Daerah diperlukan solusi sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak;
- 2. Melakukan pengembangan potensi retribusi;
- 3. Melakukan Tax Amnesty;
- 4. Optimalisasi penerimaan sumber-sumber objek pajak baru;
- 5. Pengembangan potensi paariwisata.

Sesuai penjelasan di atas, rata-rata capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah**” sebesar 95,17% dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Sasaran Strategis 9 : Terjaminnya Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak, Disabilitas Dan Inklusi Sosial
Sasaran ini mencakup empat indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel
Target dan Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	realisasi 2023	2024			RPD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
1.	Indeks pembangunan gender	%	92,96	94	93,38	99,34	94,56	100,59
Rata-rata Capaian						99,34		

Sumber data: LKIP DP3A Prov.NTT Tahun 2023



A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Gender

a. Capaian Target Indeks Pembangunan Gender

Realisasi Indeks Pembangunan Gender tahun 2024 sebesar 93,38% dari target yang ditetapkan sebesar 94% atau tercapai 99,34%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar 0,42 poin. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026, Indeks Pembangunan Gender telah mencapai 100,59%.

b. Faktor- faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pencaapaian indikator indeks pembangunan gender antara lain:

- 1. Angka Harapan Hidup yang semakin membaik;
- 2. Peningkatan cakupan pendampingan gender dan
- 3. Adanya Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- 4. Adanya data terpilah gender dan anak;
- 5. Adanya layanan penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan kekerasan

Untuk menunjang pencapaian indeks Pembangunan gender maka anggaran sebesar Rp.202.631.079.282 dari total anggaran Rp.4.322.313.687.267 atau 4,68%.

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata capaian misi “**Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan**” sebesar 92,75 % dengan Kategori **Sangat Berhasil**.

Sasaran Strategis 10 : Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan

Sasaran ini mencakup empat indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel
Target dan Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	realisasi 2023	2024			RPD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
Skor Pola Pangan Harapan	Poin	75.3	85.20	72.38	84.95	95,10	76.10
Rata-rata Capaian					84.95		

A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan

a. Capaian Target Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan

Skor pola pangan harapan menggambarkan tingkat keberagaman konsumsi masyarakat. Adapun angka ideal bagi skor PPH adalah 100 poin. Angka ideal tersebut dicapai pola konsumsi penduduk NTT telah mencapai pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA). Kondisi konsumsi pangan NTT ditinjau dari sisi kuantitas yaitu hasil analisa PPH tahun 2024 berdasarkan angka SUSENAS



dari BPS NTT, konsumsi energy NTT rata-rata 1.930,43 kkal/kap/hari atau 91,92% terhadap angka kecukupan energy 2.100 kkal/kap/hari dan konsumsi protein 55,06 gr/kap/hari atau 96,59% terhadap angka kecukupan protein 57 gr/kap/hari.

- b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**
- Skor PPH provinsi NTT tahun 2024 sebesar 72.38 dari target akhir renstra sebesar 95,1 poin, jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 75,30 poin terjadi penurunan sebesar 2,92 poin. Hal ini disebabkan pola pangan di masyarakat yang belum menerapkan B2SA serta daya beli masyarakat yang masih rendah
- Sesuai penjelasan di atas, rata-rata capaian sasaran strategis “terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan” sebesar 95,24% atau dengan kategori **sangat berhasil**.

- B. **Analisis dukungan Program dan Anggaran dalam pencapaian Misi**
- Keberhasilan Tujuan satu : **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MANDIRI, MAKMUR, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN SOSIAL”** didukung oleh 13 (tiga belas program dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18,567,535,832,- dengan realisasi sebesar Rp. 16,061,544,129,- atau 86,50%

Tabel
Rincian Program, Anggaran dan Realisasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN APBD (Rp)	REALISASI
MISI I			
1	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	196,150,000	-
2	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	10,019,549,850	8,837,344,473
3	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3,789,529,032	3,503,527,799
4	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	221,000,000	117,182,100
5	Penyuluhan Pertanian	648,657,150	472,963,900
6	Penanganan Kerawanan Pangan	96,050,000	-
7	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	200,000,000	-
8	Pemasaran Pariwisata	195,000,000	159,924,275
9	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	375,000,000	354,922,527
10	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1,500,000,000	1,419,797,901
11	Perlindungan Perempuan	1,008,502,800	923,540,664
12	Perlindungan Khusus Anak	318,097,000	272,340,490
TOTAL ANGGARAN		18,567,535,832	16,061,544,129

Sumber: LKIP Perangkat daerah Provinsi NTT tahun 2022



TUJUAN II : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING

Tujuan ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang. Tujuan II diukur dengan capaian pada 2 (dua) sasaran yaitu Meningkatnya akses dan kualitas SDM NTT yang berdaya saing dan Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Kesehatan yang diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Meningkatnya Akses dan Kualitas SDM NTT yang
Strategis 1 : Berdaya Saing

Sasaran ini mencakup 3 (tiga) indikator sebagaimana tabel berikut:

Tabel Target dan Capaian Indikator Kinerja								
No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	2024			RPD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
1.	Indeks Pembangunan Manusia	%	68,40	66,58-66,73	69,14	103,84-103,61	67,02-67,25	103,16-102,81
2.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,82	7,75	8,02	103,48	8,2	97,80
3.	Harapan Lama sekolah	Tahun	13,22	14,2	13,23	93,17	15	88,20
	Rata-rata Capaian Sasaran					100,16		

Sumber : BPS NTT 2024 diolah

A. Analisis terhadap indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

a. **Capaian Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan di semua dimensi pembentuknya, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Namun, pertumbuhan IPM 2024 mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, IPM Indonesia mencapai 75,02, meningkat 0,63 poin atau 0,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 74,39. Dalam Human Development Report 2023/2024 yang dirilis United Nations Development Programme (UNDP), IPM Indonesia berada di angka 112 dunia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 mencapai 69,14, meningkat 0,74 poin (1,08 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (68,40) Peningkatan IPM 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD maka capaiannya sebesar 103,16-102,81.



Tabel
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Tahun 2023-2024

Wilayah	Tahun	
	2023	2024
Sumba Barat	66,82	67,70
Sumba Timur	69,63	70,28
Kupang	67,51	68,26
Timor Tengah Selatan	65,39	66,22
Timor Tengah Utara	66,56	67,27
Belu	67,50	68,13
Alor	66,82	67,70
Lembata	68,41	68,95
Flores Timur	69,24	69,79
Sikka	69,41	69,96
Ende	71,77	72,24
Ngada	71,61	72,04
Manggarai	68,48	69,35
Rote Ndao	65,79	66,40
Manggarai Barat	67,84	68,68
Sumba Tengah	63,63	64,46
Sumba Barat Daya	63,74	64,27
Nagekeo	69,03	69,70
Manggarai Timur	65,05	66,03
Sabu Raijua	61,37	62,06
Malaka	64,50	65,13
Kota Kupang	82,77	83,21
Nusa Tenggara Timur	68,40	69,14

Sumber data:
BPS NTT
2024

b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran untuk mengukur kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM dihitung dengan menggunakan rata-rata geometrik dari tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Peningkatan IPM paling signifikan terjadi pada dimensi pengetahuan. “Harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun meningkat dari 13,22 menjadi 13,23 tahun, sementara rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas naik dari 7,82 tahun menjadi 8,02 tahun. Ini menunjukkan perbaikan akses pendidikan,”.

ada dimensi umur panjang dan hidup sehat, harapan hidup bayi yang lahir tahun 2024 mencapai 71,83 tahun, naik 0,26 tahun dibandingkan 2023. Sedangkan pada dimensi standar hidup layak, rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun meningkat 3,47 persen, yaitu sebesar 286 ribu rupiah.

2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

a. Capaian Target Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau Mean years of schooling (MYS) adalah jumlah tahun yang sudah ditempuh oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dihitung untuk penduduk berusia 15 tahun ke atas. RLS penduduk berumur 15 tahun ke atas di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 sebesar 8,02 tahun, atau mengalami kenaikan 0,20 dari tahun 2023 yang mencapai 7,82 tahun. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 7,75 tahun maka terdapat gap sebesar 0.07 tahun. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD yaitu 8,2 tahun maka capaiannya sebesar 97,80%.

Capaian ini merupakan kontribusi RLS semua kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk NTT
15 Tahun ke atas menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023-2024

No	Kabupaten/Kota	TAHUN		Meningkat/ Menurun
		2023	2024	
Kabupaten				
1	Sumba Barat	6.92	7,17	0,25
2	Sumba Timur	7.57	7.77	0,02
3	Kupang	7.42	7.62	0,02
4	Timor Tengah Selatan	6.97	7,21	0,24
5	Timor Tengah Utara	8.16	8.17	0,01
6	Belu	7.39	7.50	0,11
7	Alor	8.45	8.61	0,16
8	Lembata	8.26	8.27	0,01
9	Flores Timur	8.04	8.06	0,02
10	Sikka	6.98	6.99	0,01
11	Ende	8.20	8.29	0,09
12	Ngada	8.82	8.83	0,01
13	Manggarai	7.63	7.91	0,28
14	Rote Ndao	7.82	7.83	0,01
15	Manggarai Barat	7.94	8,21	0,27
16	Sumba Tengah	7.00	7.23	0,23
17	Sumba Barat Daya	6.38	6.39	0,01
18	Nagekeo	8.14	8.23	0,09
19	Manggarai Timur	7.70	7.96	0,26
20	Sabu Raijua	6.98	6.99	0,01
21	Malaka	7.13	7.14	0,01
Kota				
1	Kota Kupang	11,61	11,64	0,03
Nusa Tenggara Timur		7,82	8,02	0,20

Sumber Data: BPS NTT, 2024

b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

- Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja
- Rata-rata Lama Sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:
- Ekonomi
- Kemiskinan, beban tanggungan keluarga, dan kapasitas fiskal pemerintah daerah
- Sosial
- Budaya memperkerjakan anak, kesadaran masyarakat terhadap pendidikan, dan aksesibilitas
- Infrastruktur
Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta jarak tempuh sekolah
- Kebijakan pemerintah
Kebijakan pemerintah terkait pendidikan, seperti zonasi dan afirmasi pada proses PPDB
- Sumber daya
Ketersediaan sumber daya dan dana untuk pendidikan, serta kuantitas dan kualitas guru

Capaian RLS penduduk di NTT sebesar 8,02 pada tahun 2024 sebenarnya masih berada jauh di bawah standar 15 tahun yang dianjurkan PBB. Kenyataan ini sesuai dengan temuan bahwa angkatan kerja NTT didominasi oleh lulusan SD. Ini berarti jumlah tamatan SD yang melanjutkan ke SMP juga tidak banyak sehingga kecenderungan ini akan mengerucut ke atas. Data ini menunjukkan adanya celah cukup besar di antara APK dan APM bagi anak dan pemuda di NTT yang harus diintervensi pemerintah. Terutama bagi kelompok usia yang dapat memenuhi 15 tahun RLS di NTT.

3. **Harapan Lama Sekolah (HLS)**

a. **Capaian target Harapan Lama Sekolah (HLS)**

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dicapai oleh anak pada usia tertentu di masa depan. HLS dihitung untuk anak usia 7 tahun ke atas.

HLS Provinsi NTT pada tahun 2024 sebesar 13,23 tahun, naik 0,01 dibanding capaian tahun 2023 yaitu 13,22. Realisasi tahun 2024 belum mencapai target RLS Nasional sebesar 15 tahun. Pada akhir RPD diharapkan angka HLS dapat mencapai 15 tahun sehingga perlu upaya mengejar ketertinggalan gap sebesar 1,77 tahun. Angka HLS dan RLS: merupakan dua komponen utama penentu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mewakili dimensi pendidikan. Pada target ini, diharapkan angka kelulusan baik SD, SMP, maupun SMA di NTT mengalami peningkatan. Secara langsung, ketika tingkat kelulusan SD, SMP dan SMA meningkatkan maka angka HLS dan RLS yang merupakan dua indikator penghitungan IPM akan ikut meningkat. HLS Provinsi NTT merupakan kontribusi HLS kabupaten/kota yang dapat digambarkan tahun 2023 dan 2024 pada tabel berikut.

Tabel
 Harapan Lama Sekolah Penduduk NTT
 15 Tahun ke atas menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023-2024

No	Kabupaten/Kota	TAHUN		Meningkat/ Menurun
		2023	2024	
Kabupaten				
1	Sumba Barat	13.26	13.40	0,14
2	Sumba Timur	12.86	12.87	0,01
3	Kupang	13.89	13.90	0,01
4	Timor Tengah Selatan	12.61	12.62	0,01
5	Timor Tengah Utara	13.35	13.36	0,01
6	Belu	12.31	12.32	0,01
7	Alor	12.28	12.48	0,02
8	Lembata	12.46	12.47	0,01
9	Flores Timur	12.95	12.96	0,01
10	Sikka	13.66	13.67	0,01
11	Ende	13.82	13.83	0,01
12	Ngada	12.74	12.75	0,01
13	Manggarai	13.71	13.73	0,02
14	Rote Ndao	13.22	13.23	0,01
15	Manggarai Barat	12.53	12.54	0,01
16	Sumba Tengah	13.13	13.14	0,01
17	Sumba Barat Daya	13.10	13.11	0,01
18	Nagekeo	12.59	12.69	0,01
19	Manggarai Timur	12.59	12.66	0,07
20	Sabu Raijua	13.18	13.19	0,01
21	Malaka	12.82	12.83	0,01
Kota				
1	Kota Kupang	16,44	16,54	0,01
Nusa Tenggara Timur		13,22	13,23	0,01

Sumber Data: BPS NTT, 2023

b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Data ini menunjukkan bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun di NTT yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,23 tahun atau setara dengan Diploma I. Kontribusi terbesar tidak tercapainya target HLS tahun 2024 disumbang oleh angka HLS Kabupaten Belu, Alor dan Lembata.

B. **Analisis Program dan Anggaran Perangkat Daerah yang Menunjang Pencapaian Target Kinerja**

Pencapaian sasaran ini didukung oleh 7 (tujuh) Program dengan dukungan anggaran sebesar: Rp.889.775.851.065,- (delapan ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam puluh lima rupiah). Realisasi Rp.314.313.041.688 (tiga ratus empat belas miliar tiga ratus tiga belas juta empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) atau mencapai 35,32% dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, melalui 6 (enam) program dengan rinciannya sebagai berikut:



Tabel Program, anggaran dan realisasi					
No	Program	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian	Perangkat Daerah
1.	Pengelolaan Pendidikan	881.879.215.865	306.760.504.644	34,78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Pengembangan Kurikulum	765.194.600	611.813.250	79,96	
3.	Pengembangan Kebudayaan	2.453.149.800	2.375.411.010	98,83	
4.	Pengembangan Kesenian Tradisional	2.988.572.800	2.875.594.784	96,23	
5.	Pembinaan Sejarah	145.480.000	145.480.000	100	
6.	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1.544.238.000	1.544.238.000	100	
Jumlah		889.775.851.065	314.313.041.688	35,32	

Sumber: LKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT tahun 2024

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Capaian sasaran Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan diukur melalui dua indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel Target dan Capaian Indikator Kinerja								
No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	2024			RPD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	67,77	69	71,83	104,1	69	104,10
2.	Prevalensi Stunting	%	28,7	12	16,9	59,17	9-8,5	12,2-11,76
Rata-rata Capaian Sasaran						81,64		

Sumber data: BPS NTT 2024

A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. **Usia Harapan Hidup**

a. **Capaian target Usia Harapan Hidup**

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu komponen pembentuk IPM sekaligus sebagai indikator dampak peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Usia Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan terus hidup atau rata-rata jumlah tahun yang dijalani seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang Tahun ke-X.



UHH masyarakat Nusa Tenggara Timur tahun 2024 adalah 71,83 tahun atau mencapai 104,1 % dari target akhir RPD yaitu 69 tahun dan mengalami kenaikan 4,3 poin dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 67,47 tahun. Jika dibandingkan dengan UHH Tingkat Nasional sebesar 72,39 maka terjadi gap sebesar 0,56 tahun dengan capaiannya sebesar 99,23 %.

UHH Provinsi NTT merupakan kontribusi dari UHH Kabupaten/Kota di NTT sebagaimana tabel berikut :

Tabel
Usia Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota di NTT Tahun 2023-2024

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Umur Harapan Hidup Life Expectancy At Birth (Year)	
	2023	2024
Sumba Barat	71,16	71,37
Sumba Timur	71,31	71,57
Kupang	69,24	69,53
Timor Tengah Selatan	71,02	71,22
Timor Tengah Utara	70,75	71,02
Belu	73,97	74,30
Alor	70,55	70,88
Lembata	73,00	73,35
Flores Timur	73,57	73,91
Sikka	73,97	74,24
Ende	72,74	72,87
Ngada	74,12	74,43
Manggarai	72,20	72,44
Rote Ndao	69,55	69,81
Manggarai Barat	72,59	72,86
Sumba Tengah	69,21	69,46
Sumba Barat Daya	68,99	69,20
Nagekeo	72,24	72,51
Manggarai Timur	72,79	72,98
Sabu Raijua	66,46	66,65
Malaka	71,28	71,47
Kota/Municipality		
Kota Kupang	74,66	74,95
Nusa Tenggara Timur	71,57	71,83

Sumber Data: BPS NTT 2024, diolah

b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi NTT untuk meningkatkan UHH melalui program Pembangunan Kesehatan melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan termasuk Kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori serta pemberantasan kemiskinan.

2. **Prevalensi Stunting**

a. **Capaian Target Prevalensi Stunting Menurut Data BPS**

Target Prevalansi stunting tahun 2024 di Provinsi NTT adalah 12% sedangkan realisasinya sebesar 16,9% (Data BPS) sehingga capaiannya

59,17%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 28,7% maka terjadi penurunan sebesar 11,8%. Namun jika dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 9-8,5% maka terdapat gap sebesar 7,9-8,4 % di tahun 2024.

Indikator ini mengukur persentase anak balita yang tingginya di bawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak, dan bukti menunjukkan bahwa efek dari stunting pada usia muda, khususnya pada perkembangan otak, sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima gizi yang tepat. Prevalensi stunting Provinsi NTT merupakan kontribusi dari kabupaten dan kota di NTT sebagaimana tabel berikut :

Tabel
Prevalensi Stunting menurut Kabupaten/Kota di NTT Tahun 2023-2024

No	Kabupaten/Kota	2023		2024	
		Stunting	%	Stunting	%
1	Sumba Barat	1291	12	1787	23,6
2	Sumba Timur	2677	12	3365	15,1
3	Kupang	3872	13	3902	14
4	Timor Tengah Selatan	8924	22	9251	24,2
5	Timor Tengah Utara	4555	23	4802	25,9
6	Belu	1984	11	2351	13,9
7	Alor	1773	10	2260	13,1
8	Lembata	1045	12	673	7,9
9	Flores Timur	3184	18	3265	20
10	Sikka	3318	15	3375	19,3
11	Ende	1241	7	1796	10,5
12	Ngada	902	8	997	9,8
13	Manggarai	3481	13	2882	11,5
14	Rote Ndao	2764	20	2359	18,4
15	Manggarai Barat	1901	8	2608	11,8
16	Sumba Tengah	549	7	1036	15,3
17	Sumba Barat Daya	9762	32	6730	39,2
18	Nagekeo	728	7	928	9,6
19	Manggarai Timur	2195	9	1992	8,3
20	Sabu Raijua	1230	15	1626	20,8
21	Malaka	2409	16	2289	15,4
22	Kota Kupang	4019	17	4233	18,8
Provinsi NTT		63804	15	64507	16,9

Sumber Data: BPS NTT 2024



b. **Capaian Target Prevalensi Stunting Menurut Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI)**

Evaluasi status gizi balita secara nasional dilakukan dalam suatu survei yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Survei nasional terkait evaluasi status gizi yang terakhir dilaksanakan yaitu Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menggunakan metode pengukuran antropometri berat badan dan tinggi badan. Riskesdas dilaksanakan setiap lima tahun sekali, sedangkan pemerintah memerlukan monitoring dan evaluasi status gizi stunting balita setiap tahun berdasarkan indikator output intervensi gizi spesifik dan sensitif di tiap kabupaten/kota. Oleh karena itu sejak tahun 2019-2024 dilaksanakan SSGI untuk mengukur status gizi balita dan juga untuk menilai keberhasilan kinerja presiden dalam penanganan stunting tiap tahun.

Pada tahun 2024 target penurunan Stunting sebesar 12% menurut perhitungan e-PPGBM, namun dengan terbitnya hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 maka kebijakan nasional menyeragamkan target stunting berdasarkan hasil SKI tersebut, sehingga untuk tahun 2024 target penurunan stunting sebesar 35,5%. Sedangkan realisasi prevalensi Stunting tahun 2023 menurut SKI sebesar 37,9% selisih 2,2% dari target atau capaian 28,7% atau 29%. Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023 prosentase stunting di Indonesia sebesar 21,5% dan di Provinsi NTT prosentase stunting sebesar 37,9% mengalami kenaikan sebesar 2,4% jika dibandingkan dengan SSGI tahun 2022 yaitu sebesar 35,5%. Target Nasional tahun 2025 stunting mencapai 18,8% dan untuk Provinsi NTT sebesar 33,1%. Berdasarkan data ePPGBM tahun 2024 bulan Agustus capaian prosentase stunting di NTT adalah 18,3%.

Di Provinsi NTT untuk hasil SKI tahun 2023 prosentase stunting tertinggi adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 50,1 % dan terendah adalah Kabupaten Ngada yaitu sebesar 21,3 %. Ada tujuh kabupaten di Provinsi NTT yang prosentase stunting diatas 40 % yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan (50,1 %); Kabupaten Belu (48,1 %); Malaka (47,7 %), Sumba Barat Daya (44,3 %), Timor Tengah Utara (42,7 %) dan Sumba Barat (42,5 %) yang terendah selain Kabupaten Ngada adalah Nagekeo (24,9 %). Untuk sebaran data balita stunting di NTT dari 22 kabupaten/kota yang prosentasenya diatas 20 38 % ada sebanyak tiga kabupaten yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu 37,3%,

Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 25,9% dan Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 37,3%. Sedangkan kabupaten yang prosentase stunting antara 0 - 10 % ada 5 (lima) kabupaten yaitu Kabupaten Lembata (7,2%); Ende (7,8%), Ngada (9,8%), Nagekeo (8,8%), dan Manggarai Timur (8,5%).

Angka Prevalensi Stuting Berdasarkan Hasil SKI Tahun 2023 dapat terlihat pada table berikut ini.

Tabel
Situasi Stunting Provinsi NTT Tahun 2021 - 2023, SSGI & SKI

No	Kabupaten/Kota	SSGI 2021	SSGI 2022	SKI 2023	Target NTT (SSGI) 2023	Tren SSGI 2022 – SKI 2023
1	2	3	4	5	6	7=(4-5)
1.	Kab. Sumba Barat	37,0	36,0	42,5	27,1	NAIK
2.	Kab. Sumba Timur	28,8	32,2	26,3	21,2	TURUN
3.	Kab. Kupang	40,4	38,4	38,4	27,9	TETAP
4.	Kab. Timor Tengah Selatan	48,3	45,2	50,1	36,2	NAIK
5.	Kab. Timor Tengah Utara	46,7	38,7	42,7	34,7	NAIK
6.	Kab. Belu	39,9	36,6	48,1	29,3	NAIK
7.	Kab. Alor	44,8	36,7	39,3	33,4	NAIK
8.	Kab. Lembata	31,7	31,8	35,1	23,1	NAIK
9.	Kab. Flores Timur	23,4	27,4	37,2	17,4	NAIK
10.	Kab. Sikka	26,6	32,7	33,3	19,9	NAIK
11.	Kab.Ende	27,2	35,1	27,5	20,4	TURUN
12.	Kab.Ngada	29,0	31,2	21,3	21,3	TURUN
13.	Kab.Manggarai	33,1	33,7	36,8	24,5	NAIK
14.	Kab.Rote Ndao	40,1	38,4	39,8	28,1	NAIK
15.	Kab.Manggarai Barat	38,5	38,9	36,2	27,9	TURUN
16.	Kab.Sumba Tengah	30,4	29,6	39,5	24,9	NAIK
17.	Kab.Sumba Barat Daya	44,0	39,8	44,3	24,8	NAIK
18.	Kab.Nagekeo	28,1	30,5	24,9	20,8	TURUN
19.	Kab.Manggarai Timur	42,9	40,5	43,7	31,8	NAIK
20.	Kab.Sabu Raijua	33,9	30,6	36,9	23,9	NAIK
21.	Kab.Malaka	31,4	32,9	47,7	23,0	NAIK
22.	Kota Kupang	26,1	19,2	29,9	18,8	NAIK
Nusa Tenggara Timur		37,8	35,3	37,9	26,1	NAIK

Sumber : SSGI 2021, SSGI 2022 & SKI 2023

c. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Keberhasilan penurunan Prevalensi stunting di Provinsi NTT dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan berbagai upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Prevalensi stunting menjadi prioritas dari RPJMD / RPD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kolaborasi lintas sektor dan kolaborasi bersama pemerintah daerah Kab/Kota,

pengembangan inovasi pencegahan stunting, kerjasama dengan Badan PBB baik bilateral dan orientasi sosial kemasyarakatan dan lembaga keagamaan serta adanya dukungan dana desa.

B. Analisis program, anggaran dan perangkat daerah yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja

Pencapaian sasaran ini didukung oleh 3 (tiga Program dengan dukungan anggaran sebesar: Rp. 180.628.270.659 (*seratus delapan puluh milyar enam ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu enam ratus lima puluh Sembilan rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 161.450.455.326,48 (*Seratus enam puluh satu milyar empat ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah empat puluh delapan sen*) atau mencapai 89,38%, sebagaimana tabel berikut.

Tabel
Program, anggaran dan realisasi

No	Program	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian %	Perangkat Daerah
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	134.607.571.703	127.984.879.175	97	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil
2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	18.898.460.100	13.026.708.546,93	68,93	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	248.586.000	216.443.830,2	87,07	
	Jumlah	153.754.617.803	141.228.031.551	91,85	

Sumber: LKIP Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil 2024

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata capaian sasaran “**Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan**” sebesar **81,64%** dengan kategori **Berhasil**.

Tujuan 3 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN DENGAN MEMPERHATIKAN ASPEK LINGKUNGAN HIDUP, KEWILAYAAN DAN MITIGASI BENCANA

Sasaran Strategis 1 : Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sasaran ini, mencakup dua (2) indikator sebagai berikut:

Tabel Target dan Capaian Indikator Kinerja								
No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	2024			RPD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
1.	Presentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	73,25 (1.941,125 Km) 73,27 % (1.969,04 Km) data survey kondisi akhir tahun 2023	86,86 (2.334,20 Km) 73,78 (1.955,365 Km) (ruas jalan provinsi 2.687,31 Km)				
2.	Ratio elektrifikasi	%	95,27	93	96,35	103,60	95	101,42
Rata-rata Capaian						94,27		

Sumber data: LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun 2024 dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT Tahun 2024

A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. **Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap**
 - a. **Capaian Target Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap**

Pada tahun 2024 target persentase panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap 2.334,20 Km atau 86,86%, realisasi 1.955,365 Km atau 73,78% dari total panjang jalan provinsi sepanjang 2.650 km. Untuk mendapatkan data kondisi jalan mantap Tahun 2024 telah dilakukan survey kondisi jalan kewenangan provinsi di akhir tahun 2024 ditambah penanganan tahun 2024. Kondisi jalan mantap sepanjang 1.827,07 Km atau 67,98% terdiri dari kondisi baik sepanjang 1.233,28 Km atau 45,90% dan kondisi sedang sepanjang 593,79 Km atau 22,09%, sedangkan kondisi jalan tidak mantap sepanjang 18,23 Km atau 26,3% terdiri dari rusak ringan sepanjang 342,53 Km atau 12,75% dan rusak berat sepanjang 517,71 Km atau 19,27%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 73,25% atau 1.941,125km , maka terjadi peningkatan jalan mantap sebesar 0,61% atau 14.24 km. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2026 sebesar 86,86% atau 2.334,20 Km maka capaian panjang jalan provinsi kondisi mantap baru mencapai 2.251,169 km Km (84,94%).
 - b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Berdasarkan capaian indikator kinerja menunjukkan bahwa realisasi terhadap indikator Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi

mantap belum mencaai target, adapun kendala yang menyebabkan belum tercapainya target presentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap antara lain disebabkan oleh :

1. Konektivitas antar wilayah di dalam daerah dan keluar daerah belum berjalan baik, karena capaian target pembangunan infrastruktur jalan yang rendah dan kurangnya pemeliharaan jalan.
2. Terjadinya penurunan panjang jalan dalam kondisi mantap secara umum disebabkan oleh pola pelaksanaan kegiatan penanganan jalan yang kurang efektif/efisien dimana tidak teralokasinya anggaran yang cukup untuk kegiatan pemeliharaan jalan dan lebih berfokus pada kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi.
3. Berdasarkan data penanganan jalan Provinsi tahun 2024 dana pemeliharaan jalan (kondisi mantap) jumlah dana teralokasi sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan, hal ini berkaitan dengan kemampuan fiskal daerah.
4. Beban pemerintah Provinsi dalam mewujudkan konektivitas yang baik membutuhkan biaya besar dan rentang kendali dalam penyelenggaraan jalan relative luas, menyebabkan pelaksanaan konstruksi, pengendalian dan pengawasan kurang optimal.

c. Solusi

1. Secara simultan mengusulkan anggaran untuk rekonstruksi jalan/ peningkatan jalan terhadap GO dan GO Plus yang telah dibangun sesuai anggaran yang tersedia dan peningkatan kapasitas penyedia jasa akan dikoordinasikan dengan asosiasi terkait.
2. Penambahan panjang ruas jalan dalam penanganan lebih ditingkatkan untuk memenuhi target yang ditetapkan.
3. Terkait kerusakan dini pada konstruksi GO atau GO Plus sesuai skenario penanganan jalan tuntas yang telah diajukan maksimal 2 (dua) tahun sudah harus ditingkatkan dengan perkerasan berpenutup aspal.

2. **Rasio Elektrifikasi**

a. **Capaian Target Rasio Elektrifikasi**

Target Rasio Elektrifikasi pada tahun 2024 sebesar 93%, dengan realisasinya sebesar 96,35% atau mencapai 103,60%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 95,27%, maka realisasi Rasio Elektrifikasi di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,13%. Jika dibandingkan dengan target tahun terakhir RPD 2026 sebesar 95%, maka capaian realisasi Rasio Elektrifikasi sudah melebihi target yaitu sebesar 101,42%.



b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Berdasarkan capaian indikator kinerja menunjukkan bahwa realisasi terhadap indikator rasio elektrifikasi meningkat dari target yang ditetapkan, adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini pada tahun 2024, yaitu :

- Melakukan verifikasi dan sinkronisasi data antara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan BAPPENAS yaitu terkait data 3T dan Kementerian Sosial terkait Basis Data Terpadu (BDT) yang nantinya menjadi rujukan untuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan hibah bantuan meter gratis bagi masyarakat tidak mampu di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun jumlah penerima bantuan meteran gratis sebanyak 145 unit, antara lain di Kabupaten Sabu Raijua sebanyak 60 unit, Kabupaten Kupang sebanyak 40 unit dan Kabupaten TTS sebanyak 45 unit.
- Melaksanakan belanja hibah instalasi sambungan rumah bagi masyarakat tidak mampu di 10 kabupaten sebanyak 1.035 unit.

B. Analisis Program, Anggaran dan Perangkat Daerah yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, Pemerintah Provinsi NTT menetapkan 2 (dua) Program yaitu Program Penyelenggaraan Jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT. Rincian terkait jumlah program, alokasi dan realisasi dana menurut Perangkat Daerah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel
Jumlah Program, Jumlah Dana (alokasi dan realisasi)
menurut Perangkat Daerah

No.	Nama Perangkat Daerah	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Program Penyelenggaraan Jalan	107.123.364.804,-	98.875.991.607,-	92,30
2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Program Pengelolaan Kelistrikan	2.701.819.000,-	565.579.818,-	20,93

Sumber: LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2024

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata pencapaian sasaran strategis “Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan



pelayanan dasar” sebesar **94,27%**. Pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh pelaksanaan 2 (dua) program yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 107.123.364.804,- dengan realisasi sebesar Rp. 98.875.991.607,- atau mencapai 92,30% dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.701.819.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 565.579.818,- atau mencapai 20,93%. Berdasarkan data rerata realisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi NTT **Sangat Berhasil** mencapai sasaran strategis pada target akhir RPD Tahun 2026.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Daerah

Sasaran ini didukung satu indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel
Target dan Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	2024			RPD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
1.	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	74,18	79,87 <i>Target ditetapkan pada saat Rakortekbang dengan Birocan KLHK untuk IKLH 2024</i>	75	93,90	74,28	100,96
Rata-rata Capaian						93,90		

Sumber data: LKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, 2024

A. Analisis terhadap indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

a. Capaian Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pada tahun 2024 target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 79,87 poin, realisasi sebesar 75 poin atau mencapai 96,35%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 74,18 poin, maka capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,82 poin. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD 2026 sebesar 74,28 poin maka capaiannya sebesar 100,96%.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Berdasarkan capaian indikator kinerja menunjukkan bahwa realisasi terhadap indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengalami



peningkatan, adapun upaya yang dilakukan, adalah : Pemanfaatan perhutanan sosial dan MHA; Cakupan penanaman lahan kritis; Perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA; Pengolahan limbah B3; Pemanfaatan dokumen lingkungan hidup dan pelayanan pengujian laboratorium.

Upaya ini secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut dan penutupan lahan yang berpengaruh langsung terhadap nilai Indeks kualitas lingkungan hidup.

B. Analisis Program, Anggaran dan Perangkat Daerah yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas tata ruang dan lingkungan hidup daerah, Pemerintah Provinsi NTT menetapkan Program Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Rincian terkait jumlah program, alokasi dan realisasi dana menurut Perangkat Daerah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel
Jumlah Program, Jumlah Dana (alokasi dan realisasi)
menurut Perangkat Daerah

No.	Nama Perangkat Daerah	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	740.854.120,-	578.644.756,-	78,11

Sumber: LKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata pencapaian sasaran strategis “meningkatnya kualitas tata ruang dan lingkungan hidup daerah” sebesar **93,90%**. Pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh pelaksanaan 1 (satu) program oleh 1 (satu) Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 740.854.120,- dan realisasi sebesar Rp. 578.644.756,- atau mencapai 78,11%. Berdasarkan data rerata realisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi NTT **Sangat Berhasil** mencapai sasaran strategis pada target akhir RPD Tahun 2026.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Ketangguhan Bencana Daerah dan Adaptasi Terhadap Perubahan Lingkungan

Sasaran ini mencakup 1 (satu) indikator sebagai berikut:



Tabel
Target dan Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	2024			RPD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPD	Capaian Terhadap Target Akhir RPD 2026
1.	Indeks resiko bencana	Poin	139,23	134	132	101,49	135	102,98
Rata-rata Capaian						101,49		

Sumber data: LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2024

A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Indeks Risiko Bencana

a. Capaian Target Indeks Risiko Bencana

132 poin atau sebesar 101.49%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 139,23 poin, maka capaian indeks risiko bencana di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 7,23 poin. Jika dibandingkan dengan Target Akhir RPD 2026 sebesar 135 poin maka capaiannya sebesar 102,98%.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Berdasarkan capaian indikator kinerja menunjukkan bahwa realisasi terhadap indikator Indeks Risiko Bencana mengalami penurunan. Hal ini berdampak pada peningkatan kinerja indeks resiko bencana. Peningkatan kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain:

Membangun kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana dengan membuat pedoman/dokumen penanganan ancaman bencana pada saat tanggap darurat bencana agar berlangsung cepat dan efektif melalui pengerahan memobilisasi sumber daya semua pemangku kepentingan (stakeholders) untuk memberi perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dengan membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermwanaan.

Pemasangan rambu peringatan dini bencana di 5 (lima) Kabupaten yaitu :

1. Kabupaten Malaka sebanyak 15 Buah;
2. Kabupaten Lembata sebanyak 15 Buah;Kabupaten Kupang sebanyak 10 buah;
3. Kabupaten TTS sebanyak 10 buah;dan
4. Kabupaten Rote Ndao sebanyak 14 buah.
 - Membentuk Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebanyak 150 Desa/Kelurahan di 13 Kabupaten dan 1 Kota.
 - Melatih 85 orang di BPBD Kabupaten TTS, TTU, Belu, Malaka,



Rote Ndao, Sumba Timur, Ende, Ngada. Pelatihan yang dilakukan adalah pemberian pembekalan pengetahuan gladi simulasi dan praktek di lapangan.

- Mendistribusi Buffer Stock Logistik di 13 Kabupaten/Kota diantaranya adalah :
 1. Kabupaten Kupang (500 Kg Beras);
 2. Kabupaten TTS (500 Kg Beras);
 3. Kabupaten TTU (500 Kg Beras);
 4. Kabupaten Belu (500 Kg Beras);
 5. Kabupaten Rote Ndao (500 Kg Beras);
 6. Kabupaten Sabu Raijua (500 Kg Beras);
 7. Kabupaten Malaka (500 Kg Beras);
 8. Kabupaten Flores Timur (500 Kg Beras);
 9. Kabupaten Ende (500 Kg Beras);
 10. Kabupaten Sumba Barat Daya (500 Kg Beras);
 11. Kabupaten Manggarai (500 Kg Beras);
 12. Kabupaten Manggarai Barat (500 Kg Beras);dan
 13. Kabupaten Sumba Timur (500 Kg Beras).

B. Analisis Program, Anggaran dan Perangkat Daerah yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan, Pemerintah Provinsi NTT menetapkan Program Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Rincian terkait jumlah program, alokasi dan realisasi dana menurut Perangkat Daerah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel
Jumlah Program, Jumlah Dana (alokasi dan realisasi)
menurut Perangkat Daerah

No.	Nama Perangkat Daerah	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	1.233.524.400,-	1.153.721.045,-	93,53

Sumber: LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2024

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan” sebesar 101,49%. Pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh pelaksanaan 1 program oleh 1 perangkat daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.233.524.400,- dan realisasi sebesar Rp. 1.153.721.045,- atau mencapai 93,53%. Berdasarkan data rerata realisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi NTT Sangat Berhasil mencapai sasaran strategis pada target akhir RPD Tahun 2026.



Tujuan 4 : MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Reformasi birokrasi merupakan kunci kemajuan pemerintah, karena menjadi jalan utama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta melakukan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital, efektif, lincah dan kolaboratif. Reformasi birokrasi merupakan transformasi segenap aspek dalam manajemen pemerintah menuju manajemen yang berkualitas tinggi dan terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Keberhasilan pelaksanaan tujuan keempat Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT tahun 2024-2026 diukur dengan pencapaian target kinerja dari sasaran strategis Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Sasaran strategis tersebut mencakup 7 (tujuh) indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Sasaran MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA
Strategis 1: PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG BERORIENTASI PELAYANAN, AKUNTABEL, KOMPETEN, HARMONIS

Capaian sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat diukur melalui 7 (Tujuh) indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel Target dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 5 RPD 2024-2026								
No	Indikator Kinerja	Satuan	Data 2023	2024			Target Akhir RPD	Capaian Terhadap RPD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	66,18	64	76,65	119,76	67	114,40
2.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP (100)	WTP	WTP
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Predikat	Predikat B 64,59	Predikat A (>80-90)	63,68 Predikat B	79,6-70,75	Predikat A (>80-90)	79,6-70,75
4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	3,83	2,3	3,89	169,13	2.7	144,07
5.	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	76,99	85	94,30 (Informatif)	110,94	95	99,26
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	86,32	85	86,32*) (Baik)	101,55	90	95,91
7.	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin	77,83	83	77,83*)	93,77	83	93,77
Rata-rata Capaian Sasaran						109,14 (Sangat Baik)		

Sumber data: Biro Organisasi Setda Provinsi NTT, BPS NTT, Badan Keuangan, dan Dinas Komunikasi dan Informatika, diolah
*) data tahun 2023

A. Analisis terhadap capaian indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi

a. Capaian Target Indeks Reformasi Birokrasi

Target Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 sebesar 64,00 poin dengan realisasi sebesar 76,65 poin atau mencapai 119% dari target. Hasil evaluasi ini



mempedomani Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dengan menggunakan metode *double track* yaitu Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 67,00 poin maka terjadi peningkatan kinerja sebesar 9,65 poin atau 114%.

b. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Indikator Kinerja**

Realisasi nilai indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 melampaui target, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2024-2026 sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023.
- 2) Seluruh kegiatan utama pada rencana aksi RB general yang diamanatkan dalam Road Map RB Nasional telah terkawal. indikator kegiatan utama yang ditetapkan sebenarnya sudah melihat baseline/realisasi tahun sebelumnya.
- 3) Penyusunan rencana aksi RB tematik telah mengakomodir penyusunan kerangka logis didalamnya.
- 4) Adanya komitmen pimpinan dalam menetapkan target capaian reformasi birokrasi yang jelas.
- 5) Implementasi rencana aksi dalam unit kerja, dan
- 6) Pemilihan program berdampak pada capaian sasaran RB.

2. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

a. **Capaian Target Opini BPK**

Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dirilis oleh BPK-RI tahun 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini sesuai dengan target pemerintah provinsi NTT yakni WTP. Jika dibandingkan dengan target WTP pada tahun terakhir RPD tahun 2026, capaian kinerja tahun 2024 telah memenuhi target.

b. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Indikator Kinerja**

Realisasi opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 mencapai target WTP. Pemberian opini ini merupakan bentuk apresiasi terhadap laporan keuangan



pemerintah Provinsi NTT. Beberapa catatan terhadap pengelolaan keuangan daerah tahun 2024 yang perlu ditindaklanjuti sebagai berikut:

- 1) Rendahnya pengendalian internal masing-masing PD;
- 2) Kurangnya komitmen manajemen dalam melakukan rekomendasi hasil pengawasan.

Solusi :

Diklat penjenjangan bagi pejabat fungsional auditor maupun P2UPD.

Hal-hal yang mendasari Opini WTP oleh BPK-RI yang di terima oleh Pemerintah Provinsi antara lain disebabkan oleh :

- 1) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT tahun 2023 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua telah ditetapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan,
- 2) Pelaksanaan program kegiatan dan pelaporan keuangan tahun 2023 telah dilaksanakan dengan efektif.

3. Nilai Akuntabilitas Kinerja

a. **Capaian Target Nilai Akuntabilitas Kinerja**

Target nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 adalah Predikat A (>80-90) dengan realisasi sebesar Predikat B (63,86) atau mencapai 79,6-70,75%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 64,59 (B) maka terjadi penurunan sebesar 0,91 poin atau turun sebesar -1,12%. Jika dibandingkan dengan target tahun terakhir RPD Predikat A (>80-90), maka terdapat gap sebesar 16,14-26.32 poin.

b. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Indikator Kinerja**

Realisasi nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 belum mencapai target, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, masih ditemukan kinerja yang belum berorientasi pada hasil dan belum spesifik sehingga menimbulkan dwimakna.
- 2) RPD yang disusun belum disertai dengan indikator tujuan sehingga ketercapaian kondisi akhir periode RPD belum terlihat;
- 3) Pada dokumen rencana strategis dan PK PD, belum seluruhnya kinerja berorientasi hasil (outcome) dengan indikator kinerja yang *specific, measureable, Achievable, Relavance, Timebound* (SMART) dan cukup, serta belum sepenuhnya menjawab isu strategis yang dihadapi.
- 4) Pohon kinerja yang disusun belum seluruhnya memenuhi prinsip logis/logical *framework* yang menggambarkan hubungan sebab



akibat serta belum menggambarkan *critical succes factor* (CSF) yang secara langsung mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan mengacu pada Peraturan Menteri Pandayagunan Aparatur Negara dan Reformasih Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021;

- 5) Belum seluruhnya melakukan identifikasi *crosscutting* kinerja sebagai bentuk sharing outcome antar PD sebagai upaya untuk mempercepat tercapainya kinerja utama di level Provinsi maupun PD.
- 6) Pedoman teknis perencanaan dan atau teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja masih berbentuk rancangan
- 7) IKU belum memuat sumber data dan penanggung jawab data sehingga belum diketahui secara detail dari mana data kinerja diperoleh. Selain itu masih terdapat data yang belum sepenuhnya relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan sehingga data kinerja yang dihasilkan dari pengukuran capaian kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.
- 8) Rencana aksi dan laporan realisasi belum seluruhnya terunggah pada esr.menpan.go.id. Hal ini mengakibatkan progress atas ketercapaian kinerja setiap triwulannya tidak tergambar dengan baik.
- 9) Pelaksanaan monev PD diaplikasi <https://e-kinerja.bapperidantt.com> masih berorientasi pada penyerapan anggaran, realisasi program serta kegiatan, namun belum mencakup capaian kinerja karena saat ini menu capaian kinerja masih dalam proses.
- 10) LPPD yang diunggah di esr.menpan.go.id belum dilengkapi dengan perbandingan realisasi kinerja dengan benchmark nasional atau provinsi.
- 11) Kualitas laporan kinerja antar PD berbeda, karena masih ditemukan laporan kinerja yang belum dilengkapi dengan detail atas faktor hambatan/pendukung, Solusi atas permasalahan dan analisis efisiensi ketercapaian kinerja.
- 12) Penetapan target kinerja tahun 2024 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun 2023.
- 13) Laporan hasil evaluasi belum sepenuhnya memberikan temuan dan rekomendasi yang cukup konkrit pada setiap komponen evaluasi AKIP internal.
- 14) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja,

hal ini ditunjukkan dari masih terdapat sebagian kinerja yang capaian target kinerjanya belum tercapai.

c. Solusi

Adapun Solusi dari factor-faktor penghambat tercapainya target perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan reviu atas kinerja yang ada pada dokumen RPD, agar sepenuhnya berorientasi hasil dan spesifik sehingga tidak menimbulkan dwimakna
2. Memastikan perencanaan kinerja disertai dengan indikator tujuan sehingga ketercapaian kondisi akhir periode terlihat.
3. Melakukan reviu dokumen rencana strategis dan PK PD, agar memuat kinerja yang berorientasi hasil dan dilengkapi dengan indicator kinerja yang SMART dan cukup serta menjawab isu strategis yang dihadapi.
4. Menyusun dan memastikan pohon kinerja pada level provinsi dan seluruh PD telah memenuhi prinsip logis/*logical framework* yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta menggambarkan *critical success factor* (SCF) yang secara langsung mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan mengacu pada PERMENPAN RB Nomor 89 Tahun 2021.
5. Melakukan identifikasi *crosscutting* kinerja sebagai bentuk *sharing outcome* dalam Upaya untuk mencapainya kinerja utama di level Provinsi maupun PD
6. Memformalkan dan mengimplementasikan atas rancangan pedoman teknis perencanaan dan atau teknis pengukuran & pengumpulan data kinerja.
7. Melakukan penguatan formulasi dan pengumpul data IKU dengan melengkapi seluruh IKU PD dengan informasi atas sumber dan penanggung jawab data sehingga diketahui secara detail dari mana data kinerja diperoleh, serta memastikan Kembali pengukuran kinerja yang dilakukan disertai dengan data yang relevan sehingga data kinerja yang dihasilkan dari pengukuran capaian kinerja dapat diandalkan.
8. Melakukan unggah dokumen SAKIP ke dalam esr.menpan.go.id diantaranya rencana aksi tahun berkenaan dan laporan realisasi seluruh PD agar progress atas ketercapaian kinerja setiap triwulannya dapat tergambar dengan baik.
9. Memastikan aplikasi monitoring dan evaluasi yang dimiliki bukan hanya berorientasi pada penyerapan anggaran,realisasi program serta kegiatan namun juga mencakup monitoring dan evaluasi

kerja, sehingga diketahui ketercapaian kinerja secara berkala dan perbaikan strategi yang diperlukan.

10. Memastikan LPPD menyajikan data perbandingan realisasi kinerja dengan *benchmark* nasional atau Provinsi. Selain itu melengkapi setiap ketercapaian indikator kinerja dilengkapi dengan narasi yang detail atas faktor hambatan/pendukung khususnya untuk indikator yang belum ada realisasi.
11. Meningkatkan kualitas laporan kinerja seluruh PD dengan dilengkapi detail atas faktor hambatan/pendukung, Solusi atas permasalahan, dan analisis efisiensi ketercapaian kinerja. Selain itu dapat disusun *template* standar laporan kinerja dan diimplementasikan ke seluruh PD.
12. Memaksimalkan penggunaan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja kedepan diantaranya dalam penentuan target.
13. Inspektorat selaku yang melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar memberikan temuan dan rekomendasi yang konkrit untuk setiap komponen evaluasi.
14. Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan capaian kinerja.

4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

a. Capaian Target Indeks SPBE

Target nilai indeks SPBE Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada RPD Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2024 sebesar 2,3 poin, dengan realisasi sebesar 3,89 poin atau mencapai 169,13% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 3,83, maka terdapat peningkatan sebesar 0,06 poin atau 1.56%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 2,7, maka capaian tahun 2024 telah melampaui sebesar 1,19 poin atau 144,07% sehingga Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian tersebut.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Indikator Kinerja

Realisasi nilai indeks SPBE Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 melampaui target, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya peran kerja kolaboratif antara perangkat daerah dan Dinas Kominfo dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang ada di Perangkat Daerah mulai dioptimalkan terlibat dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan TIK.

- 3) Beberapa aplikasi umum berbagi pakai mulai diterapkan secara maksimal dan terintegrasi pada semua perangkat daerah antara lain bidang perencanaan dan penganggaran, bidang pengadaan barang dan jasa, bidang kepegawaian, bidang perizinan dan pengaduan masyarakat.
- 4) Penggunaan aplikasi *e-purchasing* dan SRIKANDI telah diperjanjikan dalam Kontrak kinerja antara Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan para Kepala Perangkat Daerah.
- 5) Penerapan aplikasi khusus terintegrasi pada semua perangkat daerah antara lain sistem absensi elektronik, tata naskah dinas elektronik (Srikandi) dan penggunaan tanda tangan elektronik sudah diimplementasikan.
- 6) Telah tersedianya instrumen regulasi terkait rancangan pembangunan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka menyelaraskan pembangunan SPBE pada instansi Perangkat Daerah.
- 7) Telah adanya regulasi yang mengatur terkait peta proses bisnis, infrastruktur, data dan informasi, layanan aplikasi serta keamanan SPBE.

5. **Tingkat Keterbukaan Informasi Publik**

a. **Capaian Target Tingkat Keterbukaan Informasi Publik**

Target Indeks Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 sebesar 85 poin, dengan realisasi sebesar 94,30 poin dengan predikat Informatif atau mencapai 110,94% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 77,06, maka capaian terjadi peningkatan sebesar 17,24 poin atau 22,37%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 sebesar 95, maka tingkat keterbukaan informasi publik hanya terpaut 0,7 poin dari target akhir RPD.

b. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Indikator Kinerja**

Realisasi target nilai indeks keterbukaan informasi publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 mencapai target, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya upaya daerah untuk menghadirkan pemerintah yang lebih terbuka terus dilakukan secara berkelanjutan dengan dimasukkannya Tingkat Keterbukaan Informasi Publik ke dalam salah satu indikator penunjang pimpinan Perangkat Daerah sehingga keikutsertaan PD dalam pelaksanaan Monev SAQ (*Self Assesment quistionnaire*).

- 2) Aktifnya website PPID Utama, PPID pelaksana, website nttprov dan media sosial masing-masing PD dalam mempublikasikan program/kegiatan untuk mendukung Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik.
- 3) Kerjasama dan kolaborasi TIM Monev SAQ bersama PD yang sangat baik

6. Indeks Kepuasan Masyarakat

a. Capaian Target Indeks Kepuasan Masyarakat

Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 sebesar 85 poin, dengan realisasi sebesar 86,56*) poin yang merupakan angka tahun 2023 atau mencapai 101,55% dari target. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 90, maka terdapat gap sebesar 3,44 poin.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Indikator Kinerja

Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 melampaui target, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- 1) Perangkat Daerah telah menerapkan pelayanan publik yang berkualitas
- 2) Kualitas sarana dan prasarana pada unit penyelenggara layanan publik sudah memadai.
- 3) Kompetensi dan profesionalisme pelaksana pada unit penyelenggara layanan publik cukup baik.

7. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

a. Capaian Target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Target nilai IDI Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 adalah 83. Berhubungan sampai dengan bulan Maret tahun 2025 Badan Pusat Statistik Provinsi NTT belum merilis data IDI tahun 2024, maka dalam analisis ini digunakan data capaian tahun 2023 sebesar 77,83. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 83, maka terdapat gap sebesar 5.17 poin.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Realisasi nilai IDI Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 belum mencapai target, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan berada pada kategori rendah, hal ini disebabkan karena prevalensi *hearing*, audiensi, dan berbagai



forum DPR (rapat dengar pendapat umum, seminar, uji publik, sosialisasi, dan sebagainya) di DPRD Provinsi NTT terhadap total anggota DPRD Provinsi NTT masih rendah.

- 2) Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN maupun APBD oleh pemerintah berada pada kategori rendah, hal ini disebabkan karena tidak tersedianya informasi APBD berupa Perda tentang APBD, ringkasan RKA-SKPD, Perda tentang Perubahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD, laporan realisasi anggaran SKPD, LKPD yang sudah audit (Y-1), dan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah di website Pemerintah Provinsi NTT
- 3) Indeks Pelayanan Publik yang masih rendah antara lain disebabkan oleh:
- 4) Belum semua penyelenggara layanan publik menerapkan Standar Pelayanan Publik;
- 5) Rendahnya Profesionalisme SDM (Kompetensi, Responsivitas, Kode Etik, Pemberian Penghargaan dan Sanksi, dan Budaya Pelayanan);
- 6) Keterbatasan sarana prasarana (kenyamanan ruang tunggu dan fasilitas lainnya, sarana prasarana bagi yang berkebutuhan khusus, sarana prasarana penunjang lain, dan sarana *front office*);
- 7) Masih rendahnya Sistem Informasi Pelayanan Publik meliputi Sistem Informasi Elektronik dan Sistem Informasi Non Elektronik;
- 8) Masih terbatasnya sarana dan media konsultasi dan pengaduan serta rubrik, dokumentasi, dan publikasi konsultasi dan pengaduan yang mudah diakses;
- 9) Masih terbatasnya inovasi pelayanan publik yang dikembangkan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas.
- 10) Pemenuhan hak-hak pekerja berada pada kategori sedang, hal ini disebabkan karena masih cukup banyak pekerja yang belum memiliki jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan dana pensiun.
- 11) Kesetaraan dalam pelayanan dasar Provinsi berada pada kategori sedang, hal ini disebabkan karena pemenuhan kebutuhan akan akses terhadap pelayanan dasar (air minum, sanitasi dasar, fasilitas penyehatan dasar, Angka Partisipasi Murni pendidikan SD, SMP, SMA) untuk semua rumah tangga masih rendah.
- 12) Kinerja lembaga legislatif berada pada kategori rendah, hal ini disebabkan karena jumlah Peraturan Daerah yang disahkan belum dapat memenuhi target Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang telah direncanakan.

Realisasi nilai IDI Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 belum mencapai target, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan berada pada kategori rendah, hal ini disebabkan karena prevalensi *hearing*, audiensi, dan berbagai forum DPR (rapat dengar pendapat umum, seminar, uji publik, sosialisasi, dan sebagainya) di DPRD Provinsi NTT terhadap total anggota DPRD Provinsi NTT masih rendah.
- 2) Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN maupun APBD oleh pemerintah berada pada kategori rendah, hal ini disebabkan karena tidak tersedianya informasi APBD berupa Perda tentang APBD, ringkasan RKA-SKPD, Perda tentang Perubahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD, laporan realisasi anggaran SKPD, LKPD yang sudah audit (Y-1), dan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah di website Pemerintah Provinsi NTT
- 3) Indeks Pelayanan Publik yang masih rendah antara lain disebabkan oleh:
 - Belum semua penyelenggara layanan publik menerapkan Standar Pelayanan Publik;
 - Rendahnya Profesionalisme SDM (Kompetensi, Responsivitas, Kode Etik, Pemberian Penghargaan dan Sanksi, dan Budaya Pelayanan);
 - Keterbatasan sarana prasarana (kenyamanan ruang tunggu dan fasilitas lainnya, sarana prasarana bagi yang berkebutuhan khusus, sarana prasarana penunjang lain, dan sarana front office);
 - Masih rendahnya Sistem Informasi Pelayanan Publik meliputi Sistem Informasi Elektronik dan Sistem Informasi Non Elektronik;
 - Masih terbatasnya sarana dan media konsultasi dan pengaduan serta rubrik, dokumentasi, dan publikasi konsultasi dan pengaduan yang mudah diakses;
 - Masih terbatasnya inovasi pelayanan publik yang dikembangkan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas.
- 4) Pemenuhan hak-hak pekerja berada pada kategori sedang, hal ini disebabkan karena masih cukup banyak pekerja yang belum memiliki jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan dana pensiun.
- 5) Kesetaraan dalam pelayanan dasar Provinsi berada pada kategori sedang, hal ini disebabkan karena pemenuhan kebutuhan akan akses terhadap pelayanan dasar (air minum, sanitasi dasar, fasilitas penyehatan dasar, Angka Partisipasi Murni pendidikan SD,

SMP, SMA) untuk semua rumah tangga masih rendah.

- 6) Kinerja lembaga legislatif berada pada kategori rendah, hal ini disebabkan karena jumlah Peraturan Daerah yang disahkan belum dapat memenuhi target Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang telah direncanakan.

B. Analisis Program dan Anggaran Perangkat Daerah yang Menunjang Pencapaian Target Kinerja

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari Tujuan Keempat RPD yaitu **Birokrkasi Yang Berorienrtasi Pelayanan ,Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**, Pemerintah Provinsi NTT menetapkan 33 Program pada tahun 2024 yang dilaksanakan oleh 18 Perangkat Daerah. Rincian terkait jumlah program, alokasi dan realisasi dana menurut Perangkat Daerah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel
Jumlah Program, Jumlah dana (alokasi dan realisasi)
Menurut Perangkat Daerah

NO	Nama Perangkat Daerah	Program	Anggaran	Realisasi	%
			(Rp.)	(Rp.)	
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1,172,000,000	1,165,662,000	99,46
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	6,434,123,470	6,203,544,597	96,42
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	100,000,000	53,928,000	53,93
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2,452,950,010	2,249,093,640	91,69
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Poltik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	353,583,374,600	306,885,357,280	86,79
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	209,474,000	105,440,150	50,34
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	379,586,000	312,313,500	82,28
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penangan Konflik Sosial	1,045,367,000	933,775,200	89,33
3	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Program Penyelenggaraan Pengawasan	5,323,686,988	4,964,130,440	93,26
		Program Kebijakan , Pendampingan dan Asistensi	2,735,142,068	2,276,260,143	83,22
4	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	632,900,000	598,887,430	94,63
		Program Kesejahteraan Rakyat	9,306,922,400	7,554,054,245	81,17
5	Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1,588,012,265	1,524,239,950	95,98



NO	Nama Perangkat Daerah	Program	Anggaran	Realisasi	%
			(Rp.)	(Rp.)	
6	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Program Perekonomian dan Pembangunan	959,6000,000	773,715,990	80,63
		Program Administrasi Pembangunan	213,735,424	212,896,380	99,61
7	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Program Kebijakan dan Pelayanan PBJ	6,589,605,381	6,443,311,641	97,77
8	Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Program Penataan Organisasi	1,118,233,027	1,043,251,500	93,29
9	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,334,973,336	1,332,026,386	99,78
10	Biro Umum Setda Provinsi NTT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48,427,984,952	40,482,160,362	83,59
11	Sekretariat DPRD Provinsi NTT	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	72,758,097,636	68,422,331,532	89,14
12	Bappelitbangda Provinsi NTT	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,657,413,826	1,093,097,779	65,95
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah	4,161, ,874,675	1,814,309,403	43,59
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1,337,745,842	492,790,153	36,84
13	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Program Kepegawaian Daerah	3,588,756,565	3,217,189,828	89,64
14	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	918,252,191,453	752,483,856,689	81,95
15	Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3,230,950,000	1,967,984,760	40,45
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	15,032,905,200	13,952,883,996	92,82
16	Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi NTT	Program Pengembangan SDM	7,004,184,000	4,759,528	67,96
17	Badan Penghubung Provinsi NTT	Program Pelayanan Penghubung	1,079,006,000	1,007,884,844	93,41
18	Badan Perbatasan Provinsi NTT	Program Pengelolaan Perbatasan	1,485,150,000	1,189,065,704	80,06
Jumlah			1,477,670,471,443	1,230,760,203,050	83,29

Sumber data: LKIP PD PROV. NTT 2024, diolah

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata pencaian sasaran strategis “**Birokrasi Yang Berorientasi Pelayanan ,Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif Dan Kolaboratif**” sebesar **109,14 (Sangat Baik)**. Pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh pelaksanaan 33 program oleh 18 Perangkat daerah dengan alokasi anggaran sebesar, Rp. 1,477,670,471,443 dan realisasi Rp. 1,230,760,203,050 atau mencapai 83,29%. Berdasarkan data rerata realisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi NTT berhasil mencapai sasaran strategis pada Tujuan ke empat RPD 2024-2026.

Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2024 sesuai misi dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tujuan Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2024

NO	TUJUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SKALA ORDINAL
1.	Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri, Makmur, Sejahtera dan Berkeadilan Sosial	95,97	Sangat Berhasil
2.	Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing	90,90	Sangat Berhasil
3.	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup, Kewilayahan dan Mitigasi Bencana	96,55	Sangat Berhasil
4.	Mewujudkan Birokrasi Yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	109,14	Sangat Berhasil
RATA-RATA CAPAIAN			Sangat Berhasil

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Pemprov NTT selama Tahun 2024 dikategorikan **Sangat Berhasil**. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian target 75 (*tujuh puluh lima*) indikator kinerja, 16 (*enam belas*) sasaran dari 4 (empat) Tujuan.

3.3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan memuat tentang analisis penggunaan sumber daya keuangan yang dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Efektivitas penggunaan anggaran

1. Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi enggaran belanja dengan Target anggaran belanja. Menurut keputusan Menteri dalam negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, penentuan kriteria tingkat efektivitas belanja sebagai berikut:
 - a. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%,maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
 - b. Jika pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif
 - c. Jika pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif
 - d. Jika pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif
 - e. Jika pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.



Tabel
Analisis Efektifitas Penggunaan Anggaran Pada 34 Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Provinsi Tahun 2024

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	Capaian %	Ket
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2,065,557,341,686.00	2,038,151,087,186.90	98.67	Efektif
2	RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang	338,532,780,682.00	250,891,700,665.13	74.11	Cukup Efektif
3	Dinas Kesehatan	197,528,016,710.00	185,967,568,612.09	94.15	
4	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5,636,094,101.00	1,554,133,316.00	27.57	Cukup Efektif
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	184,280,898,624.00	165,051,740,763.00	89.57	Cukup Efektif
6	Satuan Polisi Pamong Praja	11,632,976,930.00	10,789,363,929.00	92.75	Cukup Efektif
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6,876,405,546.00	6,489,147,806.00	94.37	Kurang Efektif
8	Dinas Sosial	69,778,653,677.00	54,319,543,610.00	77.85	Kurang Efektif
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8,628,520,883.00	7,791,557,818.00	90.30	Cukup Efektif
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	102,207,600,783.00	92,556,741,846.00	90.57	Cukup Efektif
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9,306,216,908.00	8,331,565,171.00	89.53	Cukup Efektif
12	Dinas Perhubungan	40,917,744,212.00	37,292,866,835.00	91.14	Cukup Efisien
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	15,697,624,614.00	14,232,089,533.00	90.66	Efektif
14	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17,548,682,103.00	16,912,173,097.00	96.37	Kurang Efektif
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9,615,756,908.00	8,839,290,998.00	91.93	Cukup Efektif
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	35,150,497,235.00	30,494,644,063.00	86.75	Cukup Efektif
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10,933,319,656.00	10,128,598,836.00	92.64	Ekurang Efektif
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	47,151,572,967.00	44,466,859,039.00	94.31	Efektif
19	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	10,435,071,360.00	9,936,468,983.00	95.22	Kurang Efektif
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	58,710,915,102.00	53,393,832,571.00	90.94	Kurang Efektif
21	Dinas Peternakan	25,061,234,853.00	22,012,591,462.00	87.84	Kurang Efektif
22	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	105,262,898,120.00	101,118,689,325.00	96.06	Efektif
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20,771,496,520.00	18,587,017,966.00	89.48	Kurang Efektif
24	Sekretariat Daerah	107,023,633,233.00	95,359,367,373.00	79.73	Kurang Efektif
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	149,453,576,207.00	127,338,959,986.00	85.20	Kurang Efektif
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	23,424,785,051.00	18,438,585,580.00	78.71	Kurang Efektif
27	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	86,717,206,669.00	75,435,669,868.00	80.99	Kurang Efektif
28	Badan Keuangan Daerah	948,192,059,569.00	825,536,290,229.00	87.06	Cukup Efisien



No	SKPD	Anggaran	Realisasi	Capaian %	Ket
29	Badan Kepegawaian Daerah	12,919,713,000.00	12,225,724,670.00	94.63	Kurang Efektif
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	20,624,014,536.00	16,544,624,607.00	80.22	Kurang Efektif
31	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	6,679,526,840.00	5,835,357,977.00	87.36	Kurang Efektif
32	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	11,072,012,200.00	10,524,582,818.00	95.06	Efektif
33	Inspektorat Daerah	19,430,320,869.00	18,169,544,142.00	93.51	Kurang Efektif
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	362,956,754,088.00	314,887,040,625.00	86.76	Kurang Efektif
JUMLAH		5.145.715.922.442,00	4.709.605.021.305,13	87.41	Efektif

2. Efisiensi penggunaan anggaran

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total anggaran belanja. Menurut keputusan Menteri dalam negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, penentuan kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut:

- a. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
 - b. Jika pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja kurang efisien.
 - c. Jika pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien
 - d. Jika pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien
- Jika pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien

Tabel
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Pada 33 Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Provinsi Tahun 2024

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	Capaian %	Ket
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2,090,539,255,771.00	1,984,638,449,106.90	94.93	Cukup Efisien
2	RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang	371,328,954,752.00	308,211,973,820.37	83.00	Cukup Efisien
3	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	206,252,782,874.00	173,028,779,243.00	83.89	Cukup Efisien
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	233,457,555,317.00	200,553,416,666.00	85.91	Cukup Efisien
5	Satuan Polisi Pamong Praja	13,708,942,700.00	11,352,634,994.00	82.81	Cukup Efisien
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10,368,652,200.00	7,139,578,376.00	68.86	Efisien
7	Dinas Sosial	71,687,285,572.00	50,115,304,710.00	69.91	Efisien
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6,892,432,255.00	5,627,308,146.00	81.64	Cukup Efisien
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	99,979,559,782.00	87,629,909,646.00	87.65	Cukup Efisien
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9,051,591,780.00	7,401,465,357.00	81.77	Cukup Efisien



No	SKPD	Anggaran	Realisasi	Capaian %	Ket
11	Dinas Perhubungan	22,077,936,280.00	19,894,358,340.00	90.11	Cukup Efisien
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	13,590,100,235.00	12,662,309,049.00	93.17	Cukup Efisien
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	31,422,755,876.00	24,365,608,710.00	77.54	Efisien
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7,965,030,448.00	7,088,720,956.00	89.00	Cukup Efisien
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	26,986,859,014.00	24,152,969,644.00	89.50	Cukup Efisien
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15,164,712,248.00	10,329,912,174.00	68.12	Efisien
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	51,579,537,247.00	47,152,417,645.00	91.42	Cukup Efisien
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	10,521,011,760.00	8,322,815,279.00	79.11	Efisien
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	74,720,980,332.00	65,374,470,056.00	87.49	Cukup Efisien
20	Dinas Peternakan	28,972,514,344.00	25,171,224,457.00	86.88	Cukup Efisien
21	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	103,759,651,444.00	98,660,648,111.00	95.09	Cukup Efisien
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12,185,712,848.00	9,062,951,522.00	74.37	Efisien
23	Sekretariat Daerah	116,039,508,855.00	97,344,492,340.50	83.89	Cukup Efisien
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	147,365,956,040.00	132,195,746,389.00	89.71	Cukup Efisien
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	18,586,954,290.00	14,029,735,446.00	75.48	Efisien
26	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	85,317,757,937.00	74,921,430,177.00	87.81	Cukup Efisien
27	Badan Keuangan Daerah	760,988,379,960.00	747,373,878,616.00	98.21	Cukup Efisien
28	Badan Kepegawaian Daerah	12,209,004,680.00	10,829,748,522.00	88.70	Cukup Efisien
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	26,207,008,870.00	21,529,402,310.00	82.15	Cukup Efisien
30	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5,896,135,120.00	5,041,963,134.00	85.51	Cukup Efisien
31	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	7,953,516,550.00	7,394,721,334.00	92.97	Cukup Efisien
32	Inspektorat Daerah	18,655,098,580.00	14,198,502,163.00	76.11	Efisien
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	184,352,330,860.00	148,180,194,029.00	80.38	Cukup Efisien
JUMLAH		4,895,785,466,821.00	4,460,977,040,468.77	91.12	Cukup Efisien



3.1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan

3.2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi.

Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat yang disalurkan melalui 3 (tiga) Kementerian, yakni Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dengan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melaksanakan Tugas Pembantuan tersebut sebanyak 5 (empat) Perangkat Daerah, yakni Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Dinas Peternakan Provinsi NTT, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak memberikan Tugas Pembantuan kepada 22 Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.

3.3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.**Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Oleh Daerah Provinsi**

Tugas Pembantuan dari Kementerian/Lembaga yang ditugaskan kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1 Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima 4 (empat) Program Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dengan rincian:



- a) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, melalui pelaksanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen dengan anggaran sebesar Rp. 15.701.690.000,- , realisasi sebesar Rp. 14.357.362.400.- dengan rincian program kegiatan sebagai berikut :

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

- 1) Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, dengan alokasi anggaran Rp. 60.000.000,-
 - (a) Target Kinerja
Identifikasi dan verifikasi CPCL, melakukan Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monev dan Laporan Kegiatan Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan..
 - (b) Realisasi
Terlaksananya Verifikasi CPCL dan pengawalan bantuan sarana pascapanen tanaman pangan, koordinasi dan rapat Tingkat pusat dan melakukan pembinaan dan monitoring evaluasi pemanfaatan bantuan sarana pasca panen tanaman pangan. Sasaran kegiatan ini adalah calon kelompok Penerima Bantuan sarana pascapanen tanaman pangan. Realisasi anggaran sebesar Rp. 59.690.300,-

Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

- 1) Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal Tanaman Pangan, dengan alokasi anggaran Rp. 350.000.000
 - (a) Target
 - kegiatan Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monev dan Laporan Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal Tanaman Pangan ;
 - Bantuan sarana produksi pertanian dalam budidaya padi kaya gizi (Biofortifikasi) dengan luasan 8.000 hektar;
 - (b) Realisasi
 - Adanya Areal tanam dan Laporan Pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monev Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal Tanaman Pangan.
 - Tersalurnya bantuan sarana produksi pertanian dalam budidaya padi kaya gizi (Biofortifikasi) dengan luasan 8.000, terdiri dari Kabupaten Timor Tengah Selatan 500 ha, Timor Tengah Utara: 500 ha, Rote Ndao: 350 ha, Alor:



300 ha, Sabu Raijua: 300 ha, Sumba Timur: 400 ha, Sumba Tengah: 500 ha, Sumba Barat: 400 ha, Sumba Barat Daya: 200 ha, Lembata: 250 ha, Ende: 750 ha, Nagekeo: 300 ha, Ngada: 500 ha, Manggarai Timur: 800 ha, Manggarai: 500 ha, dan Manggarai Barat: 1.250 ha pada bulan April-Desember 2024. Hektar.

- Tersalurnya bantuan benih padi kaya gizi (biofortifikasi) sebanyak 112.195 kg, pupuk NPK non sumbsidi sebanyak 200.000 kg dan pestisida sebanyak 8.000 paket

2) Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan

(a) Target

- Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monev dan Laporan;
- Penyaluran Bantuan Benih Padi Inbrida seluas 5000 ha.

(b) Realisasi

- Tersedianya Laporan Pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monev Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan;
- Terlaksananya bantuan benih padi pada 10 Kabupaten seluas 5.000 Ha.

Program Dukungan Manajemen

1) Dukungan manajemen dan teknis lainnya

(a) Target

Layanan manajemen kinerja internal yang mencakup layanan perencanaan dan penganggaran, layanan pemantauan dan evaluasi dan layanan manajemen keuangan

(b) Realisasi

Tersusunnya rancangan kegiatan/ anggaran tanaman pangan bagi 21 Kabupaten.

- b) Direktorat Jenderal Hortikultura, melalui pelaksanaan Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen dengan anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.119.997.700,- meliputi kegiatan :

Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

1) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

(a) Target Kinerja

Sarana Pasca Panen Hortikultura 3 Unit, Sarana peralatan dan mesin sarana pengolahan hortikultura 3 Unit, Prasarana Pascapanen Bangsal Hortikultura 3 Unit.



(b) Realisasi

- Tersalurnya 3 unit bantuan Sarana Pasca panen hortikultura untuk 3 (tiga) kelompok di Kabupaten Kupang.
- Tersalurkannya sarana pengolahan hortikultura untuk 3 (tiga) kelompok di Kabupaten Kupang;
- Terbangunnya Prasarana pascapanen (Bangsal) hortikultura untuk 3 (tiga) kelompok di Kabupaten Kupang;

Program Dukungan Manajemen

1) Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya

(a) Target Kinerja

1 layanan;

(b) Realisasi

1 layanan.

- c) Direktorat Jenderal Perkebunan, melalui pelaksanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen dengan anggaran sebesar Rp. 1.864.331.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.739.052.500,- meliputi:

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

1) Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan

(a) Target Kinerja

- Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar Komoditas Tanaman Perkebunan di Provinsi NTT dan 5 (lima) daerah sentra produksi tanaman perkebunan yaitu : Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Alor dan Belu;
- Standarisasi Produk;
- Penyediaan Sarana Pascapanen Tanaman Kelor di Kabupaten Kupang.

(b) Realisasi

- Terlaksananya Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar Komoditas Tanaman Perkebunan yang meliputi pengumpulan data, pengumpulan informasi kualitatif, pengolahan data, analisis data dan penyebaran informasi pasar dengan melakukan inovasi dalam pengembangan pemasaran hasil perkebunan melalui aplikasi Sistem Informasi Pasar Produk Perkebunan Unggulan (SIPASBUN) yang langsung dilakukan oleh Petugas informasi pasar kabupaten Sentra dan Petugas Informasi Pasar Provinsi.



- Diterbitkannya Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Kakao masing-masing sebanyak 500 STDB untuk 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Barat Daya (480 e-STDB), Manggarai Barat (501 e-STDB) dan Manggarai Timur (496 e-STDB).
- - Tersedianya Sarana Pascapanen Kelor berupa
 1. Oven Pengering (2 unit)
 2. Mesin Pembubuk (1 unit)
 3. Mesin Sealer (1 Unit)
 4. Mesin Peniris Daun (1 unit)
 5. Mesin Ozonizer (1 unit)
 - Tersedianya Produk olahan berupa daun kelor kering dan Bubuk Kelor.

2) Penguatan Pembenihan Tanaman Perkebunan

(a) Target Kinerja

- Kebijakan bidang pertanian dan perikanan berupa rekomendasi sertifikasi tanaman perkebunan;
- Kebijakan bidang pertanian dan perikanan berupa rekomendasi Penilaian Varietas Tanaman.
- Pemeliharaan Kebun Sumber Bahan Tanam Tanaman Kelapa seluas 10 ha.
- Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Unggul Tanaman Vanili seluas 2 ha.
- Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan
- Penetapan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan

(b) Realisasi

- Tersedianya data benih unggul bermutu dan bersertifikat dalam kegiatan pengembangan tanaman perkebunan sbb:

NO	KOMODITI	BENTUK BENIH	JUMLAH BENIH	SATUAN
1	Kelapa Dalam	Siap Salur	47.529	Batang
2	Kelapa Dalam	Butiran	72,600	Butir
3	Jambu Mete	Siap Salur	68.836	Batang
4	Jambu Mete	Gelondongan	850//229.400	Kg//Gelondong
5	Kakao	Butiran	1.113.940	Butir

- Terlaksananya kegiatan penialaian varietas tanaman perkebunan serta adanya data varietas tanaman perkebunan yang beredar. Tabel Penyebaran dan Luas

Areal Pengembangan Komoditi Perkebunan dapat di lihat di bawah ini :

NO	KOMODITI	VARIETAS	LOKASI PENYEBARAN	LUAS AREAL
1	Kelapa Dalam	Adonara	Malaka	100 Ha
			Kupang	100 Ha
			Ende	100 Ha
		Unggul lokal Sumba Timur	Sumba Timur	100 Ha
2	Jambu Mete	MPF 01	TTU	100 Ha
			Manggarai Barat	100 Ha
			Nagekeo	100 Ha
			Sumba Barat daya	100 Ha
			Alor	100 Ha
4	Kopi	Arabika Sigarar Utang	Alor	100 Ha
			Manggarai Timur	100 Ha
			Kupang	100 Ha
5	Kelapa Genjah	Kelapa Genjah Entog	Belu	100 Ha
			Ende	5 Ha
6	Kakao	ICCRI 08 H	Ende	100 Ha
7	Vanili	Vania 2	Ende	5 Ha
			Manggarai Barat	5 Ha
8	Kelor	Unggul lokal Flores Timur	Kupang	50 Ha
9	Cengkeh	Zanzibar Gorontalo	TTU	80 Ha

- Terlaksananya pemeliharaan KI Kelapa di Provinsi (Kab. Kupang) dan Kabupaten Sumba Timur, masing-masing seluas 5 ha.
- Terlaksananya pemeliharaan pemeliharaan Kebun Sumber Benih Unggul Vanili di Kabupaten Alor dan Nagekeo, masing-masing seluas 1 ha.
- Terlaksananya pembinaan, pengawalan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penguatan perbenihan tanaman perkebunan.
- Tersedianya data ketersediaan benih kebun sumber benih tanaman perkebunan, sebagai berikut :

N O	KOMODITI	VARIETAS	NAMA PEMILIK KEBUN	LOKASI KEBUN	LUAS AREAL	POTENSI SUMBER BENIH	SK PENETAPAN KEBUN
1	Kakao	Poliklonal (TSH 858, ICS 60, SCA , SCA 12)	PT. Timor Mitra Niaga/ Hengky Lianto	Ds. Gaura, Kec.Laboya Barat, kab. Sumba Barat	3,2	780.628 Butir / Tahun	70/Kpts/K B.020/10/ 2024, Tanggal 14 Oktober 2024
2	Vanili	Alor	Antonius H.G Hadjon	Ds. Lewoloba , Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur	0,5	108.922 Stek 1 buku berdaunTunggal / Tahun	76/Kpts/K B.020/10/ 2024, Tanggal 14 Oktober 2024



3	Vanili	Alor	Yohanes Uran	Ds. Boru, Kec. Wulanggitang, Kab.Flores Timur	0,5	149.040 Stek 1 buku berdaun Tunggal / Tahun	75/Kpts/K B.020/10/2024, Tanggal 14 Oktober 2024
4	Vanili	Alor	Yakobus Doni Tupen	Ds. Kwaelaga Lamawato, Kec. Adonara Timur, Kab. Flores Timur	0,5	96.000 Stek 1 buku berdaun tunggal/ Tahun	75/Kpts/K B.020/10/2024, Tanggal 14 Oktober 2024
5	Cengkeh	Unggul Lokal Sikka	Silvianus Firminus	Dsn. Konga, Ds. Wogalirit, kec. Doreng, Kab. Sikka	0,5	270.531 Butir/ Tahun	71/Kpts/K B.020/10/2024, Tanggal 14 Oktober 2024
6	Cengkeh	Unggul Lokal Sikka	Thomas Bewat	Dsn. Wolomoto ng, Ds. Wolomoto ng, Kec. Doreng, Kab. Sikka	0,5	988.571 Butir/ Tahun	73/Kpts/K B.020/10/2024, Tanggal 14 Oktober 2024
7	Cengkeh	Unggul Lokal Sikka	Rudolfus Musmuladi Mangsei	Dsn. Maget, Ds. Wolomapa, Kec. Hewokloa ng, Kab. Sikka	0,5	424.369 Butir/ Tahun	72/Kpts/K B.020/10/2024, Tanggal 14 Oktober 2024

Program Dukungan Manajemen

3) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

(a) Target Kinerja

1 (satu) dokumen

(b) Realisasi

Tersedianya 1 (satu) dokumen administrasi kegiatan dana TP antara lain berupa pembayaran honor KPA, honor PPK, honor Bendahara, honor Penguji tagihan dan Penandatanganan SPM serta honor Staf Pengelola Satker dari bulan Januari s/d Desember 2024.

- d) Direkrorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, melalui pelaksanaan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen dengan anggaran sebesar Rp. 54.254.053.000, dengan realisasi anggaran Rp. 54.220.016.700 (99,94%),- meliputi:

Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

1) Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian

(a) Target Kinerja

Kegiatan irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan.

(b) Realisasi

- Terbangunnya infrastruktur jaringan irigasi perpipaan sebanyak 270 unit pada lahan kelompok tani di 20 Kabupaten;
- Terbangunnya infrastruktur irigasi perpompaan sebanyak 219 unit pada lahan kelompok tani di 20 Kabupaten/Kota.

2) Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alsintan

(a) Target Kinerja

Bimtek Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alsintan.

(b) Realisasi

Meningkatnya perluasan areal yang diolah maupun panen menggunakan alat dan mesin pertanian;

Program Dukungan Manajemen

(a) Target Kinerja

Administrasi kegiatan dana TP

(b) Realisasi

Terealisasinya administrasi kegiatan dana TP antara lain berupa pembayaran honor KPA, honor PPK, honor Bendahara, honor Penguji tagihan dan Penandatanganan SPM serta honor Staf Pengelola Satker dari bulan Januari s/d Desember 2024.

Permasalahan dan kendala :

Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

- Anomali iklim elnino yang berdampak pada ketersediaan air yang terbatas dan pergeseran waktu tanam.
- Ketersediaan benih secara mandiri/insitu pada masing-masing kabupaten/kota masih terbatas.
- Penerapan teknoogi budidaya yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi teknis.
- Belum semua petani/kelompoktani penerima bantuan benih dapat dapat mengakses pupuk bersubsidi dan atau membeli pupuk non subsidi sesuai dengan dosis kebutuhan.
- Supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan kegiatan belum berjalan dengan baik.
- Perencanaan penangkaran/produksi benih secara terkoordinasi dan berjenjang sesuai kebutuhan untuk kegiatan pengembangan belum berjalan dengan baik dan melibatkan semua komponen terkait;
- Benih yang dilakukan penangkaran dan atau diproduksi masih terbatas dengan prioritas sesuai kebutuhan benih berbasis bantuan pemerintah.



- Proses sertifikasi benih belum berjalan optimal dan dikawal dengan baik sehingga masih terdapat benih yang tidak lulus sertifikasi.
- Waktu penangkaran/produksi benih belum semua memperhitungkan kebutuhan benih sesuai jadwal tanam untuk pengembangan;
- Harga benih bantuan pemerintah masih berbeda antar sumber anggaran;
- Produksi dan ketersediaan benih padi inbrida belum sesuai dengan kebutuhan jadwal tanam kegiatan pengembangan.
- Masih ada sertifikasi benih padi inbrida yang tidak lulus sertifikasi akibat terserang hama/penyakit
- Pengiriman laporan perkembangan kegiatan dari kabupaten pelaksana belum berjalan dengan baik;
- Pengumpulan data di tingkat pedagang pengumpul sulit diperoleh dari pedagang pengumpul;
- Sering terjadi kesalahan peinputan data dalam aplikasi SIPASBUN
- Kegiatan Rintisan Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Komoditas Kakao Tahun 2024 ini, baru pertama kali dilaksanakan di Provinsi NTT, sehingga banyak ditemui kendala dan hambatan di lapangan sehingga ke depan perlu dilakukan pendampingan oleh petugas Provinsi dan Pusat;
- Petugas Kabupaten yang membidangi perkebunan belum memahami teknik pendataan dan pemetaan sehingga perlu melakukan pelatihan;
- Pengambilan data dan pemetaan masih tergantung pada institusi lain, sehingga selalu mengalami keterlambatan dalam pendataan dan pemetaan;
- Topografi di lokasi kegiatan berbukit-bukit sehingga menyulitkan petugas dalam pengambilan titik koordinat;
- Ketersediaanya bahan baku yang tidak cukup akibat musim kemarau yang berkepanjangan dan listrik yang sering mengalami pemadaman mengakibatkan pengolahan tidak dapat berjalan dengan baik;
- Petani belum memahami pentingnya menjaga mutu hasil olahan sehingga perlu adanya pembinaan Perbaikan mutu produk yang dihasilkan sehingga memiliki daya saing di pasar;
- Proses pembibitan benih tanaman perkebunan belum maksimal dilakukan pengawasan sejak pengambilan benih, pembibitan hingga proses sertifikasi benih;
- Bagi penangkar/kabupaten yang memiliki lokasi kebun sumber benih yang telah ditetapkan, belum secara periodik (per bulan) menyampaikan laporan peredaran benih yang digunakan dalam



tahun berjalan secara periodik ke UPTD Pengawasan dan sertifikasi benih Provinsi NTT;

- Masih terdapat penggunaan benih yang didanai oleh APBD II belum dilakukan sertifikasi dalam bentuk butiran/gelondongan/siap salur dalam polibeg oleh Petugas Pengawas Benih Tanaman Perkebunan yang berkedudukan di Provinsi (tidak mengajukan permohonan ke UPTD PSB Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT);
- Masih terdapat benih yang berasal dari luar Provinsi NTT yang tidak dilaporkan ketika masuk ke wilayah Provinsi NTT;
- PBT masih kesulitan mendapatkan data penyebaran varietas tanaman pangan;
- Fenomena el nino dan dampak perubahan iklim menyebabkan kekeringan dan peningkatan suhu udara yang cukup signifikan sehingga berdampak terhadap ketersediaan air dan pertumbuhan tanaman;
- Kekeringan ekstrim berdampak terhadap pertumbuhan tanaman kelapa di Kabupaten Sumba Timur sehingga hasil evaluasi terdapat tanaman yang mati dan jumlah populasi berkurang menjadi 390 pohon;
- Dana kegiatan Irigasi Perpipaan sebanyak 270 unit masuk dalam Anggaran Bantuan Tambahan (ABT) pada Bulan Juli 2024, dan pelaksanaan kegiatannya pada akhir bulan Agustus 2024, karena masih melakukan Revisi terhadap alokasi kegiatan tersebut dan penyesuaian anggaran sesuai alokasi;
- Tim Teknis Kabupaten lambat melakukan sosialisasi dan verifikasi CPCL;
- Penanggung jawab kegiatan irigasi perpipaan di Kabupaten, lambat menyampaikan berkas pengajuan dana 100% dari Kelompok Tani ke penanggung jawab kegiatan di Seksi PLA untuk di proses lebih lanjut ke Bagian Keuangan;

Saran Tindaklanjut :

Saran tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain:

- Perlu adanya dukungan kebijakan dalam hal perencanaan dan anggaran dari pihak kabupaten untuk mendukung upaya penyediaan benih dalam daerahnya masing-masing;
- Melakukan penanaman disesuaikan dengan perkembangan curah hujan dan atau ketersediaan air;
- Mendukung dengan pompa air bagi lahan pertanian yang ada sumber airnya;



- Membangun kemitraan antara para penangkar benih dengan produsen benih untuk kegiatan produksi benih secara mandiri/insitu;
- Mengintensifkan koordinasi dan komunikasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- Melakukan koordinasi percepatan waktu tanam penangkaran Benih Padi Biofortifikasi;
- Melakukan koordinasi Benih Sumber (label Putih dan Ungu) dengan Balai Besar Pertanian;
- Mendorong perbenihan varietas lain selain varietas Inpari Nutrizinc (varietas Inpago Fortiz 13);
- Meningkatkan koordinasi penyiapan benih terutama untuk kebutuhan benih dilakukan berbasis kebutuhan dan diproduksi sesuai dengan jadwal tanam untuk kegiatan pengembangan;
- Perlu adanya forum perbenihan setiap tahun untuk membicarakan perencanaan, kebutuhan, produksi dan pemasaran benih;
- Peningkatan pengawalan lapangan proses sertifikasi benih oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang didukung dengan supervisi dan pembinaan oleh Bidang teknis;
- Terus dilakukan sosialisasi kepada petani/kelembagaan varietas unggul baru;
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama pengawalan proses sertifikasi antara Pengawas Benih Tanaman (PBT), Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) dan Penyuluh Pertanian;
- Membangun ekosistem penangkaran/produksi benih antara penangkar dan produsen benih sesuai kebutuhan berbasis program dan juga untuk kebutuhan free market;
- Melakukan koordinasi dengan kabupaten untuk pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaporan;
- Melakukan identifikasi jenis komoditi hortikultura yang ditanam, dipasarkan, dikemas dan diolah untuk ditingkatkan penanganannya menjadi lebih higienis, bermutu dan dapat bersaing di pasar;
- Diskusi dan pembinaan intensif dengan kelompok agar memiliki komitmen yang kuat melakukan diversifikasi produk olahan;
- Menginisiasi kemitraan dengan lembaga terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov NTT, Balai POM, MUI, Bank Indonesia dan Bank Himbara lainnya;



- Menginisiasi kemitraan dengan lembaga terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov NTT, Balai POM, MUI, Bank Indonesia dan Bank Himbara lainnya;
- Pada saat pengumpulan data di tingkat pedagang pengumpul sebaiknya petugas membawa surat pengantar dari Dinas sebagai pegangan dalam melaksanakan kegiatan;
- Harus ada koordinasi dan konsultasi antara Petugas Provinsi dan Kabupaten tentang proses peinputan data;
- Melakukan koordinasi kepada petugas PIP melalui via telepon/WA/SMS untuk meralat kembali penginputan data;
- Diadakan bantuan oleh pemerintah berupa pengembangan budidaya kelor sebanyak dua hektar di lahan anggota kelompok setempat untuk menanggulangi pemadaman listrik dengan meningkatkan daya pada gardu di daerah tersebut dan Kelompok akan menyediakan Jenzet untuk membantu proses pengolahan apabila terjadi pemadaman listrik;
- Pembinaan Perbaikan mutu produk yang dihasilkan sehingga memiliki daya saing di pasar;
- Seluruh kegiatan pengadaan benih yang menggunakan anggaran pemerintah wajib menggunakan benih yang legal yang berasal dari kebun sumber benih yang telah ditetapkan dengan SK Direktorat Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian;
- Benih yang akan digunakan dalam kegiatan pengembangan tanaman perkebunan wajib melalui proses sertifikasi dan pengujian laboratorium sebelum digunakan atau diedarkan;
- Benih siap salur yang akan disalurkan wajib dilakukan sertifikasi oleh PBT Tanaman Perkebunan yang berkedudukan di Provinsi;
- Benih yang beredar di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur wajib dilaporkan kepada UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi NTT;
- Kegiatan pengawalan dan monev ke lapangan disesuaikan dengan pagu yang ada dengan memanfaatkan transportasi alternatif seperti kapal laut serta melakukan revisi anggaran untuk menyesuaikan dengan harga tiket saat ini;
- Mengintensifkan kegiatan pemeliharaan tanaman, aplikasi mulsa, perbaikan sistem irigasi dan melakukan penyesuaian dan pemanfaatan sarana produksi secara tepat;
- Melakukan Revisi POK penyesuaian kebutuhan saprodi (pupuk, obat-obatan dan insentif) dengan populasi tanaman yang ada di



Kabupaten Sumba Timur serta menambah saprodi pendukung seperti instalasi air guna menunjang kegiatan pemeliharaan tanaman di KI Kelapa Sumba Timur;

- Mengintensifkan kegiatan pemeliharaan tanaman, aplikasi mulsa, perbaikan sistem irigasi dan melakukan penyesuaian dan pemanfaatan sarana produksi secara tepat;
- Perlu adanya pembinaan dan sosialisasi secara terus menerus kepada produsen, penangkar dan stake holder lainnya untuk penyamaan persepsi terkait aturan-aturan perbenihan perkebunan
- Perlu adanya pelatihan lanjutan PBT untuk peningkatan kapabilitas PBT dilapangan maupun dilaboratorium.

2. Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima 2 (dua) Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dengan rincian :

1. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, melalui:

- 1) Program nilai tambah dan daya saing industri dengan anggaran sebesar Rp. 85.000.000,-, melalui kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak
 - (a) Target Kinerja
Fasilitasi dan pembinaan lembaga.
 - (b) Realisasi
Tersedianya 1 (satu) dokumen laporan edukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor.
- 2) Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas dengan anggaran sebesar Rp. 374.440.000,- melalui kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak
 - (a) Target Kinerja
 - Terlaksananya pendistribusian peralatan/sarana Peningkatan Produksi Ternak.
 - Sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup
 - (b) Realisasi
 - Terdistribusinya N2 Cair ke Kabupaten/kota
 - Tersedianya 1 (satu) laporan penandaan dan pendataan ternak, optimalisasi reproduksi melalui fasilitasi alat ban bahan IB



- 3) Program dukungan manajemen dengan anggaran sebesar Rp. 138.741.000 melalui kegiatan Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Peternakan

(a) Target Kinerja

- Layanan dukungan manajemen internal
- Layanan manajemen kinerja internal

(b) Realisasi

- Tersedianya dokumen layanan data dan informasi peternakan dan kesehatan hewan provinsi
- Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran provinsi

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 22.158.693.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 22.146.752.000,- dengan rincian output kegiatan :

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (TPOP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.158.693.000,- meliputi kegiatan :

a) Target Kinerja

1. Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat akibat bencana dengan anggaran sebesar Rp. 21.003.571.000,-
2. Layanan Dukungan Manajemen internal Internal dengan target 4 (satu) layanan dan anggaran sebesar Rp. 1.155.122.000,-

b) Realisasi

1. Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara :
 - Operasi Rutin D.I. Manikin (31.73 Km) Kab. Kupang
 - Operasi Rutin D.I. Tilong (32.36 Km) di Kab. Kupang
 - Operasi Rutin D.I. Batu Merah (17.45 Km) di Kab. Kupang
 - Operasi Rutin .I. Bena (33.88 Km) di Kab. TTS
 - Operasi Rutin D.I. Haekto (32.43 Km) di Kab. TTU
 - Operasi Rutin D.I. Mena (60.87 Km) di Kab. TTU
 - Operasi Rutin D.I. Haikesak (30.33 Km) di Kab. Belu
 - Operasi Rutin D.I. Malaka (50.11 Km) di Kab. Malaka
 - Operasi Rutin D.I. Benleng (12.32 Km) di Kab. Alor
 - Operasi Rutin D.I. Baing (16.55 Km) di Kab. Sumba Timur
 - Operasi Rutin D.I. Magepanda (31.13 Km) di Kab. Sikka
 - Operasi Rutin D.I. Mautenda (30.14 Km) di Kab. Ende
 - Operasi Rutin D.I. Mbay (28.87 Km) di Kab. Nagekeo



- Operasi Rutin D.I. Ngada/Soa (16.32 Km) di Kab. Ngada
- Operasi Rutin D.I. Satar Beleng (20.12 Km) di Kab. Manggarai Timur
- Operasi Rutin D.I. Wae Musur (15.55) di Kab. Manggarai Timur
- Operasi Rutin D.I. Wae Dingin (72.36 Km) di Kab. Manggarai Timur
- Operasi Rutin D.I. Wae Mantar (101.32 Km) di Kab. Manggarai
- Operasi Rutin D.I. Lembor (79.52 Km) di Kab. Manggarai Barat
- Operasi Rutin D.I. Nggorang (Mese,Dongkong, Galung) (95.12 Km) di Kab. Manggarai Barat
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Manikin (0.123 Km) di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Tilog (0.270 Km) di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Batu Merah (0.133 Km) di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Bena (0.383 Km) di Kab. TTS
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Haekto (0.316 Km) di Kab. TTU
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Mena (0.333 km) di Kab. TTU
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Haikesak (0.466 Km) di Kab. Belu
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Malaka (0.766 Km) di Kab. Malaka
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Benleleng (0.20 Km) di Kab. Alor
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Baing (0.416 Km) di Kab. Sumba Timur
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Magepanda (0.433 Km) di Kab. Sikka
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Mautenda (0.483 km) di Kab. Ende
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Mbay (0.433 Km) di Kab. Nagekeo



- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Ngada/Soa (0.483 Km) di Kab. Ngada
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Satar Beleng (0.133 Km) di Kab. MATIM
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Waemusur (0.25 Km) di Kab. MATIM
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Wae Dingin (0.403 Km) di Kab. Manggarai Timur
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Wae Mantar (0.45 Km) di Kab. Manggarai
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Lembor (0.433 Km) di Kab. Manggarai Barat
- Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi D.I. Nggorang (0.433 Km) di Kab. Manggarai Barat
- Pemeliharaan Rutin D.I. Manikin (31.73 km) di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Rutin D.I. Tilong (32.36 Km) di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Rutin D.I. Batu Merah (17.45 Km) di Kab. Kupang
- Pemeliharaan Rutin D.I. Bena (33.88 Km) di Kab. TTS
- Pemeliharaan Rutin D.I. Haekto (32.43 Km) di Kab. TTU
- Pemeliharaan Rutin D.I. Mena (60.87 Km) di Kab. TTU
- Pemeliharaan Rutin D.I. Haikesak (30.33 Km) di Kab. Belu
- Pemeliharaan Rutin D.I. Malaka (50.11 Km) di Kab. Malaka
- Pemeliharaan Rutin D.I. Benleleng (12.32 Km) di Kab. Alor
- Pemeliharaan Rutin D.I. Baing (16.55 Km) di Kab. Sumba Timur
- Pemeliharaan Rutin D.I. Magepanda (31.13 Km) di Kab. Sikka
- Pemeliharaan Rutin D.I. Mautenda (30.14 Km) di Kab. Ende
- Pemeliharaan Rutin D.I. Mbay (28.87 Km) di Kab. Nagekeo
- Pemeliharaan Rutin D.I. Ngada/Soa (16.32 Km) (20.12 Km) di Kab. Ngada
- Pemeliharaan Rutin D.I. Satar Beleng (20.12 Km) di Kab. Manggarai Timur
- Pemeliharaan Rutin D.I. Waemusur (15.55 Km) di Kab. Manggarai Timur
- Pemeliharaan Rutin D.I. Wae Dingin (72.36 Km) di Kab. Manggarai Timur
- Pemeliharaan Rutin D.I. Wae Mantar (101.32 Km) di Kab.



Manggarai

- Pemeliharaan Rutin D.I. Lembor (171.115 Km) di Kab. Manggarai Barat
- Pemeliharaan Rutin D.I. Nggorang (Mese, Dongkong, Galung - 95.12 Km) di Kab. Manggarai Barat

2. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

- Administrasi Umum;
- Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-monitoring) Kota Kupang NTT 1 layanan
- Sistem Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan berbasis Aplikasi SMOPI Kota Kupang NTT 1 Layanan
- Operasional dan Pemeliharaan Kantor; Kota Kupang 1 Layanan

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum melalui Program Penyelenggaraan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.587.366.000,- realisasi Rp. 5.570.279.000,- atau sebesar 99.69 % dan fisik 99,97 %, dengan rincian kegiatan:

Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, dengan rincian:

1. Target

- a) OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.255.942.000,-
- b) OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (jembatan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.417.971.000,-
- c) Layanan Dukungan Manajemen Unit Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 728.422.000,-

2. Realisasi

- a)
 - Preservasi Jalan dalam Kota Kupang-Bolok-Tenau;
 - Preservasi Jalan dalam Kota Kupang-Bolok-Tenau;
 - Preservasi Jalan dalam Kota Kupang-Bolok-Tenau;
 - Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Kota Kupang-Bolok-Tenau;
- b)
 - Pemeliharaan Rutin Jembatan dalam Kota Kupang-Bolok-Tenau
 - Preservasi Jembatan dalam Kota Kupang dan Bolok – Tenau
 - Preservasi Jembatan dalam Kota Kupang dan Bolok - Tenau



- c) ➤ Eksploitasi Operasional Kantor
- Perjalanan Dinas
- Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN
- Honorarium Penanggungjawab keuangan

Permasalahan dan kendala :

Saran Tindaklanjuti :

4. Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima 1 (satu) program Tugas Pembantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, dengan rincian

Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan dan Transmigrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 979.779.000,- meliputi kegiatan :

1. Monitoring Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kawasan, kegiatan layanan Pengembangan Usaha dan Kelembagaan kepada Masyarakat di Satuan Permukiman dan Pusat SKP
 - a) Target Kinerja
Pengadaan Sarana Produksi Pertanian di Lokasi Kotakawau SP. 5 (pugar) Kabupaten Sumba Timur dan Kapitan Meo (pugar) Kabupaten Malaka dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.080.000
 - b) Realisasi
Tersedianya Sarana Produksi Pertanian di Lokasi Kotakawau SP. 5 (pugar) Kabupaten Sumba Timur dan Kapitan Meo (pugar) Kabupaten Malaka dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.050.000,- (99,91 %).
2. Fasilitasi Lembaga di Satuan Permukiman dan Pusat SJP pada Kawasan Transmigrasi
 - a) Target Kinerja
Fasilitasi Lembaga di Satuan Permukiman dan Pusat SJP pada Kawasan Transmigrasi di Kabupaten SP. Remasingfui Kabupaten Alor, SP. Kapitan Meo Kabupaten Malaka dengan alokasi anggaran Rp. 74.200.000.-



- b) Realisasi
Terlaksananya Fasilitas Lembaga di Satuan Permukiman dan Pusat SJP pada Kawasan Transmigrasi di Kabupaten SP. Remasingfui Kabupaten Alor, SP. Kapitan Meo Kabupaten Malaka dengan realisasi Rp. 74.195.640,- (100%)
- 3. Fasilitasi Layanan Sosial budaya Kepada Masyarakat di Satuan Permukiman / Pusat SKP di Kawasan Transmigrasi
 - a) Target Kinerja
Fasilitasi Layanan Sosial budaya Kepada Masyarakat di Satuan Permukiman / Pusat SKP di Kawasan Transmigrasi dengan alokasi anggaran Rp. 124.510.000,
 - b) Realisasi
Terlaksananya Fasilitasi Layanan Sosial budaya Kepada Masyarakat di Satuan Permukiman / Pusat SKP di Kawasan Transmigrasi dengan realisasi anggaran Rp. 124.510.000,- (100%).
- 4. Pengembangan Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)
 - a) Target Kinerja
Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi Bajawa-Ngada dengan alokasi anggaran sebesar Rp.400.000.000,-
 - b) Realisasi
Terlaksananya pengembangan Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) di Kawasan Transmigrasi Bajawa-Ngada dengan realisasi anggaran sebesar Rp.400.000.000,- (100%);
- 5. Fasilitas penyelesaian Perkara Hukum Kelompok Masyarakat, permasalahan tanah transmigrasi
 - a) Target Kinerja
Perkara Hukum Kelompok Masyarakat, permasalahan tanah transmigrasi yang difasilitasi penyelesaiannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.780.000,-
 - b) Realisasi
Terlaksananya Fasilitas penyelesaian Perkara Hukum Kelompok Masyarakat, permasalahan tanah transmigrasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.756.780 (99,93 %).
- 6. Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat, fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi
 - a) Target Kinerja
Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat, fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi dengan alokasi anggaran Rp. 12.104.000,-



- b) Realisasi
Terlaksananya Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat, fasilitas
pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi dengan
realisasi anggaran Rp. 12.104.000,-(100%);
- 7. Bantuan Catu Pangan Beras untuk Transmigran
 - a) Target Kinerja
Bantuan Catu Pangan Beras untuk Transmigran lokasi
Kotakawau SP. 5 Kabupaten Sumba Timur dan lokasi
Wemaringi Kabupaten Sumba Barat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 118.120.000,-
 - b) Realisasi
Adanya pemberian Bantuan Catu Pangan Beras untuk
Transmigran lokasi Kotakawau SP. 5 Kabupaten Sumba Timur
dan lokasi Wemaringi Kabupaten Sumba Barat dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 117.569.730,- (99,07 %).
- 8. Bantuan Sarana Produksi Pertanian di Satuan Permukiman dan
Pusat SKP
 - a) Target Kinerja
Bantuan Sarana Produksi Pertanian di Satuan Permukiman dan
Pusat SKP dengan alokasi anggaran Rp. 123.200.000,-
 - b) Realisasi
Adanya pemberian Bantuan Sarana Produksi Pertanian di
Satuan Permukiman dan Pusat SKP dengan alokasi realisasi
anggaran sebesar Rp. 123.200.000,- (100%).
- 9. Dukungan Manajemen
 - a) Target Kinerja
Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 59.785.000,-
 - b) Realisasi
Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 59.619.000,- (99,72 %).

5. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT

Tugas Pembantuan (TP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 antara lain :

- 1) Program Perikanan Budidaya dengan kode satker 249170;
Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya dan pemeliharaan sumber daya perikanan dengan sasaran program tersebut adalah meningkatkan produktifitas perikanan budidaya dan pengelolaan sumber daya perikanan secara efisien dan berkelanjutan, dengan indikator peningkatan produksi perikanan budidaya.. Adapun alokasi anggaran Tugas Pembantuan untuk program



ini sebesar Rp. 236.177.000 dan terealisasi sebesar 236.170.000 atau 100% melalui kegiatan Pengelolaan Perikanan dan Kelautan meliputi Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan yang terdiri dari

a) Target Kinerja

- Sampel Monitoring Penyakit Ikan.
- Layanan Data dan Informasi (Statistik Perikanan Budidaya)
- Layanan Perencanaan dan Penganggaran
- Layanan Pemantauan dan Evaluasi
- Layanan Manajemen Keuangan

b) Realisasi

1. Sampel Monitoring Penyakit Ikan.

Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Belu dan Kabupaten TTU dengan target Unit Pembenihan dan Pembudidaya ikan dan output Terlaksananya kegiatan pantauan terhadap penyakit ikan Pada kelompok masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.913.000 atau terealisasi sebesar Rp. 16.913.000 (100%).

2. Layanan Data dan Informasi (Statistik Perikanan Budidaya).

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 79.875.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 79.875.000,- atau 100% dengan hasil Berita Acara Hasil Validasi Tingkat Nasional Semester I dan II, Data statistik Kab/Kota.

3. Layanan Perencanaan dan Penganggaran

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.134.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.134.000,- (100%) dengan output 1 (satu) dokumen dan hasil Dokumen Anggaran Dana Dekonsentrasi Satker Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025

4. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.455.000 dengan realisasi sebesar Rp. 49.488.000 (99,99%) dengan output Laporan Hasil Monitoring Bantuan Program Pemerintah Kepada Masyarakat Pembudidaya dan lokasi di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang

5. Layanan Manajemen Keuangan

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 72.800.000,- dan realisasi sebesar Rp. 72.800.000,- atau 100% dengan output 1 layanan

2. Program Pengelolaan Pengelolaan Ruang laut dengan kode satker 249169;

Program ini bertujuan untuk mengelola, melestarikan dan memanfaatkan ruang laut secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekologi, social dan budidaya. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.084.304.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.067.345.600 atau 98,43%



melalui kegiatan Kualitas Lingkungan Hidup meliputi Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut:

a) Target Kinerja

- Data dan Informasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi)
- Penyusunan Dokumen Final Kawasan Konservasi
- Penyusunan Tata Kelola Pergaraman
- Dukungan Manajemen

b) Realisasi

- 1 Tersedianya Data dan Informasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi berupa Dokumen Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil.
 - 2 Tersedianya 1 (satu) Rekomendasi kebijakan Kawasan Konservasi
 - 3 Penyusunan tata kelola pergaraman dengan hasil:
 - Tersedianya Laporan hasil verifikasi pemanfaatan ruang laut untuk ekstraksi garam
 - Terlaksananya Workshop Pengolahan dan Produksi Garam
 - Terlaksananya Koordinasi Pemanfaatan Ruang Laut
 - 4 Layanan Manajemen Keuangan dengan hasil:
 - Terlaksananya layanan data statistik kelautan dan perikanan
 - Tersedianya 1 (satu) dokumen perencanaan Program dan Anggaran
 - Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Anggaran
 - Terlaksananya Layanan Manajemen Keuangan
- 3 Program Dukungan Manajemen dengan kode satker 690948;
- Program ini bertujuan untuk adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan tugas-tugas teknis yang dilakukan oleh KKP. Program ini mendukung operasionalisasi kebijakan, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta memfasilitasi berbagai kegiatan administratif yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas kementerian. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KKP ini dengan anggaran sebesar Rp. 244.748.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 242.939.000,- atau 99,26% melalui kegiatan Kegiatan Pengelolaan, Perencanaan, Keuangan dan BMN dengan sub kegiatan Layanan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Perencanaan dan Anggaran
- a) Target Kinerja
- Penyusunan Program Anggaran dan Pemantauan Evaluasi (DAK dan APBN)



- Penyediaan Data Statistik KP
- Laporan Keuangan dan BMN Tingkat Unit Akutansi Pembantu Pengguna Anggaran dan Wilayah Tahun 2023 dan Semester I Tahun 2024
- Administrasi Umum Satker Tugas Pembantuan
- *Automatic Adjustment*

b) Realisasi

- 1 Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Anggaran dan Pemantauan Evaluasi (DAK dan APBN)
- 2 Terlaksananya pengelolaan data statistik di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 3 Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Tingkat Unit Akutansi Pembantu Pengguna Anggaran dan Wilayah Tahun 2023 dan Semester I Tahun 2024
- 4 Terlaksananya kegiatan administrasi umum satker 690948
- 5 Tidak terlaksananya Kegiatan Automatic Adjustment

4 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan kode satker 249086;

Program ini bertujuan untuk pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta penegakan hukum perikanan dan kelautan. Sasaran program tersebut adalah tersedianya lingkungan perairan yang bebas *Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU Fishing). Tugas pembantuan dalam program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 197.752.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 197.678.594 atau terealisasi sebesar 99,96% meliputi kegiatan:

1 Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan

a Target Kinerja

- Perencanaan pembinaan Pokmaswas
- Pembinaan Pokmaswas
- Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pembinaan Pokmaswas

b Realisasi

- Terlaksananya pembuatan Kaos Pokmaswas sebanyak 100 (seratus) buah yang akan diberikan kepada Pokmaswas sebagai atribut identitas yang dapat digunakan saat melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
- Terlaksananya kegiatan pembinaan Pokmaswas di kabupaten Sumba Barat (2 POKMASWAS) Kabupaten Lembata (3 POKMASWAS), Kabupaten Rote Ndao (3 POKMASWAS) dan kabupaten TTS (4 POKMASWAS)



- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pembinaan Pokmaswas di Kabupaten Sumba Barat dan Flores Timur
- 2 Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- a Target Kinerja
- Layanan Perencanaan dan Penganggaran
 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi
 - Layanan Manajemen Keuangan
- b Realisasi
- Tersedianya laporan bulanan, Triwulan, Tahunan, keuangan dan BMN, ATK
 - Terlaksananya kegiatan rekon satker pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
- 5 Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dengan kode satker 691031
- Program ini bertujuan untuk meningkatkan status pangan perikanan dengan capaian kegiatan pada T.A 2024 bersumber dari dana APBN yaitu dalam pelaksanaan promosi produk kelautan dan perikanan untuk mendukung penurunan stunting serta meningkatkan angka konsumsi ikan, pelayanan SKP bagi unit pengolahan ikan, dan pelayanan rekomendasi izin pemasaran hasil kelautan dan perikanan sebesar Rp. 256.420.000,00 dan pagu self blok sebesar Rp. 229.597.00. Setelah dilakukan revisi penghematan anggaran tersisa pagu efektif sebesar Rp. 250.197.00,00 dengan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 250.165.180,00 (99%)
- a Target Kinerja
- Nilai Tambah dan Daya saing Industri
 - Dukungan Manajemen
- b Realisasi
- Terlaksananya kegiatan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan melalui HARKANAS dan Safari Gemar Ikan
 - Terlaksananya kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PDSPKP pada satuan kerja perangkat daerah serta terfasilitasinya dukungan manajerial
- 6 Program Perikanan Tangkap dengan kode satker 249169;
- Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Sasaran program tersebut adalah meningkatkan produktifitas perikanan tangkap dan restrukturisasi armada penangkapan ikan, dengan indikator peningkatan produksi perikanan



tangkap. Alokasi anggaran Tugas Pembantuan perikanan tangkap sebesar Rp. 1.008.395.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.008.395.000 atau terealisasi sebesar 100%

a Target Kinerja

- Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan
- Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan terdiri dari:
 - (a) Identifikasi Calon Penerima Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan (SEHAT);
 - (b) Sosialisasi Perizinan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap;
 - (c) Pelatihan SIMKADA Petugas Kab/Kota;
 - (d) Kelompok Usaha Bersama yang diidentifikasi untuk ditingkatkan kapasitas kelembagaannya.
- Pengelolaan Sumber Daya Ikan
- Pembangunan prasarana pemulihan habitat sumber daya ikan dalam mendukung penangkapan ikan terukur
- Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
 - (a) Perencanaan dan Penganggaran Ditjen Perikanan Tangkap, Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pengelolaan serta Penyusunan Administrasi Keuangan
 - (b) Pendataan Statistik Perikanan Tangkap

b Realisasi

- Terlaksananya Pendaftaran Kapal Perikanan berukuran < 5 GT dan 5 – 30 GT bagi nelayan di Kota Kupang yang belum memiliki identitas teridentifikasi yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan di *Fishing Ground*
- Terlaksananya Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan, terdiri dari:
 - (a) Tersedianya data calon penerima sertifikat hak atas tanah nelayan (SEHAT) Nelayan di 5 (lima) Kabupaten/Kota (Kabupaten Kupang, Manggarai Barat, Timor Tengah selatan, Sumba Barat dan Kabupaten Alor;
 - (b) Adanya Penerbitan Perjinan Berusaha Usaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Perjinan Berusaha Usaha Subsektor Pengangkutan ikan di Bidang Penangkapan Ikan di Kota Kupang;
 - (c) Adanya Penerbitan Perjinan Berusaha Usaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Perjinan



Berusaha Usaha Subsektor Pengangkutan ikan di Bidang Penangkapan Ikan melalui Aplikasi SIMKADA di Kota Kupang;

(d) Terbentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan yang berbadan Hukum di Kota Kupang

- Tersedianya data hasil tangkapan ikan (*Log Book*)
- Terlaksananya perbaikan habitat tempat berkembang ikan di Kabupaten Flores Timur.
- Adanya Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dengan hasil:
 - (a) Terlaksananya Penyusunan Administrasi Keuangan Bidang Perikanan Tangkap.
 - (b) Terlaksananya Pendataan Statistik Perikanan Tangkap di 22 Kabupaten/Kota oleh 88 (delapan puluh delapan) petugas validator dari Dinas Perikanan.

c. Permasalahan dan Kendala

1. Terlambat buka blokir dari Satker Pusat dan *automatic adjustment* (blokir anggaran) sehingga realisasi keuangan terhambat
2. Faktor Teknis dalam hal gelar operasi pengawasan

d. Saran dan Tindakan lanjut

1. Koordinasi dengan eselon I masing-masing satker dan KPPN Kupang
2. Berkolaborasi bersama Satker pengawasan KKP/Stasiun PSDKP KKP di Kupang. Dengan kolaborasi yang baik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan penghargaan nilai IKPA terbaik Triwulan I dengan kategori pagu kecil dan penyampaian LPJ tepat waktu
3. Berkoordinasi dengan KPPN Kupang dan masing-masing satker pusat sehingga permasalahan dapat teratasi. Adanya dukungan dana untuk kegiatan Tugas Pembantuan yang merupakan pelimpahan beberapa wewenang pemerintah pusat kepada gubernur, sehingga beberapa tugas dan kewajiban pemerintah pusat dapat dilaksanakan oleh daerah. Dekonsentrasi diharapkan menjadi stimulus bagi pembangunan di daerah melalui sinergi pusat dan daerah. Untuk kegiatan dari dana Tugas Pembantuan satker 691031 tahun 2024 realisasi capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 99,9%. Hal ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang terselenggara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
4. Perlu adanya kerjasama yang baik dan tim yang solid dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka semua kegiatan dapat berjalan dengan baik



